



Jurnal Bina Praja

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat
Rosmawaty Sidauruk

PNPM Mandiri VS Kemiskinan di Indonesia
Moh. Ilham A. Hamudi

Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi)
Kristian Widya Wicaksono & Hubertus Hasan Ismail

Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung
Leydi Silvana

Penigkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Imam Radianto Anwar Setia Putra dan Dida Suhada Iskandar

Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah
Meity Handayani

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung
Noverman Duadji

Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
M. Soleh Pulungan

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA**

J. Bina Praja	Vol. 5	No. 3	Hal. 141 - 214	Jakarta, September 2013	ISSN 2085-4323
---------------	--------	-------	----------------	----------------------------	-------------------



Jurnal Bina Praja memuat pemikiran ilmiah, hasil-hasil kelitbangan, atau tinjauan kepustakaan bidang pemerintahan dalam negeri yang terbit empat kali dalam setahun setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember

Susunan Redaksi

Pelindung:	Menteri Dalam Negeri
Pembina:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Penanggung Jawab:	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
Pemimpin Redaksi:	Ir. Sunaryo, MURP., Ph.D. (Perencanaan Kota, Kemendagri)
Anggota:	• Drs. Sahat Marulitua, MA. (Kebijakan Publik) • Subiyono, SH., M.Sc., Ph.D. (Kebijakan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri) • Dr. Herie Saksono (Manajemen & Bisnis, Kemendagri) • Dr. Sorni Paskah Daeli (Manajemen SDM, Kemendagri) • Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si. (Pembangunan Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ekonomi Pembangunan, Kemendagri)
Mitra Bestari:	• Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. (Hukum, Kemendagri) • Prof. Muchlis Hamdi, MA., Ph.D. (Administrasi Publik, IPDN) • Dr. Syarif Hidayat (Otonomi Daerah, LIPI) • Bashori Imron, M.Si (Ilmu Komunikasi dan Media, LIPI)
Pemimpin Redaksi Pelaksana:	Drs. Sahat Marulitua, MA.
Anggota:	• Drs. Asrori • Eka Novian Gunawan, S.I.Kom.
Administrasi:	Yuddy Kuswanto, S.Sos.; Madiareni Sulaiman, S.Hum., Desi Sartika Helmi, Rudi Voeller.
Kuangan:	Nurchaeni, A.Md.; Eny Setyaningsih, A.Md.; Anisah Fadilah, SE.
Sirkulasi dan Distribusi:	Nur Intan Sarasati
Artistik dan Multimedia:	Ivan Indra Susanto

Alamat Redaksi:

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat.
Telepon: +62 21 310 1953 - 55, Fax. +62 21 392 4451
E-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com
Website: www.bpp.depdagri.go.id

Redaksi menerima karya ilmiah atau artikel penelitian, kajian, gagasan di bidang pemerintahan dalam negeri. Redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengubah makna substansi tulisan. Isi Jurnal Bina Praja dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya



Pengantar Redaksi

SEMANGAT PROFESIONALISME

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tanggal 12 April 2011, Jurnal Bina Praja diberikan akreditasi predikat B dengan nomor akreditasi: 330/Akred-LIPI/P2MBI/04/2011. Akreditasi diberikan kepada usatu majalah ilmiah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa majalah ilmiah yang dinilai memenuhi mutu yang ditetapkan. Ketentuan akreditasi yang diberikan berlaku selama 2 tahun sejak 12 April 2011 hingga 12 April 2013 dengan ketentuan apabila dalam waktu yang ditetapkan tersebut tidak mengajukan akreditasi ulang, maka status akreditasi tersebut otomatis dicabut dan harus menunggu terbitan baru selama dua tahun dan atau 4 terbitan baru untuk mengajukan akreditasi kembali, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala LIPI Nomor 481/D/2011 tentang Hasil Akreditasi Baru Majalah Berkala Ilmiah.

Predikat B yang diperoleh Jurnal Bina Praja dengan nilai 70-79 merupakan hasil penilaian yang terdiri dari unsur penilaian seperti: nama berkala, kelembagaan penerbit, penyunting/dewan redaksi, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, tiras, dan lain-lain.

Dalam kaitan itu, predikat yang dicapai dalam periode memasuki pengalaman tahun ketiga atau volume III Jurnal Bina Praja ini, merupakan peningkatan kemajuan yang dicapai yang harus disikapi semua pihak terkait, disamping mensyukuri tapi lebih merupakan peningkatan tanggung jawab yang lebih berat ke depan. Yaitu minimal mempertahankan predikat tersebut dan berupaya terus mencapai predikat yang lebih tinggi, predikat A. Hal itu tidak mungkin dicapai tanpa peningkatan komitmen, partisipasi dan tanggung jawab semua pihak secara profesional.

Sama halnya dengan edisi sebelumnya, penyumbang tulisan untuk dimuat dalam Jurnal Bina Praja edisi ini juga meningkat, terutama dari lembaga penelitian instansi di luar Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, dan juga dari Pemerintah Daerah. Namun karena keterbatasan halaman tidak semuanya dapat disajikan, di samping masalah substansi dan masalah teknis lainnya. Untuk itu, kepada penyumbang tulisan yang belum bisa dimuat dimohon tidak mengurangi semangat profesionalisme. Kiranya apa yang kita capai dengan akreditasi Jurnal Bina Praja ini dapat semakin memotivasi berbagai pihak, khususnya pejabat fungsional peneliti untuk meningkatkan komitmen dan kualitas profesionalitas.

Salam Redaksi



Daftar Isi

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	iii
Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat Rosmawaty Sidauruk	141 - 158
PNPM Mandiri VS Kemiskinan di Indonesia Moh. Ilham A. Hamudi	159 - 162
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Kristian Widya Wicaksono & Hubertus Hasan Ismail	163 - 168
Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung Leydi Silvana	169 - 176
Penigkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Imam Radianto Anwar Setia Putra dan Dida Suhada Iskandar	177 - 188
Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah Meity Handayani	189 - 196
Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Noverman Duadji	197 - 204
Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur M. Soleh Pulungan	205 - 214



Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Rosmawaty Sidauruk

Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 141 - 158

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD dan permasalahannya. Metode yang digunakan survey formatif. Informannya aparat Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif. Permasalahan antara lain: masih sulit memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarnya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum optimalnya kemudahan perijinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang. Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, peningkatan kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk keberlanjutan bahan baku yang diperlukan.
Kata kunci: Pemerintah daerah, pengembangan, bakat individu, ekonomi kreatif

konsep penghidupan berkelanjutan yang lebih komprehensif.

Kata kunci: PNPM Mandiri, Program Pengentasan Rakyat Miskin, dan Penghidupan Berkelanjutan

Kristian Widya Wicaksono & Hubertus Hasan Ismail

Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia: Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Administrasi

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 163 - 168

Abstrak:
Reformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsip-prinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.
Kata kunci: hirarki; kesatuan komando; spesialisasi; rentang kendali; organisasi rasional; konsistensi.

Moh. Ilham A. Hamudy

PNPM Mandiri Vs Kemiskinan di Indonesia

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 159 - 162

Abstrak:
Artikel ini adalah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Artikel ini berusaha mendedahkan PNPM secara makro, seraya menjabarkan beberapa kekurangannya yang kerap menjadi sasaran kritik para pemerhati pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri, oleh pemerintah dianggap sebagai program jitu guna mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tetapi, sayangnya, meski sudah banyak sekali uang digelontorkan untuk mensukseskan program itu, angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karenanya, PNPM Mandiri perlu ditinjau ulang keberadaannya, baik secara konsep maupun secara implementatif. Artikel ini menawarkan konsep dan pendekatan pemberdayaan dan pengentasan rakyat miskin dengan mengedepankan

Leydi Silvana

Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 169 - 176

Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan salah satu lokasi penelitian. Dari hasil penelitian kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak

<p>seimbang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah didalam menangani konflik yang terjadi adalah menciptakan kehidupan yang aman, tenang dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik. Kata kunci: konflik, rawan, toleransi.</p>	<p>penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap. Kata kunci: evaluasi, laporan, akunting, asset tetap, akrua</p>
<p>Imam Radianto Anwar Setia Putra & Dida Suhada Iskandar</p> <p>Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 177 - 188</p> <p>Abstrak: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang <i>core business</i> kelitbangan membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarahkan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbangannya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya. Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi. Kata kunci: peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan, organisasi</p>	<p>Noverman Duadji</p> <p>Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 197 - 204</p> <p>Abstrak: Rakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partisipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?. Tujuan penelitian ini diarahkan pada: (1) penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajat (kategorisasi) partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media transaksi dan bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajat ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4). Atas dasar simpulan diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melalui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakatan dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD. Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pengambilan Keputusan, APBD</p>
<p>Meity Handayani</p> <p>Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Peningkatan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal. 189 - 196</p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di Pemerintah, kemudian mendeskripsikan factor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, serta membangun penyajian pelaporan alternatif yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung. Hasil analisis penelitian menunjukkan: laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari system yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, system tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanyamengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no. 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan merupakan dasar</p>	<p>M. Soleh Pulungan</p> <p>Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013, hal 205 - 214</p> <p>Abstrak: Tujuan kajian untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekowisata dari mulai potensi alam, potensi budaya, potensi SDM hingga ketersediaan energi di kecamatan. Menentukan alternatif strategi bagi</p>

pengembangan ekowisata di wilayah Kecamatan. Sample penelitian meliputi 7 kecamatan yang ada di wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Metodologi yang digunakan yakni metode deskriptif, namun bersifat aplikatif, sehingga secara aktual dapat digunakan oleh para perencana dan pengambil keputusan pembangunan di daerah ini. Hasil penelitian; (1) bahwa responden memiliki persepsi negatif terhadap pengembangan ekowisata karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti, maksud dan tujuan/manfaat ekowisata. (2) Masyarakat selama ini belum berperan aktif dalam mengembangkan potensi produk wisata didaerahnya. (3). Alternatif strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang ekowisata ke semua stakeholders.

Kata kunci: ekowisata, potensi alam, budaya, masyarakat, kecamatan strategi



The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

Rosmawaty Sidauruk

Enhancing The Role Of Local Government Creative Economy Development In Order In West Java Province

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 141 - 158

Abstract

This study was conducted to determine whether the West Java provincial government has undertaken the development of the creative economy, with a look at the form of policy and budget support in the budget and problems. Formative survey methods used. Bappeda informant apparatus, Bureau of Economic, Department of Industry, creative economy businesses. The results showed, West Java Provincial Government already made a blueprint of local regulations and creative economy issues, among others: still difficult to separate the creative industry sub-sector with other sectors so that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property, the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative economy is still lacking. Suggested need to be committed is ready to facilitate marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials required.

Keywords: Local government, development, individual talents, the creative economy

Indonesia Bureaucracy: A Critical Analysis Toward Bureaucratic Reform In Indonesia Based On The Administration Principles

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 163 - 168

Abstract

The implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.

Keywords: hierarchy, unity of command, specialization, span of control, rational organization and consistency

Leydi Silvana

Mapping Conflict Area Prone In Lampung Province

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 169 - 176

Abstract

The purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to resolve the conflict (weaknesses and strengths) and formulate a strategy that needs to be done to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to illustrate, elaborate, answer and describe the portrait mapping conflict prone areas in Indonesia. From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property, public facilities and restore the physical facilities and the community is an important thing to do in dealing with conflict.

Keywords: conflict, troubled, tolerant

Imam Radianto Anwar Setia Putra & Dida Suhada Iskandar

Organizational Capacity Improvements In Research and Development Agency (BPP) Ministry of Home Affairs

Moh. Ilham A. Hamudy

PNPM Mandiri Vs Poverty In Indonesia

Jurnal Bina Praja
Volume 5 Number 3 September 2013, pg. 159 - 162

Abstract

This article is about the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This article try to exert PNPM macro, as outlines some drawbacks that are often the target of criticism of the observer community empowerment. PNPM Mandiri, the government considered the surefire program to alleviate poverty from the pool. But, unfortunately, though it was a lot of money disbursed to the success of the program, the poverty rate in Indonesia has not experienced significant declines. Therefore, PNPM Mandiri existence should be reviewed, both in concept and in implementation. This article offers the concept and approach to empowerment and poverty of the poor by promoting the concept of sustainable livelihoods is more comprehensive.

Keywords: PNPM Mandiri, Poverty, Poverty Alleviation Programs, and Sustainable Livelihoods

Kristian Widya Wicaksono & Hubertus Hasan Ismail

The Application Of Administration Principles In

<p><i>Jurnal Bina Praja</i> Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 177 - 188</p> <p>Abstract Research and Development Agency (BPP) whose core business is kelitbangan need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agency. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affair indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agency used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization. Keywords: capacity building, research and development, organizational.</p>	<p>participation of the Aronstein's participation ladder. According to the reasons of the goal, the qualitative method is used. The research result indicated that the decision making of the provincial budget is the formal actor's arena and area. It's expressed as political process, transactional media and bargaining among the formal actors. The public participation is in signing of participation, such as give the information and consultative advices. Keywords: Public Participation, Decision Making, Provincial Budget</p>
<p><i>Meity Handayani</i></p> <p><i>Evaluate The Reporting Of Fixed Assets For Improving Government Institutions Supervision</i></p> <p><i>Jurnal Bina Praja</i> Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 189 - 196</p> <p>Abstract This study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building an ideal alternative to improve the supervision of government institutions. This study uses descriptive with qualitative approach. Data collection was performed by the study of documents method from print and electronic sources and Direct Observation. The analysis resulted: fixed asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does not include information on the cost of depreciation, depreciation calculations rely on the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very important, because the next Government is obliged to follow the PP no. 71 tahun 2010 about accrual accounting base and is the basis for asset in order to achieve the orderly recording and management of fixed assets. Keywords: evaluation, report, accounting, fixed assets, accrual</p>	<p><i>M. Soleh Pulungan</i> <i>Optimization Of Development Ecotourism Potency Objects Kutai Regency Province Kaltim</i></p> <p><i>Jurnal Bina Praja</i> Volume 5 Number 3, September 2013, Pg. 205 - 214</p> <p>Abstract: Purposes of the study are to determine the potential that can be developed for ecotourism activities ranging from natural resources, cultural potential, the potential energy to the availability of human resources in the district of Kutai regency. In order to determine strategic alternatives for development ecotourism in the District. Research sample includes 7 districts of Kutai Regency. The methodology used the descriptive method, however, is applicable, so it can actually be used by planners and decision makers in the development of this area. The results: (1) that the respondent has a negative perception towards tourism development because of the lack of public knowledge about the meaning, purpose and objectives / benefits of ecotourism. (2) The public has not played an active role in developing the potential of tourism products in their respective regions. (3). Alternative strategies to enhance community participation is done in a way to disseminate to all stakeholders of ecotourism. Keywords: eco-tourism, natural resources, culture, the people, district, the strategies.</p>
<p><i>Noverman Duadji</i></p> <p><i>Public Participation In Decision Making And Shopping District Budget Revenues Province Lampung</i></p> <p><i>Jurnal Bina Praja</i> Volume 5 Number 3 September 2013, Pg. 197 - 204</p> <p>Abstract As we know that the People own the provincial budget (APBD). Although the public participation lies on more important placement in operating the public affairs and local governance, especially in the decision making of the provincial budget. The research problem is stated: what is the public participation in operating the provincial budget and what is it's category of the Aronstein's participation ladder? The research aimed to: (1) description of the public participation in operating the provincial budget, and (2) analysis to classify the public</p>	

**PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI
PROVINSI JAWA BARAT**

***ENHANCING THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT
CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN ORDER
IN WEST JAVA PROVINCE***

Rosmawaty Sidauruk

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat

e-mail: waty.sidauruk@ yahoo.com

Diterima: 5 Juli 2013; direvisi: 13 Juli 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD dan permasalahannya. Metode yang digunakan survey formatif. Informannya aparat Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif Permasalahan antara lain: masih sulit memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarannya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum optimalnya kemudahan perijinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang. Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, peningkatan kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk keberlanjutan bahan baku yang diperlukan.

Kata kunci: Pemerintah daerah, pengembangan, bakat individu, ekonomi kreatif .

Abstract

This study was conducted to determine whether the West Java provincial government has undertaken the development of the creative economy, with a look at the form of policy and budget support in the budget and problems. Formative survey methods used. Bappeda informant apparatus, Bureau of Economic, Department of Industry, creative economy businesses. The results showed, West Java Provincial Government already made a blueprint of local regulations and creative economy issues, among others: still difficult to separate the creative industry sub-sector with other sectors so that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property, the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative economy is still lacking. Suggested need to be committed is ready to facilitate marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials required.

Keywords: Local government, development, individual talents, the creative economy

PENDAHULUAN

Munculnya ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia, sebenarnya diawali dari adanya pergeseran orientasi dunia barat yakni dari era pertanian ke era industrialisasi yang kemudian disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (*infokom*) serta globalisasi ekonomi.

Penemuan baru di bidang teknologi infokom misalnya seperti internet, email, SMS, *Global System for Mobile Communication* (GSM) telah menciptakan interkoneksi antar manusia, yang

membuat manusia menjadi semakin produktif dan gaya hidup dan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih peka atas rasa, serta pasar pun menjadi semakin luas dan semakin global dan muncullah “kompetisi yang semakin keras”.

Negara-negara maju makin menyadari bahwa saatnya mereka tidak bisa mengandalkan supremasi di bidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumberdaya manusia (SDM) yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru, yang mengintensifkan informasi dengan kreatifitas yang populer disebut ekonomi kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang



Sumber: Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011

Gambar 1: Batu Capaian (Milestones) Ekonomi Kreatif di Indonesia.

disebut industri kreatif (Kementerian Perdagangan, 2008).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat diketahui, bahwa ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dan usaha mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana makna pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan (Kementerian Perdagangan, 2008). Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumberdaya yang bukan hanya terbarukan, tetapi juga tak terbatas yaitu ide, talenta, dan kreativitas.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (2008), peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan, dengan kontribusi sebesar 6,3% atau setara dengan Rp. 104,6 trilyun (nilai konstan) dan Rp.152,5 trilyun (nilai nominal), hal ini dilihat dari kontribusi PDB rata-rata pada tahun 2002-2006. Dilihat dari sisi ekspor, berdasarkan estimasi klasifikasi subsektor, maka kontribusi ekonomi kreatif terhadap total ekspor rata-rata sebesar 10,6 % untuk tahun 2002-2006.

Berdasarkan data empiris di atas, maka disimpulkan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia mempunyai peluang yang signifikan terhadap perekonomian nasional, penciptaan bisnis, dan dukungan pada pencitraan dan identitas bangsa, meskipun disadari ada tantangan yang dihadapi.

Pada dasarnya ekonomi kreatif telah tumbuh dan berkembang sejak negara Indonesia ada (Kementerian Perdagangan RI, 2011), akan tetapi baru mendapat perhatian yang khusus sejak tahun 2005, pada tahun inilah pemerintah telah meletakkan batu-batu capaian (*milestones*) dan setiap capaian tersebut menjadi titik yang menginspirasi pengembangan ekonomi kreatif. Secara runtut batu capaian (*milestones*) ekonomi kreatif di Indonesia dapat dikemukakan pada gambar 1.

Secara seremonial Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, telah diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI. kepada Presiden RI pada tanggal 4 Juni 2008, terdiri dari 2 (dua) bagian utama yaitu pertama, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015, kedua, Rencana Pengembangan 14 (empatbelas) sektor Industri Kreatif 2009-2015. Mengacu pada Cetak Biru dimaksud, Kementerian Perdagangan menggodok Instruksi Presiden yang bertujuan untuk mengajak seluruh instansi pemerintah untuk “Mendukung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015” yaitu: “pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi yang telah ditetapkan dalam cetak biru”.

Dengan demikian terbitlah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada tanggal 5 Agustus 2009 dan cetak biru tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Instruksi Presiden dimaksud. Instruksi Presiden tersebut sifatnya imperatif yang menginstruksikan kepada 27 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Gubernur, Bupati/ Walikota seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015.

Inpres No 6 Tahun 2009 tersebut secara sistemik menetapkan 6(enam) sasaran, 21(dua puluh satu) arah, dan 83 (delapan puluh tiga) Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015. Yang menjadi pertanyaan adalah: a) Bagaimanakah wujud nyata peran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Inpres tersebut?, b) apakah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus menunggu ditetapkannya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh

Pemerintah baru kemudian Pemda melaksanakan instruksi dimaksud? Kedua pertanyaan tersebut adalah masalah krusial bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Inpres No 6 Tahun 2009 dan sementara itu Kemendagri baik sebagai K/L yang menerima dan melaksanakan Inpres tersebut yang harus menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, maupun sebagai pembina Pemda yang merekomendasikan atas pelaksanaan Inpres dimaksud.

Dalam kaitan itulah Kajian ini dilaksanakan dengan judul **Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan studi kasus di Provinsi Jawa Barat**. Kedua pertanyaan ini kemudian dielaborasi menjadi rumusan permasalahan yaitu “Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Strategi yang sudah dibangun.

Dengan demikian Kajian ini bertujuan untuk: 1) melihat dan mengklasifikasi dukungan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam bentuk kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, serta bentuk kesiapan dan dukungan anggaran yang tertuang dalam APBD-nya, 2) Mengidentifikasi dan menganalisis produk ekonomi kreatif bagi daerah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, 3) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi kreatif Provinsi Jawa Barat terkait dengan Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, dan 4) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi daerah Provinsi Jawa Barat serta solusinya, terkait dengan pelaksanaan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif.

Sedangkan manfaat kajian adalah memberi masukan kepada pimpinan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda guna mendorong Pemda Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif.

Ada empat (4) hal yang sangat esensial dan perlu dijelaskan terkait dengan Kajian ini, yaitu: 1) kebijakan, 2). peningkatan peran pemerintah daerah, 3) Inpres sebagai suatu petunjuk pelaksanaan kebijakan, dan 4). ekonomi kreatif. Keempat hal ini merupakan landasan berpijak yang perlu dijelaskan dan diuraikan, sehingga baik dalam analisisnya maupun dalam menyusun instrumen penelitiannya dapat lebih fokus dilakukan.

Amara Raksasataya dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1975) mengatakan: Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategis yg diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan membentuk tiga (3) elemen penting, yaitu: a) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai, b). Taktik atau strategi dari berbagai suatu taktik dan strategis tujuan yang diinginkan, dan c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Yang mengartikan secara bersamaan “*public policy*” atau Kebijakan Negara, yaitu: a) Thomas R. Dye (1978) mengatakan kebijakan negara adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” mengandung maksud bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak, ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. b) Gerge C, Edwards dan Ira Sharkansky (1978) mengatakan “*Is what government say and do, or not to do. Is is the goals purpose of government programs...*” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah....”)

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian “*Policy*” dan “*Public Policy*” seperti diutarakan maka dapat ditarik kesimpulan : 1) Pengertian *policy* atau kebijakan, lebih menekankan kepada *policy* atau kebijakan yang berlaku secara umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Amara Raksasataya, dan 2) pengertian “*Public Policy*”, yaitu “Kebijakan Negara”. (Dye, Edwards dan Sharkansky) sangat tegas dan jelas yaitu: “Kebijakan Negara itu dapat ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras (penting) Pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Yang menjadi sorotan lebih jauh adalah *Public Policy* atau Kebijakan Negara, yakni: Serangkaian tindakan yang diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan turunan dari Undang-undang untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Mengacu pada rumusan di atas, ada tiga (3) hal penting sebagai intisari dari rumusan dimaksud, yaitu: 1). Serangkaian tindakan yang diwujudkan dalam bentuk taktik dan strategi yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan turunan dari peraturan perundang-undangan, 2) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan turunannya, dan 3) Cakupan atau isi dari peraturan perundang-undangan dan turunannya.

Terkait dengan ketiga intisari ini, maka perlu ada ketatalaksanaan, yakni: sistem kerja dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan yang didalamnya memuat tata kerja dan prosedur kerja (LAN-RI, 1991), dengan memperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, antara lain: 1). Harus didasarkan pada kebijakan yang berlaku (penyusunan dan pengaturan rangkaian tindakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan turunannya, hendaknya selalu berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi untuk menjamin keserasiannya), 2) Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap Aparatur yang terlibat. 3) Prinsip koordinasi, 4). Tertulis, 5). Disosialisasikan kepada semua pihak

(stakeholder) dan 6) Kesederhanaan/tidak berbelit-belit

Secara normatif peran pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan: "Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya...". Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1),(2),(3), dan (4) menyebutkan secara rinci urusan pemerintahan yakni urusan wajib (ayat 2) dan urusan pilihan (ayat 4). Adapun urusan wajib terdiri dari 25 urusan, sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 urusan.

Terkait dengan Kajian yang dilakukan, sangat erat hubungannya dengan industri, sedangkan industri dimaksud adalah merupakan salah satu urusan pilihan daerah provinsi, kab/kota. Dalam perkembangannya kegiatan industri mempunyai dampak global, sehingga negara-negara maju menyebutnya industri kreatif, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu andalan PDB sehingga disebut Ekonomi Kreatif.

Untuk memacu perkembangan industri, Pemerintah sejak Tahun 2005 memberikan perhatian yang lebih besar untuk lebih mengembangkan industri yang ada dengan mengandalkan sumberdaya insani yang kreatif untuk berinovasi, dan memberi peran kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota atas perannya yang sudah ada selama ini secara konvensional agar lebih meningkatkan peran dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Kajian ini adalah "pemberian petunjuk, arahan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan kota, atas pelaksanaan urusan dibidang industri yang selama ini dilaksanakan secara konvensional untuk dikembangkan dan dikelola dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan menyusun dan menetapkan serta melaksanakan rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009".

Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 ayat (1) dikemukakan " jenis dengan hirarki peraturan perundang-undangan " adalah ,a).Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,b).Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, c)Peraturan Pemerintah, d)Peraturan Presiden, e)Peraturan Daerah.

Terkait dengan Undang-undang tersebut di atas, maka Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif,

merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang bersifat nasional dengan muatan sebagai berikut:

1. Jenis tugas/pekerjaan yang akan dilaksanakan yakni Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Yg ditugaskan melaksanakan: para Menteri, Gubernur,Bupati/Walikota seluruh Indonesia
3. Objek kegiatan yang akan dikembangkan yakni empat belas (14) sektor/sub-sub sektor yang meliputi: 1). Periklanan, 2). Arsitektur, 3). Pasar seni dan barang antik, 4) Kerajinan, 5). Design, 6). Fashion (model), 7). Film,video dan fotografi, 8). Permainan interaktif, 9). Musik, 10). Seni pertunjukan, 11). Penerbitan dan percetakan, 12). Layanan komputer dan piranti lunak, 13). Radio dan televisi, dan 14). Riset dan pengembangan.
4. Mempunyai sasaran ,arah, strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015.

Departemen Perdagangan R.I pada tahun 2007 mendefinisikan industri kreatif di Indonesia sebagai "industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta industri" (Kemendag, 2008). Namun, kehidupan di masa mendatang, tidak hanya dituntut bakat, tetapi juga harus mempunyai pola pikir. Howard Gardner (dalam Kemendag, 2008) mengatakan, bahwa terdapat lima (5) pola pikir yang diperlukan pada masa mendatang (*five minds of the future*), yaitu:

1. Pola Pikir Disipliner (*the Disciplinary Mind*), di sekolah ,selain ilmu-ilmu seperti, matematika dan sejarah,saat ini harus menambah,bidang seni seperti disiplin ilmu lainnya.
2. Pola Pikir Mensintesis (*The Synthesizing Mind*), Pola pikir sintesa melatih kesadaran untuk berpikir luas dan fleksibel, mau menerima sudut pandang dari multidisiplin.
3. Pola Pikir Kreasi (*The Creating Mind*), Dalam konteks desain, proses kreasi selalu diawali dengan pengumpulan permasalahan yang ada dan harus dapat dipecahkan. di akhir proses, akan dihasilkan desain-desain baru ; Dalam konteks bisnis, pola pikir kreasi ini, dapat menggerakkan perusahaan-perusahaan untuk lebih proaktif, tidak hanya mengikuti trend, tetapi justru menciptakan trend.
4. Pola Pikir Penghargaan (*The Respectful Mind*) yaitu kesadaran untuk mengapresiasi perbedaan diantara kelompok-kelompok manusia. Pola pikir seperti ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan.
5. Pola Pikir Etis (*The Ethical Mind*). Seorang warga negara yang baik, akan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, baik sebagai seorang pekerja maupun sebagai warga negara. Dalam konteks perubahan iklim dunia,



Sumber: Kementerian Perdagangan RI (2008)

Gambar 2: Perlunya Ekonomi Kreatif.

perekonomian nilai-nilai etika terhadap lingkungan dapat mendorong terciptanya produk yang ramah lingkungan, dan ia merasa malu bila ia meniru produk lain secara terang-terangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pekerja kreatif tidaklah cukup memiliki bakat, pandai menggambar, menari, menyanyi dan menulis cerita, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengorganisasikan ide-ide multi disipliner dan juga kemampuan memecahkan masalah dengan cara-cara diluar kebiasaan.

a. **Perlunya Ekonomi Kreatif Dikembangkan**

Industri kreatif ini dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya..

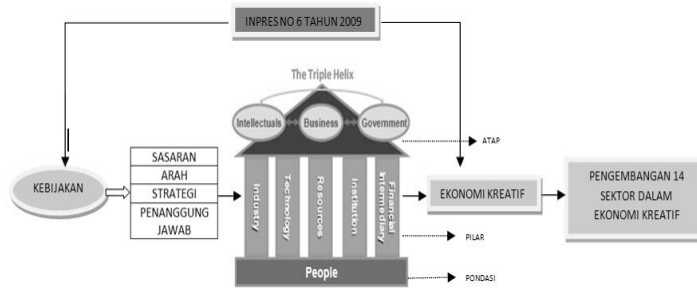
Menurut Kemendag (2008) industri kreatif ini perlu dikembangkan, karena sektor ini memiliki kontribusi ekonomi yg signifikan bagi perekonomian Indonesia, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumberdaya yang terbarukan, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, dan memiliki dampak sosial yg positif. Di bawah ini divisualisasikan “perlunya ekonomi kreatif dikembangkan”.

b. **Sektor Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Memperhatikan makna ekonomi kreatif, kemampuan yang dibutuhkan atau yang harus dimiliki dan pola pikir yang harus ditumbuh kembangkan dalam mendukung ekonomi kreatif, serta perlunya ekonomi kreatif dikembangkan di

Indonesia, maka visi ekonomi kreatif sampai dengan tahun 2025 adalah “Bangsa Indonesia Yang Berkualitas Hidup dan Bercitra di Mata Dunia”. Sedangkan misinya adalah: “Memberdayakan Sumberdaya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional

Terkait dengan misi ekonomi kreatif tersebut tampak bahwa sangat erat terkait dengan produk/jasa sebagai kontribusi dari industri kreatif. Adapun produk/jasa sebagai sektor atau subsektor pengembangan ekonomi kreatif itu (Kemendag 2008) sebanyak empat belas (14) produk/jasa, yaitu: (1) Industri Periklanan, yaitu : suatu kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu),(2) Industri Arsitektur, yakni: Jasa konsultasi arsitek yang mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi perencanaan kota,(3) Industri Barang Seni, yakni: kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik dan langka dan berasal dari masa lampau (bekas) yang dilegalkan oleh undang-undang , dan memiliki nilai estetika seni yg tinggi,(4) Industri Kerajinan, yakni: Industri yang menghasilkan produk-produk, baik secara keseluruhan dengan tangan atau menggunakan peralatan biasa, peralatan mekanis. Produk kerajinan tersebut dibuat dari *raw materials* dalam jumlah yang tidak terbatas. Profesi-profesi dibidang industri kerajinan meliputi:a)Pembatik, (5) Industri Desain. Dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif, akan dikembangkan dalam tiga kelompok disiplin ilmu desain, yaitu:a).Desain industri ,b) Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual c). Desain Interior, (6) Industri Fesyen adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, dan desain asesories mode lainnya,(7) Industri Film,



Gambar 3: Kerangka Pikir Kajian Ekonomi Kreatif (Pen. 2012)

Video dan Fotografi adalah kegiatan yang terkait dengan kreasi, produksi video, film dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video,(8) Industri Permainan Interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video,(9) Industri Musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan musik, reproduksi dan distribusi dari rekaman suara,(10) Industri Seni Pertunjukan,Kegiatan ini berhubungan dengan seni drama, teater dan karawitan serta tari,(11) Industri Penerbitan dan Percetakan, meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, Koran, majalah, tabloid,(12) Industri Layanan Komputer dan Piranti Lunak, yang meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi,(13) Industri Televisi dan Radio, yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio, dan (14) Industri Riset dan Pengembangan. Industri kreatif pada riset dan pengembangan meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Ada 3 hal yang perlu untuk mengembangkan, model pengembangan ekonomi kreatif yaitu: (1)Pondasi industri kreatif,yaitu sumber daya insan Indonesia,dengan demikian menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas sumber daya insan inilah yang menjadi faktor produksi utama di dalam industri kreatif.

Richard Florida (2011) dalam Kemendag (2008) menyatakan bahwa ada tiga Strata Kreatif, yaitu:1)Inti Super Kreatif (*Super Creative Core*). , terdiri dari ilmuwan dan insinyur pada Universitas, pengarang cerita, seniman , dll dan lainnya yang secara intensif terlibat dalam proses kreatif., 2)Pekerja Kreatif Profesional (*Creative Professional*) seperti berbasis jasa layanan keuangan, berbasis hukum, praktisi kesehatan dan teknikal dan manajemen bisnis,dan 3).Strata pekerja yang pada umumnya memiliki gaji/upah yang kecil dan tidak memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Seperti:

pekerja pembersih , pekerja administrasi, keamanan dan jumlahnya banyak. Agar Strata Kreatif berkembang lebih banyak dibanding strata pekerja, pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung lahirnya para pekerja kreatif, sehingga ekonomi kreatif yang merupakan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge economy*) dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Selanjutnya terdapat lima (5) pilar, yang perlu terus diperkuat, sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai Visi dan Misi ekonomi kreatif Indonesia,yaitu: (1) Industri. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu., khususnya industri kreatif; (2). Teknologi. : teknik atau metode-metode atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya teknologi ini dapat mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata; (3) Sumberdaya (Resources), merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani,juga sumberdaya alam/ ketersediaan lahan sebagai input penunjang dalam industri kreatif; (4) Institution, dalam pilar pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial,seperti sistem nilai, adat istiadat atau norma, maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Industri kreatif memajukan ide-ide yang dapat dieksploitasi menjadi potensi ekonomi. Dengan demikian, peranan hukum dalam memproteksi ide-ide sangat penting, proteksi ide-ide dilaksanakan melalui mekanisme HKI. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana insan Indonesia menggunakan proses kreatif di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara keilmuan, industri maupun komersial, dan (5) Finance Intermediary, adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan. modal/ekuitas, maupun pinjaman/kredit.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif ada tiga (3) aktor yang saling berhubungan yakni Cendekiawan (*Intellectuals*), Bisnis (*Business*) dan Pemerintah (*Government*) yang disebut sebagai sistem "Triple Helix" (dalam Kemendag, 2008).

Hubungan yang erat, saling menunjang dan bersimbiosis mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar model industri kreatif (yang divisualisasikan dalam kerangka pikir) akan menghasilkan industri kreatif berdiri kokoh dan berkesinambungan. Kerangka pikir penelitian ini yang secara visual digambarkan pada gambar 3.

Kementerian Perdagangan RI telah melakukan studi banding ke tujuh negara, dua diantaranya dikemukakan dibawah ini:

- a. Konsep awal Malaysia adalah menggali dan menonjolkan identitas nasional budaya dan warisan budaya dan berkembang menjadi creative content, animation dll. Pemerintah sebagai aktor utama pengembangan ekonomi kreatif yang dipegang oleh Ministry, culture dan Horitage. Hal yang dapat dipelajari dari Malaysia adalah pentingnya identitas nasional.
- b. Pemerintah Thailand dalam mengelola industri kreatifnya dengan membentuk satu badan khusus yaitu TCDC dengan fokus desain, yang melibatkan Kementerian di dalamnya seperti kementerian luar negeri, kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan. Yang menjadi pembelajaran bagi Indonesia adalah Thailand menciptakan kemudahan akses utk mendapatkan "Source of capital" yang berdampak kepada peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode evaluasi formatif yaitu melihat dan mengkaji pelaksanaan serta program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program dimaksud, (Masri Sinagarimbun dan Sofian Efendi, 1987:5). yaitu hendak melihat dan menganalisis pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2009, serta mencari umpan balik guna lebih bersinergi dalam pelaksanaannya.

Informan ditetapkan berdasarkan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yaitu: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tupoksi: (1) bidang perencanaan pembangunan daerah, (2) menangani administrasi perekonomian daerah, (3) bidang perdagangan dan industri, (4) dan pelaku usaha. Lalu ditetapkan satu orang pejabat/staf dari Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas Perdagangan dan Industri serta salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif.

Untuk data sekunder, meminta secara langsung kepada SKPD Informan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, dan data lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Data primer diperoleh langsung dari pejabat SKPD Informan melalui *checklist interview* atau wawancara berdasarkan daftar check (tanda centang), dengan

menyediakan bahan wawancara dalam bentuk *checklist* yakni peneliti memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan dalam bahan wawancara dalam bentuk *checklist* yakni peneliti memberi tanda (√) pada kolom yang disediakan dalam bahan wawancara.

lisis data dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 246-253) yaitu aktivitas dalam analisis data melalui langkah sebagai berikut : (1) data reduction atau reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting saja terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, (2) data display (penyajian data), yaitu, penyajian (display) data dalam bentuk tabel, dengan demikian, data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling terkait, sehingga dapat membentuk pemahaman tentang pengembangan ekonomi kreatif dan (3) conclusion drawing (verification) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang harus didukung data dan bukti-bukti lain yang valid dan konsisten. Melalui penarikan kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya raya akan keanekaragaman budaya dan manusia yang kreatif. Sebagai pusat pendidikan dengan ditunjang keberadaan berbagai R&D centers, serta sebagai trendsetter berbagai industri seperti: pusat moda/fashion, musik dan perintis perfilman, maka Jawa Barat dapat menarik generasi muda dari berbagai daerah sehingga dapat meningkatkan keanekaragaman potensi lokal (diversity and variety of local potentials) yang kaya akan produk inovatif yang memiliki potensi ekspor. Dengan tersedianya potensi lokal yang tinggi sebagai pendukung industri kreatif, menjadikan Jawa Barat berkaitan erat dengan industri kreatif yang relevan dengan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Kontribusi industri kreatif di Jawa Barat dari tahun 2001 hingga 2005 telah menyumbangkan rata-rata 8% per tahun terhadap PDRB Jawa Barat dengan laju pertumbuhan pada tahun 2001-2005 sekitar 4,55%. Mampu menyerap tenaga kerja sedikitnya 392.636 atau sekitar 2,54% dari jumlah. Dengan otonomi daerah maka Pemerintah Jawa Barat dapat lebih leluasa dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan industri kreatif.

Industri kreatif di Jawa Barat belum digali dan dikembangkan secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. termasuk menambah 1 sum sektor basis industri kreatif yaitu, Kuliner. Oleh karena itu Bappeda Provinsi Jawa Barat berinisiatif untuk membentuk suatu tim inisiasi (test force) yang terdiri dari berbagai pakar untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif sehingga

Tabel .1 Rencana Strategis Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat

2008 - 2010		2011-2013		>2015	
Rencana Jangka Pendek	Hasil yang diharapkan	Rencana Jangka Menengah	Hasil yang diharapkan	Rencana Jangka Panjang	Hasil yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • Peletakan dasar industri kreatif • Identifikasi potensi industri kreatif Jawa Barat • Penyusunan kebijakan industri kreatif (blueprint) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan komisi kreatif • Cetak biru industri kreatif • Statistik industri kreatif • Kebijakan perijinan • Paket kebijakan keuangan • Paket kebijakan investasi • Sosialisasi industri kreatif • Pembinaan komunitas kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan permintaan produk kreatif • Peningkatan investasi dalam dan luar negeri • Pemantapan pendidikan dan pelatihan pekerja untuk industri kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar kreatif: ekspor dan substitusi impor • Ekspo industri kreatif • Duta Jabar • Cinta produk Jabar • Konsorsium pendidikan dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan lebih lanjut • Peningkatan kemitraan strategis • Pencitraan ikon nasional industri kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Keunggulan daya saing Jabar • Jabar ikon nasional • Penghargaan kepeloporan industri kreatif

Sumber: Bappeda Jabar

menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing yang dapat diandalkan.

Terkait dengan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Provinsi Jawa Barat telah membuat cetak biru industri kreatif di Jawa Barat. Konsep cetak biru adalah:

1. Apa impian bersama penduduk Jawa Barat? Mengembangkan visi bersama dan menerima pola pikir baru yang berdaya saing, kesejahteraan, produktivitas, penguasaan diri, dan kerendahan hati
2. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan perubahan provinsi? Mengembangkan kesediaan untuk bertekad dan bersemangat demi keberhasilan perubahan provinsi.
3. Apa yang diharapkan terjadi sebagai keluaran dari perubahan?berusaha keras menoreh prestasi atau kontribusi atau mencapai target dalam segala aspek perubahan provinsi
4. Apa yang mesti dijaga agar hasil perubahan menjadi milik bersama? Meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjunjung keadilan sosial di provinsi.

Dibangunnya Visi bersama: Menjadikan Industri Kreatif sebagai media pembangunan SDM di Jawa Barat. Sumberdaya yang dimaksudkan adalah yang kreatif (melihat sesuatu yang baru), inovatif (mewujudkan produk/ jasa), dan produktif (memanfaatkan kesempatan).

Dibangunnya Komitmen bersama yaitu (1) Pembentukan forum industri kreatif Jabar: pemimpin kreatif, pewirusaha kreatif, komunitas kreatif, pekerja kreatif; (2) Peningkatan komunitas kreatif Jabar, (3) Pengembangan prasarana intelektual, (4) Pembangunan ekonomi a.l. dgn: penataan rantai nilai, peningkatan daya saing industri kreatif,

peluang investasi & sistem permodalan, (5). Peningkatan mutu pendidikan kreatif, (6) Ruang kreatif publik & arsitektur kota,dan (7) Jejaring kota-kota kreatif jabar

Dibangunnya Instrumen pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat yaitu: (1) Berbagi kepentingan: riset, informasi, dan forum, (2) Iklim bertumbuh: kebijakan industri kreatif, (3) Kompetensi: pengembangan SDM dan komunitas kreatif, (4) Sisi penawaran: kreasi, produksi, dan merk, (5) Sisi permintaan: komersialisasi, promosi, distribusi, dan edukasi dan (6) Tujuan: Produktivitas dan daya saing industri kreatif

Dibangunnya Arah kebijakan, yaitu: (1):

1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas
 - a) Komisi Bandung atau Jabar kreatif,b).Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif, c). Cetak biru pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta), f). Kemudahan perijinan usaha industri kreatif, g). Paket kebijakan keuangandan h). Paket kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)
2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
 - a). Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi, b). Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif, c). Layanan investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif, e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyeteraan gender

Tabel 2. Draft Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Jabar

Bidang	Target 2012 - 2019
Pengembangan Infrastruktur	a. Pengembangan pola relasi yang saling mendukung b. Fasilitasi infrastruktur yang tepat c. Inisiasi pembentukan skema dan lembaga pembiayaan yang sesuai
Pendidikan dan Pelatihan	a. Fasilitasi creative talent untuk berkreasi bagi masyarakat b. Creative mindset programme kepada masyarakat c. Pelatihan dan pendampingan entrepreneurship
Pemasaran dan Komersialisasi	a. Penciptaan iklim kondusif bagi rantai nilai IK b. Market attractiveness programme untuk keunggulan kompetitif
Hukum dan Etika	a. Fasilitasi dan apresiasi terhadap nilai karya dan budaya
Penciptaan	b. Inventarisasi dan fasilitasi karya kreatif c. Sosialisasi HKI dan etika penciptaan kepada masyarakat
Inovasi kelembagaan dan Birokrasi	a. Creative mindset programme bagi pemangku kepentingan/ pemerintah b. Program unggulan pemerintah berdasarkan kebutuhan yang strategis c. Aksi sebagai fasilitator meningkat dibanding mengedepankan birokrasi
Riset dan Pengembangan	a. Program inovasi bermuatan lokal yang unggul b. Revitalisasi basis teknologi pendukung
Community Development	a. Program peningkatan jumlah dan kualitas creative worker b. Fasilitasi networking dan manajemen komunitas

Sumber: Bappeda Jabar

3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
a). Expo industri kreatif, b). Kawasan atau pasar kreatif, c). Duta Bandung kreatif di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

Roadmap dan Orientasi Pencapaian Program Kerja

Roadmap pengembangan ekonomi kreatif ini direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan RPJMD tahap ketiga yaitu sampai dengan tahun 2019. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat merupakan keputusan yang dibuat dengan memperhatikan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan sebagai wadah yang dapat menjembatani serta memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif di Jawa Barat.

Tugas komite adalah menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat dan mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Komite mempunyai fungsi intermediasi pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Jawa Barat dan penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunitas kreatif setiap Kabupaten/Kota maupun dengan komunitas kreatif nasional dan internasional.

Pembiayaan kegiatan komite berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Susunan personalia komite terdiri dari OPD yang terkait dengan ekonomi kreatif dan para pakar yang masuk dalam komisi. Pembina adalah gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Barat.

Ketua komite adalah kepala Bappeda, Wakil ketua adalah Kepala Disperindag, Sekretaris Komite adalah Kabid Ekonomi pada Bappeda, dan anggota komite adalah Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Kadis. Pariwisata dan kebudayaan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis. Pendidikan, Kadis Permukiman dan Perumahan, Kadis. Komunikasi dan Informatika, dan Kabiro Administrasi perekonomian Setda Prov. Jabar .

Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat

Penjelasan mengenai rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat dimulai dari prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan common goals pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan,
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan,
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat,
4. Kemandirian Pangan,
5. Peningkatan Kinerja Aparatur,
6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
7. Kemandirian Energi Dan Kecukupan Air Baku,
8. Penanganan Bencana Dan Pengendalian Lingkungan Hidup,
9. Pembangunan Perdesaan dan
10. Pengembangan Budaya Lokal Dan Destinasi Wisata

Pengembangan industri kreatif di Jawa Barat dikaitkan dengan common goals yang ke-3 yaitu peningkatan daya beli masyarakat. Pada common goals ke-3 tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan tematik dan unggulan yang digambarkan pada tabel 3.

Output dari tematik 5 pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif berikut:1).Meningkatnya jumlah populasi pelaku usaha industri kreatif,2).Tumbuhnya wirausahawan

**Tabel 3 Kegiatan Tematik dan kegiatan Unggulan pada
Common Goals Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

No	Tematik	Kegiatan Unggulan
1	Peningkatan budaya masyarakat bekerja dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha UMKM	a. Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan wirausaha melalui inkubasi bisnis b. Peningkatan Produktivitas SDM Multisektor berstandar Asean c. Lapangan Kerja Baru dan Modal Usaha Melalui UKM (Kerjasama dengan lembaga asuransi perkreditan)
2	Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi	a. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat b. Fasilitasi dan koordinasi c. pengembangan kawasan ekonomi khusus
3	Pengembangan skema pembiayaan alternatif	a. Fasilitasi Skema Pembiayaan alternatif Gemar, Gapura, Gempita, KUMKM, melalui skema jaminan asuransi modal usaha b. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Keuangan Non Perbankan c. Fasilitasi Pembentukan trust fund
4	Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur	a. Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Perikanan Tangkap b. Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) c. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan d. Fasilitasi Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA) e. Dana Operasi Pasar Sembako
5	Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif	Fasilitasi pengembangan kawasan industri kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tabel 4. Rincian Kegiatan Tematik Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif

No	Rincian Kegiatan Tematik	OPD Penanggung Jawab
1	Pengembangan Industri Kreatif berbasis IT	Dinas Indag
2	Pengembangan Industri Fashion Muslim	Dinas Indag
3	Membangun Jejaring Komunitas Kreatif	Dinas Indag
4	Penumbuhan Wirausahawan Muda Berbasis Industri Kreatif	Dinas Indag, KUMKM

muda dibidang industri kreatif, 3). Bandung menjadi *trendsetter* Fashion Muslim Internasional dan 4).Tumbuhnya industri animasi , *games, software* dan film

Terdapat 4(empat) kebijakan dalam rencana aksi pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, yaitu (1) Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik, sosial dan hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif, dengan strategi pencapaiannya dengan : (a) Membangun infrastruktur fisik berupa ruang publik sebagai penunjang aktivitas pelaku ekonomi kreatif , (b)Mempermudah akses pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan (c) Menjamin perlindungan hukum bagi produk kreatif Jawa Barat yang merupakan warisan budaya dan bagi pelaku ekonomi kreatif. (2) Mengembangkan sumber daya insan kreatif, (3) Memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan pelaku ekonomi kreatif dan (4) Meningkatkan dukungan

terhadap riset dan pengembangan kreativitas dan inovasi. Masing-masing kebijakan ini diuraikan dalam strategi , program dan kegiatan berikut indikator kinerja sebagai alat mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. .Rincian Kebijakan, strategi , program dan, kegiatan, indikator dan penanggungjawab kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel terlampir.

Pengembangan Industri Unggulan

Provinsi Jawa Barat menentukan tiga subsektor unggulan yang akan dikebangkan di Provinsi Jawa Barat, yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Pemilihan 3(tiga) industri ini didasarkan atas pertimbangan hasil analisa sumbangsih nilai produk-produk tersebut terhadap PAD, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja. Strategi pengembangan dan rencana aksi terhadap Industri unggulan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Industri kuliner. Pengembangan industri kuliner dilaksanakan dengan menetapkan sasaran jangka menengah dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka menengah antara lain Penambahan variasi dan cita rasa baru, sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah Peningkatan volume dan variasi kuliner. Strategi pengembangannya antara lain, membentuk klaster industri kuliner untuk memudahkan kerjasama dan melakukan inovasi. Rencana Aksinya antara lain Memperkaya keanekaragaman kuliner dengan mengadakan pameran kuliner asli daerah secara rutin untuk memperkenalkan kuliner asli daerah dan mendorong para pelaku usaha membentuk komunitas sebagai wadah knowledge sharing dan networking. Strategi pengembangan dan rencana aksi lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.

2) Industri fesyen dan desain. Adapun sasaran jangka menengah Industri fesyen dan desain antara lain adalah ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan terlebih bahan baku lokal, sedangkan sasaran jangka panjangnya antara lain adalah menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Strategi pengembangannya antara lain adalah Bekerjasama dengan institusi pendidikan/peneliti mengembangkan bahan baku substitusi untuk industri fesyen terlebih yang masih menggunakan bahan baku impor. Rencana aksinya antara lain adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan terminal ekspor Jabar dengan memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana terminal pelabuhan laut maupun udara serta membangun akses ke wilayah terminal. Strategi pengembangan dan rencana aksi lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.

3) Industri kerajinan: Adapun sasaran jangka menengah Industri kerajinan antara lain adalah Mengolah dan memanfaatkan bahan baku alam tanpa merusak ekosistem alam sedangkan sasaran jangka panjangnya antara lain adalah Memiliki fasilitas pengolahan kembali limbah produksi. Strategi pengembangannya antara lain xxxMembentuk kelompok kerjasama para pelaku. Rencana aksinya antara lain adalah Mengembangkan lembaga sertifikasi kerajinan. Strategi pengembangan dan rencana aksi lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.

Profil Ekonomi Kreatif

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA), sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era ekonomi dan informasi. Industri kreatif, diartikan sebagai kumpulan aktifitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain Industri Budaya atau Ekonomi kreatif.

Selain 14 sub sektor yang menjadi basis industri kreatif sebagaimana yang dipetakan oleh

Kementerian Perdagangan, di Jawa Barat menambah 1 sub sektor lagi yaitu KULINER. Sehingga di Jawa Barat sub sektor industri kreatif menjadi 15. Kuliner yaitu pusat produk makanan olahan khas Indonesia yang perlu disebarluaskan melalui media yang tepat di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional.

Kelompok usaha di Jawa Barat sangatlah beragam, baik yang formal maupun non formal. Tumbuh dan berkembang atas komunitas pelaku usaha mandiri seiring dengan maraknya program pemerintah dari tingkat pusat ke daerah, pembentukan kelompok usaha dilakukan mulai dari tingkat RT /RW bahkan nasional, kemudian berkembang menjadi wirausahawan. Intinya wirausahawan harus memiliki kemampuan berpikir kreatif-imajinatif dalam melihat, menciptakan dan menemukan peluang bisnis yang baru.

Profil Industri Kreatif di Beberapa Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

Penelitian pernah dilakukan oleh CIEL SBM ITB di 11 kabupaten/kota / kota di Jawa Barat seperti: 1) Bandung (sector industry fashion dan desain ,yang masih perlu pembinaan), 2). Bogor: (kuliner dan fashion,perak,Wayang), 3)Ciamis(industry disain dan kuliner), 4)Cirebon(kerajinan), 5)Garut (Kerajinan dan Fashion), 6)Kuningan (kuliner dan Kerajinan), 7).Tasikmalaya(kerajinan border dan fashion,desain dan arsitektur), 8)Bekasi(industry rumah tangga:lkrajinan bunga,boneka), 9)Karawang (Industri pengolahan,pariwisata, tanaman pangan,perikanan darat), 10).Purwakarta(Kerajinan keramik), 11) Subang(Kuliner,industry kerajinan).

Urutan Subsektor Industri Kreatif di Jawa Barat

Dari berbagai sub sector industry di Jawa Barat, terdapat sub sector dari yang dominan sampai terendah yaitu: Kerajinan(27,7%), fasion (15,3%), desain (14,6%), kuliner (14,6%) arsitektur (4%), Visual art (3%), turism, seni, patung dan film (2%). Di urutan terakhir yaitu teater, multimedia, games interaktif, layanan computer dan piranti lunak(1%)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan pelaku industri dapat digambarkan secara singkat kondisi industri kreatif di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Kondisi kreatifitas di Jawa Barat sudah maju, ekonomi kreatif muncul dari kreatifitas masyarakat, pemerinth hanya fasilitasi. Kondisi ini didukung oleh banyaknya perguruan tinggi dan anugerah seni budaya dari leluhur. Di masyarakat telah berkembang komunitas-komunitas yang sudah ada jauh sebelum terbitnya Inpres No 6 tahun 2009. Pembinaan oleh pemerintahpun tidak seperti pembinaan pada pengusaha biasa, karena kreatifitas telah berkembang sendiri. Bahkan para ahli dari Jabar (Prof. Togar dari ITB) diminta untuk membuat cetak biru oleh Kementerian Perdagangan.

Pengembangan industri kreatif melibatkan banyak OPD yaitu Biro administrasi dan perekonomian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Biro perekonomian bersifat koordinatif terhadap semua pihak yang terlibat dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh instansi teknis. Bappeda melaksanakan perencanaan dengan memasukkan perencanaan terkait Ekonomi Kreatif dan menginisiasi pembentukan komite Ekonomi kreatif sebagai tempat berkumpul untuk merencanakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Jabar serta menyusun kebijakan terkait dan mengawal rencana aksi pengembangannya. Sementara urusan teknis rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh berbagai OPD seperti Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU dan Permukiman. Salah satu contoh gerak Dinas KimRum adalah membuat ruang terbuka publik di 4(empat) kab/kota untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Jika dilihat dari kondisi paling maju dalam hal dukungan dan komitmen Pemda adalah Kota Bandung dan Cimahi, karena sampai dimasukkan ke kurikulum pendidikan. Yang paling menonjol di Jabar adalah fesyen, animasi, kerajinan, IT, iklan. Yang paling maju khususnya di Kota Bandung adalah fashion, karena didukung oleh kebiasaan berpakaian masyarakat yang bangga dengan kreasi rekan/ lingkungan sendiri.

Pendanaan oleh APBD mulai dari inventarisasi masuk di Bappeda, di biro perekonomian hanya ada dana-dana koordinasi. Sangat diuntungkan bahwa ekonomi kreatif ditempatkan di Bappeda karena terkait program dan penganggaran. Penganggaran belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, karena belum ada petunjuk untuk membuat hal itu. Ada wacana bahwa jika dikhususkan tentang industri kreatif maka bisa *double counting* dengan sektor lain karena industri kreatif bisa masuk di sektor manapun. Contoh: perkembangan brownis saat ini termasuk industri kreatif tapi dihitung pada industri makanan. Jadi harus sangat hati-hati dalam mendefinisikan dan memisahkan kegiatan ekonomi kreatif.

Beberapa permasalahan terkait pengembangan ekonomi kreatif diantaranya:

1. Saat ini belum ada profil ekonomi kreatif karena belum dilakukan perhitungan sektor industri kreatif karena sulit sekali mengidentifikasi secara rigid mana industri kreatif dan definisi kreatif.
2. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.
3. Terlihat di Kota Bandung adalah kemacetan akibat industri fesyen yang maju pesat.
4. Masalah industri kreatif: pendanaan belum terealisasi semua, HAKI, perijinan, promosi, dan permodalan

Kondisi pengembangan industri kreatif sangat butuh komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/kota belum. Butuh peran Kemendagri untuk pelaksanaannya. Disarankan Kemendagri menulis surat ke Kab/Kota agar segera melaksanakan amanat Inpres No. 6 Tahun 2009 dan segera menyelenggarakan evaluasi pelaksanaannya. Peran serta pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif juga tidak bisa disamakan dengan perannya terhadap kebijakan lainnya.

Pelaku usaha jika terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah kondisi kreatifitasnya menjadi terbatas, pemerintah sebaiknya hanya berperan pada regulasi perijinan, tempat usaha, dan regulasi pajak. Pendanaan biasanya hanya untuk pelatihan-pelatihan terutama dalam hal administrasi. Peran pemerintah bukan dalam pengembangan kreatifitas tapi menciptakan kondisi bagaimana usaha tetap bisa berjalan seperti sertifikat halal, ijin Depkes, BPOM, HAKI, dan manajemen usaha.

Salah satu peran pemerintah juga adalah pemberian apresiasi seperti adanya acara Baksia Caraka anugerah dari pemerintah pusat untuk Kab/Kota yang sangat mendukung ekonomi kreatif di daerah. Tahun ini Jabar mengirim 5 wakil yaitu Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sukabumi, dan Depok

Kebijakan Industri Kreatif di Provinsi Jawa Barat

Menurut pemda keberadaan inpres No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sangat baik karena setiap instansi pemerintah yang tercantum dalam inpres tersebut wajib membuat rencana aksi berupa program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif serta bersama-sama menghasilkan program tahun Indonesia Kreatif 2009. Inpres tersebut juga sebagai pedoman dalam pengembangan industri/ ekonomi kreatif di Indonesia. Inpres ini sudah disosialisasikan di Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaranya dari Disperindag dan Biro Ekonomi Prov. Jabar. Sosialisasi tingkat Kabupaten/ Kota juga diselenggarakan di Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Inpres No. 6 Tahun 2009 sudah ditindaklanjuti oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Kepgub No. 500/Kep 146-BPP/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Keputusan ini merupakan pedoman kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Jabar dan mengawal pelaksanaan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Jabar. Tetapi sampai sejauh ini muatan kebijakan yang tercantum belum dilaksanakan, disarankan difasilitasi oleh pusat dalam hal ini Kemendagri.

“Leading sector” pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2009 adalah Bappeda dan Disperindag Provinsi Jabar. Sesuai tupoksinya Bappeda Prov. Jabar menyelenggarakan komunikasi dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional serta Kabupaten/Kota. Selain itu pelaksanaannya melibatkan Dinas pariwisata dan kebudayaan Prov. Jabar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemukiman dan Perumahan.

Provinsi Jawa Barat telah siap melaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif karena sudah ada SKPD atau wadah lain sebagai pelaksana, sudah ada dana/ anggaran yang disediakan dalam APBD setiap tahun, dan ada SDM yang mendukung pelaksanaannya. Tetapi masih diperlukan peningkatan komitmen dalam pelaksanaan pembinaan industri kreatif khususnya dalam dukungan dana/ biaya.

Permasalahan yang dihadapi Pemda pelaksanaan pengembangan industri kreatif :

1. Tidak memiliki peraturan yang mengatur manajemen hak atas kekayaan intelektual, terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil kreatifitas
 2. Masih tumbuh budaya yang tidak kreatif (budaya ikut-ikutan, negatif thinking)
 3. Kegiatan kreatif masih terkotak-kotak dan belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai dari kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi.
 4. Masalah pendanaan/ biaya
 5. Masalah pendataan industri-industri kreatif
 6. Masalah permodalan di para pelaku usaha
 7. Masalah kemitraan dalam dukungan promosi dan bahan baku
 8. Keterbatasan infrastruktur ruang publik yang berpotensi untuk sumber inspirasi, ekspresi, produksi, dan apresiasi
 9. Masih banyak kesulitan para pelaku kreatif dlm mengurus perijinan,perlu dukungan
 10. Belum dirasakan adanya sinkronisasi program kreatif dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
 11. Belum adanya diklat yang materinya benar-benar dibutuhkan oleh pelaku kreatif
- Solusi dari pemecahan permasalahan di atas diantaranya adalah:

1. Membangun kemampuan SDM melalui workshop, pelatihan, dan pendidikan
2. Mengembangkan ekosistem bisnis yang terpadu
3. Implementasi dari model pengembangan industri kreatif
4. Perindungan dan manajemen, dukungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
5. Membangun hubungan dengan komunitas kreatif (Bandung Creative City Forum dan Cimahi Creative Community)
6. Perlu adanya dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat
7. Perlu adanya dukungan dana untuk pendataan industri kreatif di Jabar
8. Perlu diperbanyak even-even/ kegiatan pameran atau E-Commerce untuk pemasaran produk industri
9. Ruang publik pelaku kreatif dengan lokasi di 4 kab/Kota dalam

10. Perijinan dipermudah

11. Memfasilitasi diklat pelaku ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh dinas perindag dan dinas pendidikan

Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat

Pengembangan industri kreatif di Jawa Barat meliputi 14 (empat belas) sub sektor ditambah sub sektor kuliner. Yang paling menonjol khususnya di Kota Bandung adalah Fesyen. Kerajinan banyak berkembang di wilayah priangan. Kerajinan yang berkembang adalah anyaman dan kayu. Lukisan berkembang di Kab. Bandung di Desa Jelesong dengan media kanvas. Lukisan ini bahkan sering dibeli langsung oleh pedagang Malaysia untuk diperjualbelikan kembali. Industri furniture banyak berkembang di Cirebon dan Sumedang. Bahan baku yang digunakan masih cukup tersedia dari bahan baku lokal.

Pemasaran produk industri kreatif tersebut biasanya melalui toko-toko besar di kota dan di luar kota atau pusat-pusat perdagangan besar, pemasaran melalui on-line/web (internet Marketing), pemasaran melalui pameran-pameran/ promosi, bazar, dan pemasaran antar teman (mouth to mouth).

Kondisi perbankan mendukung keberadaan industri kreatif, tetapi masih jarang dimanfaatkan oleh pelaku industri kreatif, karena banyak industri kreatif yang masih belum bankable terkait perijinan usaha khususnya industri yang berskala kecil. Perlu dukungan/ peran pemerintah dalam masalah perizinan usahanya.

Kondisi Pelaku Industri Kreatif di Provinsi Jawa Barat

Hartawan Harun, pemilik usaha rumah kebaya bordir dengan nama Tafali Bordir.

Usaha telah dimulai 14 tahun yang lalu. Awalnya pegawai Cuma 11 orang, sekarang menjadi 21 orang . Produksi di Tasikmalaya dan pegawai asli berasal dari Tasikmalaya sendiri yang sudah punya kemampuan membordir secara turun menurun.. Cara meningkatkan keterampilan pegawai baru, dengan memberikan pekerjaan dengan bahan murah terlebih dahulu sehingga bisa dijual murah seiring waktu dan jika dilihat kemampuan sudah meningkat maka baru diberi bahan yang mahal. Saat ini upah pekerja lebih kurang 600 ribu per potong kebaya. Upah ini mungkin di atas rata-rata, buktinya tidak ada pekerja yang keluar selama dipekerjakan.

Bahan baku masih total dari dalam negeri, biasanya dari supplier sutera Garut. Jenis bordir yang ada saat ini adalah bordir komputer, mesin dinamo (Juki), dan mesin halus. Dengan komputer produksi bisa massal (banyak) tetapi hal ini mematikan daya kreatifitas maupun kuantitas tenaga manusia. Selain itu dengan komputer memiliki kelemahan jika satu jahitan benang terputus maka bordir akan terlepas semua. Dengan mesin Juki pengerjaan 1 potong kebaya makan waktu 2 hari,

sementara dengan mesin halus memakan waktu lebih kurang 2 minggu. Desain asli kreatifitas sendiri dibantu istri. Inspirasi bisa datang dari desain batik pasangan kebaya , dimodifikasi dengan menerapkan ke kain kebaya.

Permodalan dari pribadi karena ,takut dikejar bunga hutang. Tapi saat ini sangat terbantu, karena menjadi mitra binaan Telkom sudah 3 periode (1 periode 2 tahun). Bentuk binaannya harus meminjam uang tetapi dengan bunga yang sangat ringan. Fasilitas yang diberikan adalah promosi secara rutin dengan seluruh biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak telkom.

Upaya pemasaran sedang merambah kerjasama dengan kantor-kantor pemerintah dan sangat berharap agar keluar SE Gubernur tentang pemakaian seragam dengan unsur bordir. Pemasaran saat ini masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan pameran. Belum ada jalur untuk ekspor. Selama ini kemungkinan barang sudah dibawa keluar negeri dari tangan ke tangan tapi tidak langsung memasarkan sendiri ke luar negeri. Fasilitas dari pemda pada saat pameran biasanya hanya menyediakan stan tanpa akomodasi sehingga banyak pengusaha yang masih berat untuk ikut. Sementara jika dimotori oleh BUMN/D seluruhnya ditanggung. Maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggerakkan BUMN/D yang belum berperan dalam mendukung industri kreatif.

Pembahasan

1. Dukungan dan Kesiapan Provinsi Jawa Barat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dari gambaran yang sudah dipaparkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya, bahkan sudah dilaksanakan sebelum terbitnya Inpres No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Inpres No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sendiri sudah disosialisasikan di Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaranya dari Disperindag Prov. Jabar dan Biro Ekonomi Prov. Jabar. Sosialisasi tingkat Kabupaten/ Kota juga diselenggarakan di Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Pemda Provinsi Jabar telah sangat siap melaksanakan amanat inpres tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda terkait hal tersebut. Meskipun kebijakan-kebijakan ini keluar setelah adanya Inpres No 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, namun latar belakang dikeluarkannya kebijakan tidak semata-mata karena adanya Inpres, tapi karena pemerintah telah menyadari sepenuhnya akan potensi ekonomi kreatif di wilayahnya yang sangat besar sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi Jawa Barat secara umum. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat

berupa Cetak Biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat, terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan adanya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat.

Cetak Biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat yang telah dibuat sudah cukup lengkap memuat visi bersama, komitmen bersama, instrumen pengembangan ekonomi kreatif, arah kebijakan, rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif, roadmap dan orientasi pencapaian program kerja dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Cetak biru ini telah disusun berdasarkan tahapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang diharapkan dapat mempermudah dalam setiap pelaksanaannya.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat merupakan salah satu bentuk komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam melaksanakan amanat Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Komite ini dibuat dengan melibatkan seluruh perwakilan stakeholder yang terkait dengan ekonomi kreatif. Selain berperan dalam membuat dan mengawal kebijakan, komite ini juga dibentuk sebagai wadah yang menjembatani stakeholder/ pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tetapi karena relatif baru, keputusan gubernur tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

Rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat telah disusun dan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat sehingga terbentuk rangkaian dan ada benang merah antara pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan Jawa Barat secara umum . Dalam prioritas pembangunan daerah/ common goals pembangunan daerah terdapat tujuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam common goals tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan tematik dan unggulan pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif dengan memfasilitasi pengembangan kawasan industri kreatif. Setelah itu disusun kebijakan dan rencana aksi pengembangan industri kreatif di Jawa Barat yang disusun detail dijabarkan menjadi strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan penanggungjawab masing-masing kegiatan. Selain itu, Provinsi Jawa Barat telah menetapkan subsektor unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Dari masing-masing subsektor tersebut disusun sasaran, strategi pengembangan, dan rencana aksi pengembangan masing-masing subsektor.

Kesiapan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan ekonomi kreatif selain dari sisi kebijakan, juga bisa dilihat dari sisi SDM sebagai pondasi utama model pengembangan ekonomi

kreatif dan dari sisi pendanaan. Dari sisi SDM, Jawa Barat mempunyai sumberdaya kreatif yang berasal dari kemampuan turun temurun insan Jawa Barat sesuai dengan budaya yang berkembang di Jawa Barat dan juga didorong oleh kreatifitas para pendatang di Jawa Barat. Dari sisi pendanaan, pendanaan pengembangan ekonomi kreatif didanai oleh APBD. Pendanaan oleh APBD mulai dari inventarisasi dan dana komite pengembangan ekonomi kreatif masuk di Bappeda. Selain itu ada dana terkait koordinasi di biro perekonomian. Sangat diuntungkan bahwa ekonomi kreatif ditempatkan di Bappeda karena terkait program dan penganggaran.

Peran serta pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif juga tidak bisa disamakan dengan perannya terhadap kebijakan lainnya. Pelaku usaha jika terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah kondisi kreatifitasnya menjadi terbatas, pemerintah sebaiknya hanya berperan pada regulasi perijinan, tempat usaha, dan regulasi pajak. Pendanaan biasanya hanya untuk pelatihan-pelatihan terutama dalam hal administrasi. Peran pemerintah bukan dalam pengembangan kreatifitas tapi menciptakan kondisi bagaimana usaha tetap bisa berjalan.

2. Potret Ekonomi Kreatif dan Permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangannya.

Potret lengkap kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat telah digambarkan pada bagian terdahulu. Beberapa hal penting yang dapat dicermati dari kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat adalah:

- a. Berkembangnya industri kreatif di Jawa Barat diawali dengan tumbuhnya kelompok usaha mandiri di masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok ini kemudian berkembang menjadi wirausahawan-wirausahawan yang pandai dan berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya.
- b. Perkembangan ekonomi kreatif di Jabar bisa jadi karena di Jawa Barat mempunyai keunggulan/ potensi kreatif yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Beberapa diantaranya adalah:
 - 1) Dari sisi individu kreatif Jawa Barat dikaruniai individu kreatif yang didukung oleh warisan budaya yang beranekaragam dan masih terpelihara di masyarakat.
 - 2) Pada sisi geoculture, Jabar sangat strategis dan diuntungkan dengan jarak dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Salah satu karakter Jabar dan masyarakatnya adalah terbuka dengan berbagai perkembangan dan kemajuan.
 - 3) Jabar sebagai pusat pendidikan, khususnya Kota Bandung terdapat perguruan tinggi

yang memberikan pendidikan yang berpengaruh pada kreatifitas SDM.

- 4) Berkembangnya sektor pariwisata di Jawa Barat sangat mendukung keberadaan ekonomi kreatif.
- c. Provinsi Jawa Barat menentukan tiga subsektor unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Pemilihan 3(tiga) industri ini didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah seperti sumbangsih nilai produk-produk tersebut terhadap PAD, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja.
- d. Selain 14 sub sektor yang menjadi basis industri kreatif sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, di Jawa Barat menambah 1 sub sektor lagi yaitu KULINER. Jawa Barat memiliki warisan budaya produk makanan khas yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia.
- e. Berdasarkan jenis usaha, 3 (tiga) jenis usaha yang paling dominan di provinsi Jawa Barat adalah: Seni dan Budaya (38%), Kerajinan (15%), dan Desain (15%). Tiga jenis usaha tersebut dimungkinkan karena merupakan sektor dengan *barrier entry* yang rendah sehingga membuat pengusaha lain juga dapat melakukan usaha yang serupa. Selain itu sektor tersebut tidak membutuhkan modal yang besar, bisa didasarkan pada hobi menjadikan sektor ini banyak diminati pengusaha.
- f. Berdasarkan jumlah karyawan, gambaran jumlah karyawan pada industri kreatif yang ada didominasi oleh jumlah karyawan 1 s.d 5 orang (55%). Berdasarkan pendapatan pertahun, sebagian besar bermodal 0-10 juta (31%). Modal usaha yang digunakan dalam industri kreatif adalah: < 10 juta (28%) dan 20-30 juta (41%). Dari data tersebut berarti bahwa usaha kreatif didominasi oleh usaha mikro.
- g. Berdasarkan pangsa pasar, industri kreatif di Jawa Barat sebagian besar dinikmati oleh pasar lokal (31%). Untuk lebih mengembangkan ekonomi kreatif Jawa Barat perlu diupayakan untuk membidik pasar di luar Jawa Barat.
- h. Berdasarkan supply bahan, bahan sebagian didapat dari lokal (38%) dan lingkup Provinsi Jawa Barat (40%). Kemudahan dalam bahan baku ini memungkinkan potensi ekonomi kreatif untuk lebih berkembang lagi dikarenakan efisien dari biaya produksi.
- i. Berdasarkan ber badan hukum/tidak, sebagian besar usaha kreatif tidak berbadan hukum (71%) dan yang sudah berbadan hukum berjumlah 29%. Berdasarkan merk/ produk, sebagian besar merk/ produk industri kreatif tidak terdaftar (81%) dan yang terdaftar hanya 19%. Hal ini perlu segera ditangani karena kondisi berbadan hukum/ tidak dan daftar merk

sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha ekonomi kreatif.

- j. Berdasarkan asal sumber modal, modal yang digunakan dalam usaha industri kreatif sebagian besar adalah dari tabungan pribadi/ pinjaman keluarga (44%). Kondisi ini selaras dengan data bahwa usaha ekonomi kreatif sebagian besar masih dalam skala kecil. Selain itu kondisi usaha kreatif yang sebagian belum berbadan hukum mempengaruhi cara pengusaha untuk mendapatkan sumber modal. Di sisi lain perbankan masih perlu didorong untuk lebih berperan dalam pembiayaan usaha kreatif.
- k. Berdasarkan dukungan yang dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif, hal-hal yang dibutuhkan adalah: pemasaran (30%), keuangan (23%), karyawan (19%), HKI (14%), prasarana umum (13%), lain-lain (1%). Hal ini harus dijadikan fokus dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha kreatif.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Jawa Barat dalam mengembangkan ekonomi kreatif diantaranya adalah:

- a. Masih sulit sekali memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya yang selama ini digunakan. Definisi kreatif sendiri masih sulit dipahami oleh seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada penganggaran yang belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif. Jika dikhususkan tentang industri kreatif maka dimungkinkan bisa *double counting* dgn sektor lain karena industri kreatif bisa masuk di sektor manapun.
- b. Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung iklim kreatif (perijinan, investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta)
- c. Kondisi pengembangan industri kreatif sangat butuh komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/kota belum. Belum dirasakan adanya sinkronisasi program kreatif dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
- d. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih belum merata dan perlu ditingkatkan.
- e. Masalah permodalan di para pelaku usaha
- f. Tingkat kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran bagi ekonomi kreatif Jawa Barat masih perlu ditingkatkan

Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat masih kurang, salah satu dampaknya belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi

SIMPULAN

Simpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini antara lain: *pertama*, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya.

Pemda Provinsi Jabar telah sangat siap melaksanakan amanat Inpres No 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda terkait hal tersebut, seperti Cetak Biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan adanya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat. Selain dari sisi kebijakan, kondisi SDM dan kesiapan pendanaan juga sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Peran serta pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa disamakan dengan campur tangan pemerintah terhadap kebijakan lainnya. Peran pemerintah bukan dalam pengembangan kreatifitas tapi menciptakan kondisi bagaimana usaha kreatif dapat terus berjalan dan semakin berkembang.

Kedua, kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat telah berkembang turun temurun dan didukung oleh kondisi keunggulan/ potensi kreatif yang berbeda dari provinsi lain. Berdasarkan potensinya yang besar, selain mempunyai 14 subsektor basis industri kreatif yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan, Jawa Barat menetapkan 1(satu) subsektor industri kreatif tambahan yaitu KULINER . Namun demikian, Provinsi Jawa Barat menentukan 3 (tiga) subsektor unggulan yang akan dikembangkan yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan karena ketiga unggulan ini memberikan sumbangan pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Dari data yang ada, usaha kreatif didominasi oleh usaha mikro. Pangsa pasar industri kreatif di Jawa Barat sebagian besar dinikmati oleh pasar lokal. Bahan baku sebagian didapat dari lingkup Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar merk/ produk industri kreatif tidak terdaftar. Berdasarkan asal sumber modal, modal yang digunakan dalam usaha industri kreatif sebagian besar adalah dari tabungan pribadi/ pinjaman keluarga. Berdasarkan dukungan yang dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif, yang dibutuhkan adalah pemasaran, keuangan, karyawan, HAKI, prasarana umum, dan lain-lain. Hal ini harus dijadikan fokus dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha kreatif.

Ketiga, masalah yg dirasa menghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat dinventarisasi sebagai berikut:

- a. Masih sulit sekali memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya yang selama ini digunakan. Definisi kreatif sendiri masih sulit dipahami oleh seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada perhitungan spesifik terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan penganggaran yang belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif.

- b. Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung iklim kreatif (perijinan, investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta)
- c. Kondisi pengembangan industri kreatif sangat butuh komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/kota belum. Belum dirasakan adanya sinkronisasi program kreatif dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
- d. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih belum merata dan perlu ditingkatkan.
- e. Masalah permodalan di para pelaku usaha
- f. Tingkat kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran bagi ekonomi kreatif Jawa Barat masih perlu ditingkatkan
- g. Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat masih kurang, salah satu dampaknya belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi

Saran

Berdasarkan simpulan yang disampaikan sebelumnya, diajukan saran sebagai berikut: *pertama*, perlu penekanan dari Kemendagri terhadap pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota agar lebih berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Bentuk penekanan dapat berupa kebijakan/ aturan yang langsung berkaitan dengan ekonomi kreatif di Kabupaten/ Kota. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan teknis terkait pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya. khususnya terkait fasilitasi dalam hal pemasaran, badan hukum, merk dagang, dan pembiayaan.

Kedua, kebijakan/ pembinaan dalam pengembangan usaha kreatif bisa dalam bentuk:

- a. Pemasaran/ kerjasama dalam melakukan pameran
- b. Mempermudah akses pelaku usaha kreatif kepada perbankan untuk memberikan bantuan keuangan bagi pelaku usaha
- c. Memberi kemudahan dalam perlindungan HAKI bagi setiap hasil kreatif (Indonesia harus mampu membangun landasan HKI yang bersifat ketimuran yang kuat, karena HKI di dunia timur banyak berupa nilai-nilai kearifan budaya lokal yang bersifat kebersamaan (*togetherness*) dan berbagi (*Sharing*).
- d. Mengingat bahan baku yang digunakan diperoleh baik dari luar kabupaten/ kota di lingkungan Jawa Barat, perlu adanya peningkatan kerjasama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/ Kota, dengan provinsi lainnya untuk
- e. menjaga dan meningkatkan keberlanjutan bahan baku yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda, (2011), Strategi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Barat, Bandung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka (1996), Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Kedua, Cet. Ketujuh.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2011), Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peluang Usaha Inovatif, Bandung
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Florida, Richard (2002), The Rise Of The Creative Class, New York, dalam Kemendag (2008).
- Irfan, Islamy (1992), Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Keenam.
- Kementeriaan Perdagangan R.I, (2008), Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.
- , (2010), Laporan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Lembaran Administrasi Negara (LAN RI), (1991), Sistem Administrasi Negara, Jakarta: Yayasan Penerbit Administrasi, terbitan kelima.
- Pink L Daniel, (2005), The Whole New Mind, dalam Kemendag 2008.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1989), Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif RD, Bandung: Alfabitan, Cet. Kelima.
- Simatupang, Tobing M, (2007), Cetak Biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat, Presentasi Seminar Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat, Bandung

PNPM MANDIRI VS KEMISKINAN DI INDONESIA

PNPM MANDIRI VS POVERTY IN INDONESIA

Moh. Ilham A. Hamudy

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat

e-mail: i_hamudy@yahoo.com

Diterima: 15 Agustus 2013; direvisi: 27 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Artikel ini adalah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Artikel ini berusaha mendedahkan PNPM secara makro, seraya menjabarkan beberapa kekurangannya yang kerap menjadi sasaran kritik para pemerhati pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri, oleh pemerintah dianggap sebagai program jitu guna mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tetapi, sayangnya, meski sudah banyak sekali uang digelontorkan untuk mensukseskan program itu, angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karenanya, PNPM Mandiri perlu ditinjau ulang keberadaannya, baik secara konsep maupun secara implementatif. Artikel ini menawarkan konsep dan pendekatan pemberdayaan dan pengentasan rakyat miskin dengan mengedepankan konsep penghidupan berkelanjutan yang lebih komprehensif.

Kata kunci: PNPM Mandiri, Program Pengentasan Rakyat Miskin, dan Penghidupan Berkelanjutan

Abstract

This article is about the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This article try to exert PNPM macro, as outlines some drawbacks that are often the target of criticism of the observer community empowerment. PNPM Mandiri, the government considered the surefire program to alleviate poverty from the pool. But, unfortunately, though it was a lot of money disbursed to the success of the program, the poverty rate in Indonesia has not experienced significant declines. Therefore, PNPM Mandiri existence should be reviewed, both in concept and in implementation. This article offers the concept and approach to empowerment and poverty of the poor by promoting the concept of sustainable livelihoods is more comprehensive.

Keywords: PNPM Mandiri, Poverty, Poverty Alleviation Programs, and Sustainable Livelihoods

INTRODUCTION

Since Indonesian independence day has been announced in 1945, poverty has always been a major agenda for development in Indonesia. Governments take various efforts to eradicate poverty. Unfortunately, although the number of poor people has decreased (below 890,000 people over a span from March 2011-March 2012), they are still relatively high, nearly 30 million people.

Central Statistics Agency (BPS) reported that the number of poor or under the poverty line in Indonesia in March 2011 amounted to 30.02 million in March 2012 and to 29.13 million people. That is, the number of poor people fell 0.89 million people, details, during March 2011-2012, the urban poor is reduced 399,500 people (from 11.05 million in March 2011 to 10.65 million in March 2012) and in rural areas reduced by 487 000 people (from 18.97 million to 18.48 million).

The number of poor people in Indonesia, has been blamed as a result of an unbalanced development between urban and rural. BPS data showed, as of March 2011, the Poverty Gap Index

(P1) and poverty severity index (P2) in rural areas are higher than in urban areas.

In March 2011, the index of urban P1 is only 1.51, mean while the rural areas reach 2.96. Significantly the P2 urban and rural reaches of 0.35 0.72. In other words, the poverty rate in rural areas is worse than in urban areas. Not wrong if the slogan "tuna kapital" attached to the village. The reason is almost 60 percent of the population live in rural areas and 75 percent of them are potential being workers.

DISCUSSION

Efforts to Eradicate Poverty

Furthermore, various efforts have been taken by the government to reduce the poverty. For example, the government launched the Integrated Rural Development Program (Pembangunan Desa Terpadu). In 1970s, East Nusa Tenggara (NTT) was chosen as a project leader directed to answer underdevelopment, poverty, and ignorance in the region.

Nevertheless, the program was not very successful, because according to use a centralized and technocratic approach, rural development

funding fragmented in each ministry and agency (Djoroemana et.al, 2006). In addition, the program requires a considerable investment to accelerate program improvement, especially in infrastructure development (Jamal, 2008).

In the era of '90s to 2000s, various poverty eradication program re-launched. The programs such as Inpres Desa Tertinggal (IDT), the provision of direct cash assistance (BLT), rice for the poor (Raskin), Kecamatan Development Program, the Urban Poverty Program (P2KP), and other programs continued. However, poverty still exist in the country.

Experts say poverty, various poverty alleviation programs of the community because it was less successful than efforts tend to focus on social aid. Such efforts actually difficult to solve the problems of poverty, because nature does not help to empowerment. In fact, such programs in turn create dependency for the community. In fact, in the distribution of aid can also cause corruption.

Therefore, in 2007, the government, through the assistance of the World Bank loan, ask other programs that were considered more accurate to decrease the poverty. The program was named the PNPM Mandiri (National Program for Community Empowerment). PNPM Mandiri is a program of poverty reduction through community empowerment.

The main objective is to reduce poverty PNPM Mandiri in Indonesia with a community planning process that produces jobs and invest in small-scale infrastructure projects to improve rural and urban development.

Since it was first proclaimed by President Susilo Bambang Yudhoyono, PNPM Mandiri has reached more than 6,000 districts and 70,000 villages in 33 provinces. Contribution from the World Bank in the form of foreign loans specifically PNPM Mandiri Perdesaan untill 2011 reach USD 2,830.1 million or approximately Rp 25.5 trillion.

Even though the numbers are small relative to 2012 revised budget of Rp 1343 trillion, coverage program aimed at almost every village and town, making the PNPM Mandiri as one of the greatest poverty reduction programs in Indonesia.

Principal Program of PNPM Mandiri

Within five years, the PNPM Mandiri has done five main programs. First, the PNPM Mandiri Perdesaan, the community empowerment program in order to accelerate poverty reduction and expansion of employment opportunities in rural areas.

The program has carried out further encourage efforts to improve the quality of life, well-being and independence of people in rural areas. PNPM Mandiri Perdesaan has become an integral part of the PNPM Mandiri and has done since 1998 through Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Second, PNPM Mandiri Perkotaan, a program to reduce poverty and accelerate the expansion of employment opportunities in urban areas. The program has carried out further encourage efforts to improve the quality of life, well-being and independence of people in urban areas.

PNPM Mandiri Perkotaan is an integral part of the PNPM Mandiri. It has done since 1999 as the Urban Poverty Program (P2KP) in order to build community self-government and local governments to reduce poverty in a sustainable manner.

Third, PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, namely empowerment mechanisms used to improve the welfare of rural communities through improved access of the poor to basic rural infrastructure services.

Fourth, PNPM Mandiri DTK (Daerah Tertinggal dan Khusus), a program of empowerment that comes from P2DTK Program (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus), which aims to help local governments accelerate the socio-economic recovery and growth in lagging regions and special. The program is given to disadvantaged areas and those with social conflict and natural disasters.

Last, PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), a program of community empowerment centers to integrate economic growth with the surrounding area.

Community Empowerment

In implementing the five main programs, the PNPM Mandiri program emphasizing community empowerment. Community empowerment in question is an effort to increase the capacity of the community, both individually and collectively, in order to solve problems to improve the quality of life, self-reliance and sustainable prosperity.

Diverse forms of empowerment. First, the development community. This community development component includes a series of activities to build critical awareness and independence of people consisting of mapping potential, problems and needs of the community, participatory planning, organizing, resource utilization, monitoring, and maintenance of the results that have been achieved.

As a supporter, provided funds community learning activities, volunteer development and community assistance operations, and facilitators, capacity building, mediation and advocacy. The role of the facilitator, especially at the beginning of empowerment, while community volunteers are the main driving force of the community in the region.

Second, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM is a self-supporting fund stimulant given to community groups to fund some of the activities planned by the community in order to improve welfare, especially the poor.

Third, governance and capacity building of local actors. Its components are a series of capacity building activities of local government and local actors/other concerned groups in order to create favorable conditions and synergies for people, especially the poor. Core activities can include seminars, training, workshops, field visits were conducted selectively, and so on.

Fourth, management and development assistance programs. Forms of empowerment through the provision of management activities such as management consultants, quality control, evaluation, and program development

In implementing the four empowerment program, conducted entirely by purely self-managed society based on the principles of autonomy and facilitated by the government, assisted by a facilitator or consultant. Carried out after the implementation phase of the planning process has been completed and a decision is made about the allocation of funding activities.

Implementation activities include the selection and determination of the management team activities, disbursement or application of funds, manpower deployment, procurement of goods/services, and the implementation of the proposed activities. Personnel management team selected activities and established by the people, responsible for the realization of the physical, financial, and administrative activities/work carried out as planned.

When conducting a self-managed, when needed goods/services in the form of materials, tools, and experts (consultants) individuals who can not provide or can't be done alone by the public, the relevant technical department can help the community to meet these needs.

Critics on the PNPM Mandiri

Although considered accurate, and thus continued until 2014, PNPM Mandiri is criticized, both by the general public, NGOs, as well as observers of poverty in the country. First, the PNPM Mandiri budget allocated for the construction of more physical than social programs. Approximately 70 percent of the budget it dominates the overall physical program PNPM program. Unfortunately, today there are no reports of PNPM Mandiri contribution to reducing poverty in Indonesia.

This is consistent with research by NGOs like GAPRI, IRE, NTB Conception, INFID and FIK presented in a seminar held earlier in July 2012. According to them PNPM Mandiri has not responded to the problem of poverty. Although one of the main principles of PNPM Mandiri is human development but the findings showed minimal aspects of community do PNPM Mandiri compared to physical development that seems massive.

Second, BLM, one of which poured in savings and credit program for women (SPP), claimed to

have women alleviate poverty through the provision of revolving funds, the fact that credit is given to people who already have a business, not a really poor (compare to Kabir M.S et.al. 2012). Worse yet, the credit is only an indicator of success rather than the return on savings and loan business success.

Third, the approach adopted by the PNPM Mandiri Bank through the concept of Community Driven Development (CDD) or community-based development program was allegedly internalization Neo-Liberal approach through community.

Responses Tania Murray Li of the University of Toronto in early July 2012 at a seminar stressed PNPM Mandiri (Tifa and Infid, 2012) emphasizes competition in the filing system proposal, using procurement tenders. According to Tania, the basic nature of the market that free competition was introduced at the level of the bottom of the village.

PNPM Mandiri accused does not have a direct economic purpose, but want the social transformation in society so adaptive to the pro-market culture. In fact, in free competition as it is not all people have the knowledge and access to the same information. The system only provides benefits to people who have a good knowledge and close relationship with program facilitators.

CLOSING

Sustainable Livelihoods

Therefore, PNPM Mandiri should be promptly evaluated. PNPM Mandiri failed welfare of the poor in the village. There needs to be a new approach to eradicate poverty. According to Sutoro (2005) there is an alternative approach that can be offered. An alternative is the sustainable rural community livelihood approach (see too Yaro, 2006). Such an approach brings rural community livelihoods from a condition of susceptibility to sustainability by developing the assets and capabilities they possess and enabling them to be transformed, recognising the dynamics that exist.

Community livelihood is the capability for survival that is possessed by all, both materially and socially, that is realised through a variety of activities performed to fulfil the needs of life. A community livelihood approach looks at the complexity of individual and community assets and is concerned with the dynamics of transformation.

As one individual or group may respond more quickly than others, it is important to have a variety of activities based on individual character empowerment. The approach builds individual and group capacity to develop local potential so they are able to overcome their own problems and indeed use them as a means of achieving their goals (see Neely, et.al 2004). A sustainable livelihood approach transforms communities by building local capacity so that their living assets can be transformed by it.

The basic concept of sustainable livelihood development (Sutoro, 2005) is as follows:

- 1) People are the focus of all development activities (people-centred). All understanding, analysis, planning and change within the process comes from the people themselves.
- 2) A holistic approach begins with the community's understanding and priorities. All factors, be they hindrances or opportunities, should be understood within the context of the community's knowledge and ability, so that eventually communities can develop their own solutions.
- 3) Bearing in mind that life is dynamic, we can only ever get a temporary snapshot of any given situation; therefore, sustainable livelihood development needs to be aware of, and adjust to, change, making it important to develop participative monitoring and shared learning among community and other stakeholders.
- 4) This approach is more concerned with capacity building than needs analysis. Building on strengths means there is an acknowledgement of every individual's capability to develop themselves, and through strengthening social networks problems can be solved (either individually or collectively), obstacles can be overcome and the potential to achieve goals can be realised.
- 5) There is a link between the macro and the micro in the process of change and development. The approach endeavours to become a bridge in the gap between theory and practice and between macro policy and micro activity. It is essential that the individual and the community have an understanding as to what is happening in the macro context that is influencing their lives. Similarly, for those influencing the macro environment, such as policy makers, it is important that they understand issues and events at the community level.
- 6) This approach demonstrates the tangibility and sustainability of a given process working as part of a cycle. This cycle should be continuous and experience no upset that leads to its deterioration or collapse. The result should be a transformation from susceptibility to sustainable improvement.

REFERENCES

- Djoeroemana, et.al. 2006. *An overview of environmental, sociocultural, economic and political aspects of rural development in East Nusa Tenggara*. Proceedings of a workshop to identify sustainable rural livelihoods, held in Kupang, Indonesia, 5–7 April. ACIAR Proceedings No. 126
- Jamal, Erizal. 2008. *Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di*

- Indonesia*. In Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 26 No 2. December, page 92-102
- Kabir, M.S, et.al. 2012. Impact of Small Entrepreneurship on Sustainable Livelihood Assets of Rural Poor Women in Bangladesh. *International Journal of Economics and Finance*. Volume. 4, No. 3; March. Canadian Center of Science and Education: Canada
- Neely, Constance et.al. 2004. Do Sustainable Livelihoods Approaches Have a Positive Impact on the Rural Poor? *Livelihood Support Programme 16 Working Paper*. Food And Agriculture Organization Of The United Nations
- Sutoro, Eko. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. APMD Press: Yogyakarta
- Tifa and Infid. 2012. *PNPM Mandiri: Antara Retorika dan Realita*. Proceeding of national seminar, held in Jakarta, Indonesia, 4 July
- Yaro, Joseph Awetori. 2006. Is deagrarianisation real? A study of livelihood activities in rural northern Ghana. *Journal of Modern African Studies*, 44, 1, pp. 125–156. Cambridge University Press: UK

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI
DALAM BIROKRASI INDONESIA**
(Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia
Berdasarkan Perspektif Prinsip-Prinsip Administrasi)

***THE APPLICATION OF ADMINISTRATION PRINCIPLES IN
INDONESIA BUREAUCRACY***
(*A Critical Analysis toward Bureaucratic Reform in Indonesia
Based On the Administration Principles*)

**Kristian Widya Wicaksono
Hubertus Hasan Ismail**

Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung
e-mail: widya_wicaksono@yahoo.com

Diterima: 16 Juli 2013; direvisi: 23 Juli 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Reformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsip-prinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.

Kata kunci: hirarki; kesatuan komando; spesialisasi; rentang kendali; organisasi rasional; konsistensi.

Abstract

The implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.

Keywords: *hierarchy, unity of command, specialization, span of control, rational organization and consistency*

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi di Indonesia saat ini menemui hambatan karena praktek korupsi masih saja marak dilakukan oleh aparatur pemerintah. Padahal salah satu esensi reformasi birokrasi adalah menekan angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Kasus korupsi aparatur pemerintah yang cukup menarik perhatian publik diantaranya adalah kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Kedua aparat pemerintah yang bekerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini selama melaksanakan dinas telah melakukan penyimpangan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Selain kasus Gayus dan Dhana masih ada lagi kasus lain yaitu kasus Ajib, namun belum ditemukan bukti yang kuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ajib. Meskipun demikian, sejumlah kalangan menduga bahwa sesungguhnya masih terdapat sejumlah kasus-kasus lainnya yang melibatkan aparatur pemerintah pada instansi pemerintahan yang berbeda dan sangat mungkin kasus-kasus yang menguap tersebut telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang lebih besar. Problemnnya apakah kepedulian untuk melakukan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama atau justru sebaliknya kita malah semakin frustasi untuk membenahi birokrasi pemerintah?

Oleh karenanya, guna menghindari rasa frustrasi atas upaya-upaya sudah dilakukan maka program reformasi birokrasi di Indonesia saat ini perlu untuk mendapatkan lebih banyak masukan-masukan konstruktif. Masukan-masukan ini terutama pada aspek teknis strategis agar dalam pelaksanaannya dapat efektif untuk mengembalikan fungsionalitas organisasi pemerintah pada jalur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tulisan ini disusun untuk memberikan masukan terhadap pengimplementasian reformasi birokrasi di Indonesia terutama dalam hal mengurangi hambatan reformasi birokrasi yang diakibatkan oleh maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

PEMBAHASAN

Mengubah Paradigma Organisasi

Peletakan dasar pemahaman organisasi yang tepat akan membantu kita untuk membedah bagaimana menata sebuah organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitasnya guna pencapaian tujuan. Dalam tataran teoritik, tuntutan organisasi publik saat ini mengarah pada penciptaan organisasi yang berorientasi pada proses (Schelder dan Helmuth, 2009:182). Hal ini didorong atas kesadaran bahwa organisasi publik hendaknya lebih berfokus pada pengguna layanan yakni warganegara selaku pembayar pajak.

Oleh karenanya, penataan aktivitas organisasi dalam menghasilkan produk berupa pelayanan publik dan barang publik menjadi salah satu isu sentral. Bahkan dalam konsep *New Publik Management* (NPM) yang mutakhir bahwa orientasi organisasi bukan hanya pada kinerja hasil (*outcome*) saja melainkan juga bagaimana menciptakan kinerja proses dan hasil yang berkesinambungan. Sehingga perspektif kinerja diukur pada dua dimensi yakni (Dooren, Boukaert dan Halligan, 2010:3):

1. Kualitas tindakan dalam tata aktivitas organisasi; dan
2. Kualitas pencapaian hasil yang mampu dipenuhi organisasi.

Namun, pada prinsipnya perubahan paradigma organisasi cocok untuk dilaksanakan jika dasar-dasar konseptual organisasi sudah dijalankan oleh birokrasi di Indonesia. Jika kita merubah organisasi tanpa meletakkan prinsip dasar organisasi yang jelas maka perubahan tersebut belum tentu dapat berjalan sesuai harapan.

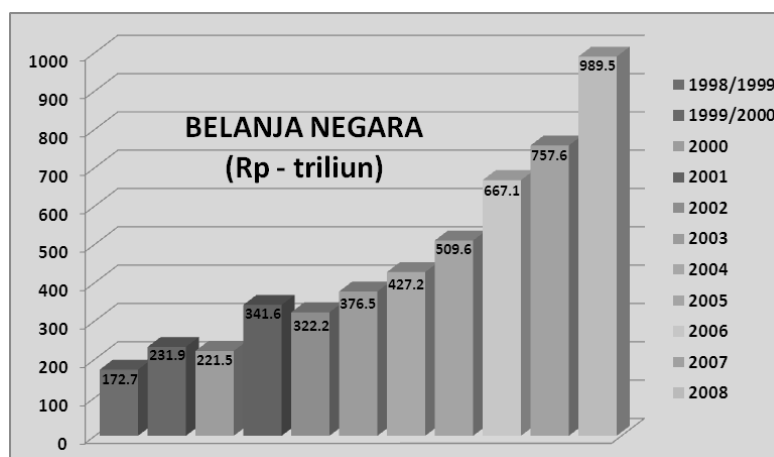
Tawaran utama yang menjadi gagasan dasar tulisan ini adalah merevitalisasi Birokrasi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang dikembangkan oleh Gulick & Urwick pada tahun 1937 melalui tulisannya yang berjudul *Papers on the Science Administration*. Gulick & Urwick (1937) menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi meliputi antara lain (1) Hirarki; (2) Kesatuan

komando; (3) Spesialisasi secara fungsional; (4) Rentang kendali; dan (5) Desain organisasi rasional.

Bila ditelaah lebih jauh prinsip-prinsip administrasi ini sangat sederhana namun dalam praktek birokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut masih belum berjalan secara efektif. Dasar pertimbangan mendesain sebuah organisasi birokrasi di Indonesia lebih banyak mereproduksi desain organisasi pada masa kolonial. Sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional seperti tujuan organisasi atau tujuan pelayanan masih kurang mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini dapat dilihat pada skema hirarki pemerintahan yang sangat rigid mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke tingkat Kelurahan/Desa bahkan RT/RW. Skema hirarki dengan tingkat rigiditas yang tinggi tersebut lebih bernuansa feodal dengan tujuan pengawasan dan pengendalian perilaku masyarakat bukan membangun nuansa birokrasi dalam negara demokrasi yang condong pada melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian juga fenomena protokoler pejabat publik yang terlalu berbelit-belit sehingga pejabat pemerintah seolah lebih nampak sebagai raja dibandingkan sebagai pelayan publik (*public servant*).

Selain itu, demokratisasi yang berlangsung di Indonesia semenjak tahun 2004 melalui pemilihan pemimpin pemerintahan secara langsung baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun pada level Pemerintah Daerah ternyata belum berhasil mendorong penciptaan desain organisasi yang rasional. Bahkan pasca seorang calon kepala pemerintahan memenangkan sebuah kompetisi pemilihan langsung malah muncul sinyalemen buruk yakni pengisian dan pengadaan jabatan dalam organisasi birokrasi lebih merupakan bagi-bagi jatah kekuasaan politik pada lingkungan internal organisasi pemerintah tanpa mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas jabatan tersebut dalam menunjang pengadaan barang publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya jabatan menteri yang berasal dari kalangan politisi yang kemudian harus didampingi oleh wakil menteri dari kalangan profesional. Jabatan wakil menteri ini semakin membuat organisasi pemerintah pusat nampak gemuk. Padahal kebijakan desentralisasi yang dijalankan semenjak tahun 2001 justru mengharapkan penguatan birokrasi berada pada level Kabupaten/Kota bukan pada pemerintah pusat.

Prinsip-prinsip administrasi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam produksi organisasi, sebab efisiensi organisasi akan membantu organisasi untuk menghemat sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya krusial yang memberikan tekanan pada organisasi agar lebih efisien adalah sumber daya finansial. Artinya, penerapan prinsip-prinsip administrasi dapat membantu Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk menghemat sumber daya yang mereka miliki, khususnya terkait dengan sumber daya keuangan. Apalagi kecenderungan



Gambar 1. Grafik Belanja Negara Indonesia Tahun 1998-2008.

untuk menghemat keuangan pemerintah masih sulit dilakukan. Hal ini dapat ditinjau dari Gambar 1 yang memperlihatkan bahwa belanja Negara Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Prinsip Hirarki

Prinsip hirarki melukiskan mengenai penataan yang tepat terhadap keterampilan pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai dan penempatan kewenangan dalam organisasi. Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Honorar dalam lingkungan organisasi pemerintah memiliki keterampilan yang beragam. Dalam pendekatan klasik dikemukakan bahwa penempatan personil organisasi hendaknya memperhatikan aspek keterampilan pegawai tersebut.

Oleh karenanya, pihak yang bertanggung jawab terhadap penilaian kinerja pegawai seperti Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Daerah hendaknya melakukan penelaahan terhadap tingkat keterampilan pegawai yang dimilikinya. Proses ini dimulai dari pemilihan pegawai (seleksi) kemudian pelatihan dan penempatan pegawai.

Penataan rangkaian proses kepegawaian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan standar kriteria kepegawaian yang jelas. Hal terpenting dari proses standarisasi ini adalah ditetapkan dalam bentuk aturan formal yang pelaksanaannya dipatuhi dan dikontrol secara intensif oleh atasan organisasi guna menghindari penyelewengan.

Guna memperkuat kontrol agar aturan standarisasi dapat dipatuhi maka hirarki organisasi disusun dalam penataan struktur atasan dan bawahan yang jelas disertai dengan rantai komando yang tegas. Pendekatan klasik mensyaratkan agar rentang kendali organisasi juga diperkecil sehingga kontrol terhadap aturan berjalan secara efektif (Vasu, Stewart dan Garson, 1998).

Prinsip Kesatuan Komando

Prinsip kesatuan komando merupakan penekanan terhadap pentingnya mengefektifkan

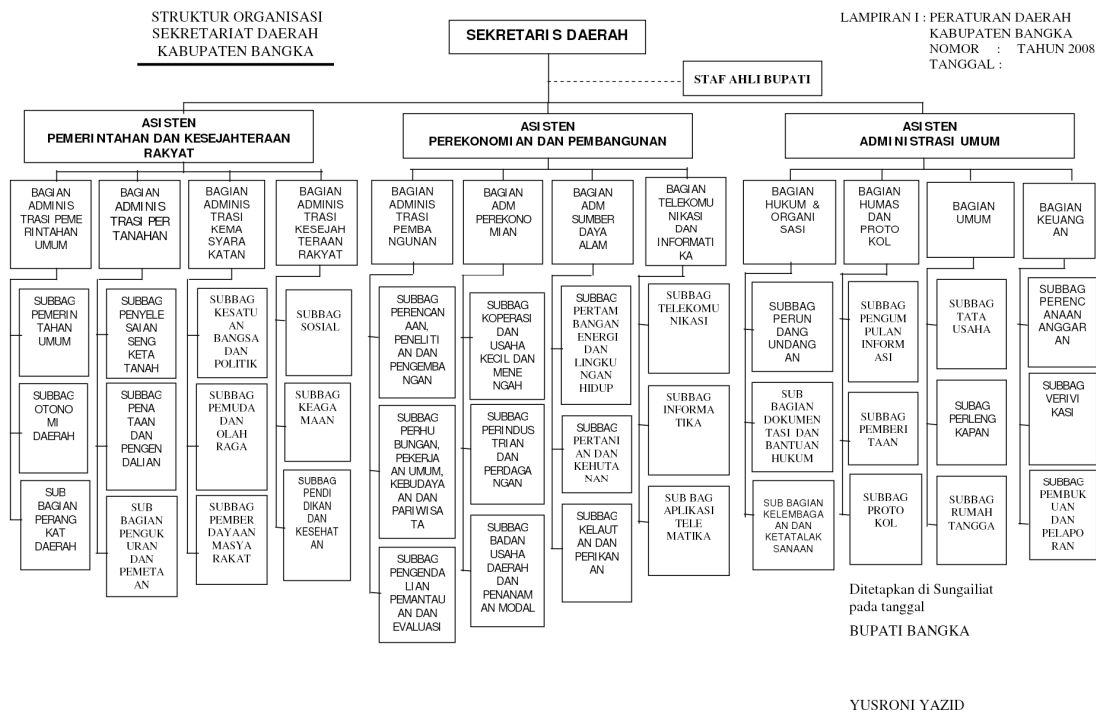
komunikasi dan mereduksi distorsi instruksi yang disampaikan atasan kepada bawahannya. Sehingga sebaiknya pada setiap level organisasi hanya ada satu pejabat yang menyampaikan perintah kepada bawahan. Sebab jika seorang pegawai melayani lebih dari satu atasan maka pegawai tersebut akan kebingungan sehingga tidak efisien dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Salah satu penyebab sulitnya pemerintah untuk mencapai kinerja yang optimal adalah lemahnya konsistensi implementasi kebijakan. Dalam tulisan Ripley dan Franklin (1982) dijelaskan kegagalan implementasi kebijakan salah satunya terletak pada proses komunikasi yang tidak efektif dalam organisasi pemerintah. Oleh karenanya, prinsip kesatuan komando akan meningkatkan efektivitas proses komunikasi dalam organisasi.

Prinsip Spesialisasi Fungsional

Pekerjaan utama pemerintah adalah menyediakan pelayanan publik dan barang publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pekerjaan besar ini tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang cukup besar. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembagian kerja dalam organisasi pemerintah berdasarkan jenis kerja yang spesifik. Dalam konteks organisasi pemerintah yang melakukan pembagian kerja tersebut adalah Badan Perencanaan Nasional atau Badan Perencanaan Daerah. Kedua lembaga pada level pemerintahan yang berbeda tersebut diharapkan dapat menelaah dan menderivasi pekerjaan utama pemerintah menjadi jenis-jenis kerja yang spesifik.

Dalam konteks desentralisasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini maka volume pekerjaan pemerintah pusat pada dasarnya tidaklah terlalu besar. Sebab sebagian besar kewenangan telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga tata lembaga pemerintah pusat seharusnya jauh lebih sederhana dan lebih ramping dibandingkan pemerintah daerah.



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.

Pada level pemerintah daerah khususnya tingkat Kabupaten/Kota maka dapat ditinjau secara mendalam oleh Badan Perencana Daerah setempat terkait dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, kemudian kebutuhan barang publik dan jenis pelayanan publik yang perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Guna memperkuat pelaksanaan desentralisasi secara kongkret, maka kewenangan pajak daerah khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota hendaknya disesuaikan dengan potensi pajak yang dimiliki daerah setempat agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berlangsung dengan baik.

Prinsip Rentang Kendali

Hampir senada dengan prinsip kesatuan komando, prinsip rentang kendali menekankan bahwa sebaiknya seorang atasan memiliki jumlah bawahan yang tidak terlalu banyak sehingga kontrol terhadap bawahan dapat berjalan efektif.

Prinsip-prinsip manajemen yang ditawarkan Gulick & Urwick pada prinsipnya menawarkan organisasi yang jenjang hirarkisnya tidak terlalu panjang, sehingga rentang kendali menjadi sempit dan lebih mudah untuk mengendalikan berjalannya aktivitas organisasi. Struktur organisasi pemerintah di Indonesia cenderung gemuk. Hal ini dapat ditinjau pada Gambar 2 yang hanya mengilustrasikan struktur salah satu lembaga dari sekian banyak lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bila ditinjau secara cermat, maka Sekretaris Daerah dalam struktur lembaga tersebut memiliki

rentang kendali yang cukup luas sehingga pengendalian sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Struktur yang seperti ini tentunya perlu untuk ditelaah dan disederhanakan. Pembentukan jabatan dalam sebuah lembaga pemerintah seharusnya didasarkan pada kebutuhan untuk mengefisienkan proses produksi pelayanan publik dan barang publik bukan untuk membagi-bagikan kekuasaan kepada sejumlah pihak atas pertimbangan politis.

Salah satu yang dikhawatirkan dari Pemilihan Kepala Pemerintahan secara langsung adalah bagi-bagi kue kekuasaan diantara suksesor Kepala Pemerintahan yang telah terpilih. Guna memuluskan hal tersebut, maka sejumlah jabatan diciptakan dalam organisasi pemerintah padahal jabatan tersebut tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap proses produksi pelayanan publik dan barang publik. Dalam konteks berbeda juga bisa dilakukan kebalikannya yaitu menempatkan sejumlah wakil dari pos-pos pemimpin lembaga seperti menteri untuk mendampingi pimpinan lembaga tersebut. Hal ini adalah cerminan bahwa menteri yang dipilih adalah didasarkan pertimbangan politis sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengelola lembaga yang dipimpinnya. Alhasil struktur yang gemuk menjadi konsekuensi, padahal saat ini urusan-urusan pokok pemerintahan lebih banyak berada pada level Pemerintah Daerah.

Maka dari itu, pelaksanaan prinsip rentang kendali organisasi yang konsisten dapat menekan gejala-gejala yang muncul dari sisi pertimbangan politis terutama keinginan-keinginan untuk

membangun struktur baru yang menambah lamban gerak organisasi.

Prinsip Desain Organisasi Rasional

Prinsip desain organisasi rasional merupakan cara yang ditempuh dalam menyusun organisasi, yakni berdasarkan pada pertimbangan rasional seperti tujuan, klien yang dilayani, tempat, proses dan tujuan pelayanan. Organisasi yang didesain berdasarkan tujuan misalnya Pengadilan untuk melaksanakan sidang-sidang terkait dengan perkara kriminal. Sedangkan organisasi yang didesain berdasarkan klien yang dilayani misalnya Klinik Pemulihan Ketergantungan Narkoba pada rumah sakit milik pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk melayani pasien ketergantungan narkoba.

Kemudian organisasi yang dibentuk berdasarkan kedudukan atau tempat, contohnya adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya organisasi yang dibentuk berdasarkan proses, seperti misalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang dapat difungsikan untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening pejabat publik. Dan terakhir adalah organisasi yang didesain berdasarkan tujuan pelayanan misalnya Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah.

Selain memperhatikan aspek desain yang didasarkan pada aspek rasionalitas, desain struktur organisasi juga perlu untuk mendapatkan perhatian khusus. Terutama hal ini berhubungan dengan aspek maksimalisasi prefektif proses komunikasi yang efektif sehingga instruksi-instruksi yang disampaikan oleh pemimpin organisasi dapat dijalankan oleh bawahan secara akurat. Hirarki organisasi hendaknya tidak terlalu panjang sehingga instruksi organisasi dapat disampaikan tanpa harus melalui proses komunikasi yang panjang. Guna menciptakan struktur yang ramping maka pengayaan pekerjaan dapat dilakukan khususnya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang dapat dikoordinasikan secara simultan. Artinya spesialisasi fungsional yang menjadi salah satu prinsip administrasi dijalankan dengan memperhatikan tingkat kesejenisan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai sehingga struktur organisasi tidak perlu terlalu berjenjang panjang.

PENUTUP

Prinsip-prinsip administrasi merupakan sebuah pendekatan lama yang nampaknya perlu untuk kembali dipertimbangkan secara seksama oleh Pemerintah Indonesia terutama dalam hal ini Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebab terkadang desain reformasi birokrasi yang disusun ternyata tidak menjawab kebutuhan perubahan yang diinginkan karena dasar-dasar keorganisasian ternyata tidak

pernah dibentuk secara utuh dan menyeluruh dalam Birokrasi Indonesia.

Oleh karenanya, revitalisasi dasar-dasar keorganisasian yang mengikuti prinsip-prinsip administrasi dapat dijalankan oleh kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sehingga perubahan-perubahan yang akan dijalankan kedepannya dapat dipetakan secara jelas dengan memperhatikan kebutuhan perubahan yang nyata dan tidak mengada-ada.

Sebagai penutup dan bahan perenungan bersama rasanya perlu untuk disampaikan bahwa terkadang mekanisme organisasi yang lama ternyata bisa berjalan dengan baik manakala pelaksanaannya benar-benar konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Dooren, V.W., G. Bouckaert dan J. Halligan. 2010. *Performance Management In The Publik Sector*. London and New York: Routledge.
- Gulick, L. dan L. Urwick, eds. 1937. *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Publik Administration, Columbia University.
- Ripley, R. dan G. Franklin. 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy*. New York: The Dorsey Press.
- Schelder dan Helmuth, eds. 2009 *Publik Management and Governance*. London and New York: Routledge.
- Vasu, M. L., D.W. Stewart dan G.D. Garson. 1998 *Organizational Behavior and Publik Management*. New York: Marcel Dekker, Inc.

PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

MAPPING CONFLICT AREAS PRONE IN LAMPUNG PROVINCE

Leydi Silvana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jlana Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta Pusat

e-mail: leydisilvana@yahoo.co.id

Diterima: 11 Agustus 2013; direvisi: 31 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan salah satu lokasi penelitian. Dari hasil penelitian kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah didalam menangani konflik yang terjadi adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik.

Kata kunci: konflik, rawan, toleransi.

Abstract

The purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to resolve the conflict (weaknesses and strengths) and formulate a strategy that needs to be done to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to illustrate, elaborate, answer and describe the portrait mapping conflict prone areas in Indonesia. From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property, public facilities and restore the physical facilities and the community is an important thing to do in dealing with conflict.

Keywords: conflict, troubled, tolerant.

PENDAHULUAN

Seiring dengan bergulirnya reformasi telah mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang sosial-politik. Reformasi juga memunculkan nilai-nilai keperintahan yang baik (*good governance*) seperti demokrasi dan transparansi, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian perkembangan reformasi di Indonesia telah membawa dampak yang sungguh luar biasa.

Angin segar perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang pada awalnya begitu kencang ditiupkan, ternyata juga memiliki sisi lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Munculnya berbagai tindak kekerasan

dan konflik antar elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia merupakan indikasi yang kuat untuk membuktikan sinyalemen tadi. Semua itu disebabkan adanya ketidakpuasan daerah atas berbagai ketimpangan hubungan, karena tidak diakui dan tidak dihargainya keanekaragaman yang ditabukan seperti : Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam tatanan sosial. Dalam era Reformasi ini, Indonesia harus mampu mengelola keanekaragaman tersebut dengan bijaksana, agar tercipta hubungan antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda. Penciptaan hubungan sosial yang harmonis dapat tercapai melalui komunikasi yang tulus yang dilandasi oleh pengakuan dan saling penghargaan atas perbedaan-perbedaan yang ada

demikian tercapainya kehidupan sosial yang lebih demokratis.

Akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial dan upaya setengah hati untuk membentuk kehendak bersama (*common will*), maka sebagai suatu bangsa kita terpuruk pada persoalan konflik yang berkepanjangan dan menelan ribuan korban nyawa dan harta benda. Belum lagi apabila kita memikirkan akibat psikologis pada anak-anak yang berada dalam situasi konflik berkepanjangan tersebut.

Masalah konflik bukan hanya masalah emosi sesaat, walaupun bisa terjadi di mana saja serta kapan saja. Sebuah relasi antar manusia apapun bentuknya mempersyaratkan perlunya memahami diri sendiri dan orang-orang lain secara akurat. Dalam kondisi komunikasi antar budaya yang tidak kondusif tersebut, konflik sangat rentan dan terbukti banyak terjadi.

Masyarakat pada saat ini menjadi semakin terbiasa melakukan dan menghadapi berbagai peristiwa konflik dalam kehidupan sehari-harinya, baik yang terjadi dalam lingkup nasional maupun lingkup kedaerahan. Hal ini akhirnya tidak terhindarkan telah mewarnai pola perilaku sosial dalam hubungan interaksi antar warga masyarakat, antar lembaga kemasyarakatan, bahkan antar pemerintah daerah. Perilaku konflik sosial tersebut, dalam sejumlah kasus berlangsung secara tidak terkendali dan mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku. Bahkan adakalanya menjurus pada penciptaan situasi kerusuhan yang anarkis dan melebar pada persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan sumber timbulnya persoalan.

Merebaknya perilaku konflik dan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan cenderung semakin tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan krisis yang pada gilirannya berdampak pada tersendatnya keberlangsungan pembangunan, berkembangnya aksi main hakim sendiri dan berkembangnya aksi kriminalitas, maraknya aksi berdemonstrasi, semakin menggejalanya euphoria semangat kedaerahan dan ego sektoral yang dimaknai secara sempit, serta terjadinya konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah, bahkan konflik antar pemerintah daerah yang pada masa lalu sangat jarang terjadi, saat ini dianggap suatu hal yang biasa.

Dari sejumlah kasus konflik yang pernah terjadi tersebut, tidak sedikit yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka serta kerugian material dan immaterial yang begitu besar. Menyikapi terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku tersebut, baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, antar warga masyarakat, maka Pemerintah bersama-sama dengan aparat keamanan telah berupaya menanganinya. Dengan berbagai macam cara, sejumlah kasus konflik maupun dampak sosialnya telah berhasil diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian. Persoalan mengenai munculnya dan yang berkaitan

dengan penanganan kasus konflik tersebut, kadangkala menjadi semakin kompleks ketika menjadi meluas ke persoalan atau ke daerah lain atau dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Tidak mudahnya proses penyelesaian kasus konflik tersebut, selain merupakan konsekuensi dari kurangnya realisasi dukungan dana dari Pemerintah serta perangkat hukum yang memadai. Hal ini juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah yang terkoordinasi di antara para penyelenggara negara, aparat pemerintah, aparat keamanan, dan antar daerah maupun belum kuatnya ketahanan sosial dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus konflik tersebut.

Oleh karena itu, guna memberikan kemudahan dan mempercepat upaya penanganan berbagai kasus konflik yang terjadi di sejumlah daerah secara terpadu dan terkoordinasi, maka diperlukan kajian untuk melakukan pemetaan rawan konflik di beberapa daerah dan mencari solusi kebijakan dalam penanganan konflik yang terjadi di daerah. Kajian ini pada hakekatnya bertujuan untuk mengetahui karakteristik konflik, mengetahui penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) dan merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dirancang untuk dapat menggambarkan, menguraikan, menjawab dan menjabarkan potret pemetaan daerah rawan konflik di Indonesia. Dengan demikian Kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk dapat menggambarkan fenomena konflik yang terjadi pada lokus kajian yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan kajian, teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan yang sebelumnya didahului dengan kajian kepustakaan (*library research*). Kegiatan lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menyiapkan pedoman wawancara dan tinjauan kepustakaan dilakukan melalui penelaahan literatur, dokumen, laporan dinas dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS)

No.	Kab./ Kota	Jenis Potensi Konflik						Jml
		Antar Umat Beragama/Suku/Etnis	Politik	Batas Wilayah	Industrial	Agraria/Lahan	Sosial/Antar Kelompok	
1.	Bandar Lampung	2	4	2	-	-	6	14
2.	Metro	-	-	2	-	-	5	7
3.	Lampung Selatan	-	-	1	-	9	12	22
4.	Pesawaran	-	-	2	-	3	1	6
5.	Tulang Bawang	-	1	2	1	2	1	7
6.	Tulang Bawang Barat	-	-	1	-	2	-	3
7.	Mesuji	-	-	1	2	3	-	6
8.	Lampung Utara	-	1	2	-	5	2	10
9.	Way kanan	-	-	2	-	4	-	6
10.	Lampung Timur	1	1	1	1	3	5	12
11.	Lampung Barat	-	-	1	-	3	1	5
12.	Tanggamus	3	1	3	-	2	1	10
13.	Pringsewu	5	-	1	-	1	2	9
14.	Lampung Tengah	1	-	2	-	2	8	13
	JUMLAH	12	8	23	4	39	44	130

Sumber: Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung

Lintang Selatan sampai 6°45” (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Pada tahun 2012, Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung melakukan pemetaan daerah rawan konflik di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, konflik di Provinsi Lampung, dapat dikelompokkan sebagaimana berikut:

1. Konflik antar agama/suku/etnis berjumlah 12 kasus yang terjadi di beberapa wilayah yaitu: Bandar Lampung (2), Lampung Timur (1), Tanggamus (3), Pringsewu (5), dan Lampung Tengah (1).
2. Konflik Politik berjumlah 4 kasus yang terjadi di beberapa wilayah yaitu: Bandar Lampung (1), Tulang Bawang (1), Lampung Utara (1), dan Tanggamus (1).
3. Konflik Batas Wilayah/Daerah berjumlah 20 kasus yang terjadi di semua wilayah.

4. Konflik Industrial berjumlah 4 kasus seperti di Tulang Bawang (1), Mesuji (2), dan Lampung Timur (1).
5. Konflik Agraria/Lahan berjumlah 39 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
6. Konflik Sosial/Antar Kelompok berjumlah 44 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya pengkategorian rawan konflik tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel 1: Data Potensi Konflik Provinsi Lampung Tahun 2013 dibawah. Sedangkan secara detail peta rawan konflik di masing-masing dari 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat dalam Tabel Rawan Konflik di masing-masing 14 Kab./Kota dalam tabel 1.

Karakteristik konflik di Provinsi Lampung dapat dilakukan pemetaan daerah rawan konflik di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota terdapat 130 kasus konflik dan dapat dikelompokkan kedalam jenis potensi konflik antar lain konflik antar umat agama/suku/etnis 12 kasus, Politik 8 kasus, Batas Wilayah 23 kasus, Industrial 4 kasus, Agraria/Lahan 39 kasus dan Sosial/Antar Kelompok 44 kasus. Dari data tersebut diatas kasus terbanyak adalah konflik sosial/antar kelompok sebanyak 44 kasus, namun kasus tersebut terpicu dari konflik Agraria, jadi domain kasus terbesar di Provinsi Lampung adalah masalah Agraria, dan sampai saat ini kasus masalah agraria masih dalam proses penyelesaiannya, mengingat persepsi pemerintah daerah bahwa

masalah agraria menjadi domain penyelesaian di pemerintah pusat.

Akar masalah penyebab konflik di Provinsi Lampung secara umum dapat disebabkan karena persoalan: Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Antar Umat Beragama, Suku Etnis, Masyarakat dengan Pelaku Usaha dan Distribusi Sumber Daya Alam yang tidak seimbang. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, terjadinya konflik disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
- b) Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok disebabkan perbedaan latar belakang budaya.
- c) Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan diantara individu atau kelompok.
- d) Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau system yang berlaku dalam masyarakat.

Konflik adalah suatu pernyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Jika konflik selalu ada, berarti konflik itu memang sebenarnya dibutuhkan. Manfaat konflik antara lain membuat masyarakat menyadari adanya banyak masalah, mendorong kearah perubahan yang dibutuhkan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis dan menimbulkan kesenangan (Tjosvold, 2000). Penyebab konflik antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya: dana, alat, orang
2. Sikap berbeda, ketidaksetujuan, komunikasi buruk, lemahnya teamwork (kepercayaan)
3. Struktur organisasi yang tidak cukup dan kurang jelasnya peran.
4. Sedangkan gejala-gejala konflik antara lain:
5. Ada sesuatu yang tidak beres: merasa gelisah, frustrasi, terhina, tersakiti hati, sedih, marah dan tidak setuju.
6. Tidak saling bicara
7. Sengaja merusak/menjatuhkan dan tidak kooperatif;
8. Berkontradiksi, berkata-kata tidak baik;
9. Debat, polemik, kelompok-kelompok;
10. Ancaman dan tindakan merusak.

Sumber-sumber konflik sosial dapat dikategorikan pada tiga kategori yakni:

Pertama, Perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi (*Access to Economic Resources and to Means of Production*)

Kedua, Perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (*Social & Cultural Borderline Expansions*)

Ketiga, Benturan kepentingan politik, ideology dan agama (*Conflict of Political, Ideology And Religious Interest.*)

Tidak mudahnya proses penyelesaian kasus konflik, selain merupakan konsekuensi dari

kurangnya realisasi dukungan dana dari Pemerintah serta perangkat hukum yang memadai, hal ini juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah yang terkoordinasi di antara para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan antar daerah maupun belum kuatnya ketahanan sosial dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus konflik tersebut.

Dilihat dari pandangan mengenai pihak yang berkonflik dan sumber awal konflik ada tiga pendekatan, yaitu : pendekatan makro, mikro dan pendekatan konvergensi (Abdel Salam, 2004). Pendekatan makro melihat sumber awal atau akar konflik berasal dari adanya persaingan antar kelompok dalam mengejar kekuasaan dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik antar kelompok pada tataran kesadaran. Pendekatan mikro atau *behavior* memandang sumber awal konflik dari adanya persaingan antar individu dalam pemenuhan kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar manusia yang agresif. Sementara pendekatan konvergensi, menjelaskan bahwa sumber konflik merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu dan kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya bersifat pribadi, namun karena setiap individu memiliki identitas kelompok tertentu dan ditambah dengan hal-hal tertentu maka menjadi konflik antar kelompok.

Teori konflik muncul sebagai reaksi munculnya teori struktural versus teori fungsional (Karl Marx) pada tahun 1950 dan 1960 an. Teori konflik banyak merebak diimplementasikan yang menyediakan alternatif terhadap pemecahan masalah sesuai teori struktural versus teori fungsional. Definisi konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Michael E. Brown, menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor di mana suatu daerah menjadi lebih rawan konflik dibandingkan daerah lain, yaitu : (1) faktor struktural, misalnya lemahnya Penguasa (Negara/ Pemerintah); (2) faktor politik, misalnya adanya diskriminasi atau pengutamaan kelompok politik tertentu; (3) faktor ekonomi sosial, misalnya adanya resesi, dampak sosial pembangunan dan modernisasi; dan (4) faktor kultural/ persepsi, misalnya adanya diskriminasi kultural/ pertentangan sejarah (Michael Brown, 2001).

Dalam perspektif ilmu sosial, konflik adalah sesuatu yang alamiah dalam kehidupan suatu masyarakat. Namun konflik menjadi persoalan ketika diekspresikan dengan tindakan kekerasan. Kekerasan dapat dilihat sebagai suatu manifestasi dari konflik yang tidak terlembagakan atau terinstitusionalisasikan. Sebaliknya konflik yang terlembagakan dapat dipecahkan secara damai (Tadjoeddin, 2013.). Menurut Sihbudi dan Nurhasim (2001), konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik

akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik memang tidak terhindarkan, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman (*threat*) bisa menjadi kesempatan. (*opportunity*) dan bahaya timbulnya konflik yang terbuka secara meluas bisa dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penang- gulangan secara dini (*early warning system model*). Deskriptif teoritik ini memberikan argumen tentang pentingnya penentuan paradigma di dalam mengkaji konflik sosial, terlebih bila kajian ini akan dijadikan landasan untuk sebuah kebijakan.

Jika dilihat dari dampaknya jenis konflik dapat dibagi ke dalam konflik yang konstruktif dan destruktif. Hal ini tergantung kepada pendekatan dalam melihat konflik. Ada dua pendekatan dalam melihat konflik, yaitu : pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik.

Pendekatan pertama menganggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian, tiap bagian saling terkait dan berfungsi, sehingga berkembang keseimbangan (Nasikun, 1995; Ritzer, 1985). Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan suatu sistem menentang fungsi-fungsi lainnya. Dilihat dari tujuan kepentingannya, konflik dapat dibagi ke dalam konflik (dalam budaya) individualistik dan kolektivistik (Ting Toomey dalam Gudykunst et.al, 1988: 278). Perbedaan keduanya dapat dilihat dari unsur penyebab konflik, hubungan isu dan pelaku, kondisi yang mengitari konflik, dan sikap pelaku. Konflik individualistik melihat penyebab konflik sebagai instrumen bukan ekspresif sehingga sering memisahkan isu dengan pelaku konflik. Sebaliknya konflik kolektivistik melihat penyebab konflik lebih sebagai ekspresif, tidak memisahkan antara isu dengan pelaku yang berkonflik, konflik muncul ketika norma kelompok dari pelaku dilanggar, cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya tidak langsung terhadap konflik, artinya anggota kelompok berkeinginan kuat membentuk kelompok yang harmonis dan cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung.

Ada kajian yang dilakukan oleh Willson dan Rylend yang dikutip oleh Samsu Aman (2006), mereka membahas strategi mengatasi konflik antara lain:

Elimination yaitu suatu sikap untuk mengundurkan diri dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik; Mengurangi domination untuk memberi kepuasan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik;

Minority Consent artinya kelompok mayoritas yang menang namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan; Kompromi artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik bias mencari jalan tengah; dan

Integrasi artinya pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan Dan

ditelaah kembali sampai kelompok mencapai keputusan yang memuaskan bagi semua pihak.

Salah satu kajian tetapi yang cukup komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Mark R. Amstutz yang melihat konflik sebagai suatu “continuum” yaitu di satu titik ekstrim terdapat kondisi dan situasi “tak ada masalah / perbedaan” sementara di titik ekstrim satunya terdapat kondisi dan situasi yang diwarnai “perbedaan/ ketidakcocokan”.Diantara kedua titik itu terdapat tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. *Tension* atau ketegangan
2. *Dissagreement* atau ketidaksetujuan / ketidaksepakatan
3. *Rivalry* atau persaingan
4. *Dispute* atau pertikaian
5. *Hostility* atau permusuhan
6. *Agretion* atau agresi
7. *Violence* ayau kekerasan
8. *Warfare* atau peperangan

Atau kalau hal itu dilihat sebagai pentahapan berjalannya suatu konflik, maka ada tahap diskusi dan jika masing – masing mau menang sendiri, maka proses berlanjut ke tahap polarisasi, dan perkembangan selanjutnya jika tidak ada lagi obyektifitas maka konflik memasuki tahap segregasi (saling menjauh, putus komunikasi), dan tahap paling berbahaya jika segregasi tidak bisa ditangani secara baik maka konflik memasuki tahap destruktif.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik antara lain :

1) Pencegahan dan Penanganan Konflik

Dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik, Pemprov Lampung telah melakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan konflik, diantaranya:

- a. Pencegahan Konflik. Dapat dilakukan dengan:
 - (1) Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat
 - mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.
 - (2) Meliharaan Kondisi Damai Dalam Masyarakat
 - Adanya sikap toleransi dan saling menghormati.
 - Hormati perbedaan suku, Bahasa, dan Adat Istiadat.
 - Mengakui Harkat dan Martabat.
 - Mengakui Persamaan derajat dan hak tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit.
 - Mengembangkan persatuan dan kebinekaan tunggal ikaan Indonesia.
 - Menghargai Pendapat dan kebebasan orang lain.
- b. Penanganan Konflik
 - (1) Menciptakan Kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera

- (2) Memelihara kondisi damai dan harmonis
- (3) Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi
- (4) Memelihara keberlangsungan pemerintah
- (5) Melindungi jiwa, harta benda, sarana umum
- (6) Memulihkan fisik sarana & masyarakat

2) Kewajiban Pemerintah Dalam Meredam Potensi Konflik

- a. Memperhatikan aspirasi masyarakat
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Melakukan program perdamaian
- d. Mengintensifkan dialog antar kelompok
- e. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
- f. Membangun karakter bangsa;
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan Kearifan local
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan masyarakat dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha.

3) Membangun Sistem Peringatan Dini

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik;
- b. Penyampaian data dan informasi secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan modal asing;
- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi konflik antara lain :

- 1) Mensosialisasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan Intruksi Menkopolhukam selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 05 dan 07 Maret 2013 di Ruang Rapat Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
- 2) Membentuk Tim Terpadu dan Menyusun Rencana Aksi Terpadu tingkat Provinsi Lampung berdasarkan kewenangan konflik tingkat Provinsi, dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 3) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Terpadu tingkat Kabupaten Kota serta langkah-langkah terpadu guna meredam dan penyelesaian konflik yang terjadi tingkat Kabupaten/Kota, dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- 4) Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan

Dalam Negeri, Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Aksi Terpadu Tingkat Nasional dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota sedang menyusun Rencana Aksi Terpadu Tingkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Tingkat Nasional.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung ditemukan akar masalah penyebab konflik antara lain karena persoalan: politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah dapat melakukan pencegahan dan penanganan konflik dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini, menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, dan sarana umum, serta memulihkan fisik dan sarana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangura, Yusuf, 1995. *The Search for Identity : Ethnicity, Religion and Political Violence*. UNRISD.
- Danim, Sudarwan, 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Gudykunst et.al., 1988. *Cultural and Interpersonal Communication*, Sage Publication
- Gurr, Robert, 1971. *Why Men Rebel*, Princeton : Princeton University Press
- Hamilton, Peter, 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*, Terj. Hartono. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Howard Ross, Marc, 1993. *The Culture of Conflict*, Yale University Press, New Haven And London.
- Miall, Hugh. et.al., 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama & Ras*, terj. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mitchell, Chris. 1981. *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London
- Moleong, Lexy J, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Sihbudi, Reza, dkk, 2000. *Memahami Gejolak Daerah-daerah Rawan Konflik di Indonesia*, Kerjasama Kantor Menristek dengan LIPI, Jakarta
- Simon Fisher, 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*, terj. Jakarta, SMK Grafika Desa Putra
- Suryadi, (2002) Shaw, Martin. 2001. *Bebas dari Militer*. Yogyakarta : Insist Press
- Stavenhagen, Rodolfo. 1966. *Ethnic Conflicts and the Nation-State*, Macmillan.
- Tjosvold, Dean. 1992. *The Conflict-Positive Organisation : Stimulate Diversity and Create Unity*, Addison Wesley
- Usman, Sunyoto, 1996. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Zubir, Zaiyardam, 2008. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerabatan*. Teks Buku Ajar, Hibah dari Dikti, Jakarta

**PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**ORGANIZATIONAL CAPACITY IMPROVEMENTS
RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

Imam Radianto Anwar Setia Putra dan Dida Suhada Iskandar
Peneliti Pada Pusat litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat.
e-mail: imamradianto@gmail.com

Diterima: 4 Agustus 2013; direvisi: 25 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang *core buisness* kelitbangannya membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarahkan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbangannya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya. Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi.

Kata kunci: peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan, organisasi.

Abstract

Research and Development Agency (BPP) whose core business is kelitbangannya need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agency. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affair indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agency used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization.

Keywords: capacity building, research and development, organizational.

PENDAHULUAN

Kementerian dalam negeri (Kemendagri) merupakan unit kerja yang membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, didukung dengan 13 komponen yang ada yang memiliki berbagai peranan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dari 13 komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis sifat organisasi yaitu utama dan pendukung, dan BPP masuk di dalam salah satu komponen pendukung di Kemendagri.

BPP merupakan sebuah organisasi yang menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas

manajemen dalam mengelola kegiatan kelitbangannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah. Dalam pasal Tugas pokok dan fungsi kemendagri serta tugas pokok dan fungsi BPP dijelaskan pada pasal 1 angka 10 "Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kemendagri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan

dalam negeri". BPP memiliki *core buesness* melakukan 6 kegiatan kelitbangan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi fokus bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

BPP merupakan komponen yang memiliki spesialisasi pekerjaan tertentu yaitu melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk itu dibutuhkan sumber daya yang dapat mengerakan organisasi agar dapat berjalan mencapai tujuannya. Oleh karena itu organisasi membutuhkan sumber daya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan BPP dalam pencapaian tujuan BPP Kemendagri. Sumber daya peneliti dari segi jumlah dan kemampuan dengan terlihat masih kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas, dengan melihat jumlah fungsional peneliti yang berjumlah 34 orang dari jumlah keseluruhan karyawan BPP yaitu sebanyak 155 orang. dapat diasusikan bahwa organinasi dorongan organisasi untuk merekrut peneliti baik dari dalam dan luar organisasi menjadi strategi berikutnya untuk meningkatkan jumlah peneliti.

Tidak kalah pentingnya dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPP permasalahan selanjutnya BPP Kemdagri adalah tidak ditentukannya bidang kepakaran peneliti yang harus dipilih dalam setiap pengangkatan jabatan peneliti terkait tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BPP sendiri dan kementerian dalam negeri, tuntutan spesialisasi pekerjaan tetapi tidak sejalan dengan bentuk dan tipe organisasi yang diterapkan hingga saat ini yang masih lebih kepada tipe/bentuk organisasi lini dan staf dimana organisasi lini dan staf ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional Hasibuan (2007)

Jumlah peneliti yang kurang dari 21,94 % dari jumlah seluruh total pegawai yang dimiliki berjumlah 155 pegawai membawa organisasi ini terindikasi bahwa

di BPP terjadi persaingan dalam penyelenggaraan tugas kelitbangan yang dilakukan oleh peneliti menjadi tidak begitu ketat dan tidak menarik sehingga menghasilkan output kelitbangan yang jauh dari harapan yang diinginkan oleh komponen di Kemendagri. Kurangnya persaingan yang terjadi di dalam menciptakan hasil kelitbangan diindikasikan dari minimnya pemahaman teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan manajemen penelitian yang terjadi di BPP Kemendagri.

Besarnya gap antara jumlah fungsional yang tersedia di BPP Kemendagri menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kapasitas kemampuan organisasi, selisih yang sedemikian besar tersebut menjadi permasalahan dalam usaha meningkatkan kapasitas BPP Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, tuntutan lain datang dalam pembinaan karir yang menjadi konsen dari suatu organisasi dalam menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang minimnya pembekalan pengetahuan yang sesuai dengan bidang kepakaran dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didapat dari hasil observasi awal dari beberapa peneliti yang ada di BPP. Jumlah struktural dan Peneliti yang tidak sebanding tersebut tidak diikuti dengan minimnya pengetahuan struktural tentang pola pelaksanaan kelitbangan dan manajemen penelitian menjadi kuarnng ilmiah, ditambah dengan tuntutan yang berbeda dimana disatu sisi harus memenuhi tanggung jawab pembiayaan dan sisi lainnya harus mempertahankan kadar keilmiah dan akademisnya. Ditambah dengan minimnya keikutsertaan para peneliti dalam forum-forum ilmiah internasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan baik yang diadakan di dalam dan di luar negeri.

Dari data di atas didapat bahwa jumlah struktural

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPP Kemendagri

No	Komposisi Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Peneliti	34	21,94
2	Non Peneliti	121	78,06
3	Jumlah Pegawai BPP	155	100

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.28-355 Tahun 2012. Data diolah 2013

Tabel 2. Komposisi Jenjang Jabatan Struktural BPP Kemendagri

No	Jenjang Struktural	Sekretariat	Pusat Litbang	Rangkap Jabatan
1	Eselon II	1	4	
2	Eselon III	4	12	2
3	Eselon IV	12	28	5
	Jumlah	17	34	7

Sumber: Berbagai sumber. Data diolah 2013

baik yang berada pada sekretariat sebanyak 17 orang yang mengisi jabatan struktural mulai dari eselon 2 (dua) dan 4 (empat) serta jumlah struktural yang mengisi kursi di Pusat Litbang berjumlah 34 orang juga mengisi jenjang jabatan struktural mulai dari eselon 2 (dua) hingga eselon 4 (empat) sedangkan struktural yang merangkap jabatan menjadi fungsional peneliti berjumlah 7 (tujuh) orang yang tersebar di sekretariat BPP dan setiap pusat litbang. Total keseluruhan jumlah struktural mulai dari eselon 2 hingga eselon 4 baik dari sekretariat dan di pusat Litbang berjumlah 51 orang sedangkan jumlah peneliti berdasarkan Kepmendagri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.28-355 Tahun 2012 Tentang Penempatan Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa Dilingkungan BPP Kemendagri berjumlah 34 orang beserta yang merangkap jabatan.

Dari permasalahan yang ditunangkan diatas maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu, bagaimana peningkatan kapasitas kemampuan organisasi badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri? Dengan demikian tujuan penelitian ini menitik beratkan kepada peningkatan kapasitas organisasi BPP Kementerian Dalam Negeri dengan menitik beratkan aspek pengembangan organisasi yang menjadi perhatian untuk menjawab permasalahan penelitian yang di angkat.

Peningkatan Kapasitas

Menurut Brown (2001) *Capacity building* adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi dan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi yang perlu memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan energi yang maksimal dengan runtutan proses yang matang. Dimensi dalam peningkatan pengembangan kapasitas organisasi menurut Keban, (2000) terdiri atas: 1) Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2) Penguatan organisasi; dan 3) Reformasi kelembagaan. Ada dimensi lain juga yang disampaikan oleh A. Fiszbein dalam (Keban, 2001) terdapat 3 dimensi, yaitu: 1) Kemampuan tenaga kerja; 2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan; dan 3) kemampuan "capital" yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumberdaya, sarana prasarana.

Pendapat lain yang menggambarkan pemahaman peningkatan kapasitas yang dirangkum oleh J.S. Edralin dalam (soeprapto, 2006). Misalnya, world Bank Memfokuskan peningkatan pemahaman kemampuan kepada; 1) pengembangan sumber daya manusia, khususnya training, rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis; 2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses,

sumberdaya dan gaya manajemen; dan 3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; 4) lingkungan organisasi yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan 5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja.

Beberapa teori diatas peningkatan kapasitas organisasi menitik beratkan kepada tiga aspek 1) sumberdaya manusia; 2) organisasi; dan 3) Dukungan sarana prasarana. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas organisasi. diantaranya pengembangan sumberdaya manusia menurut Sastradipoera (2002) pengembangan sumberdaya manusia mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum pemahaman lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Pendidikan menurut Suprihanto (2001) adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan teori pengambilan keputusan menghadapi persoalan-persoalan organisasi. tujuan dari pendidikan dan pelatihan menurut Fathoni (2006) antara lain:

1. meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat;
2. meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya;
3. melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas;
4. melatih dan meningkatkan kerja dalam merencanakan; dan
5. meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Menurut North (1990), kelernbagaan adalah aturan-aturan formal (formal rules) dan aturan informal (informal rules) beserta aturan-aturan penegakannya (enforcement rules). Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang (players) yang mempunyai tujuan dan motif yang sarna. Organisasi merupakan suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Wexlwy and Yulk dalam Kasim (1993). Pengertian dari pakar lainnya, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja Hasibuan (2004).

Handyaningrat (1995) ciri-ciri organisasi sebagai berikut: 1) adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenali; 2) adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lainnya saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan; 3) tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usaha/tenaganya; 4) adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan; dan 5) adanya suatu tujuan yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengarah pada peningkatan kapasitas organisasi BPP Kemendagri dengan Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenar-benarnya dalam memberikan penguatan organisasi BPP Kemendagri dimana menurut Djayasudarma (1993) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan fakta yang ada. Dengan menggambarkan 1) Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2) Penguatan organisasi; dan 3) Reformasi kelembagaan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Dalam Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memiliki 6 (enam) kegiatan utama antara lain: 1) penelitian; 2) Pengembangan; 3) pengkajian; 4) penerapan; 5) perekayasaan; dan 6) pengoperasian keenam kegiatan tersebut disebut kegiatan kelitbangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dipimpin oleh kepala badan dengan jenjang struktural eselon I. Sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2011 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi BPP Kemendagri memiliki tugas:

1. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah;
2. melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
3. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
4. membina BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau

- sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
5. memberikan fasilitasi BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 6. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.

Terdapat enam tugas yang dibebankan kepada BPP Kemendagri menjawab tantangan kebutuhan untuk dapat menyediakan regulasi dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang tergambar dalam kewenangan dan tanggung jawab BPP Kemendagri yang meliputi bidang 14 bidang yang tertera pada dalam pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 20 tahun 2011.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dibentuk organisasi kelitbangan dilingkungan Kemendagri yang terdiri dari 4 (empat) pusat penelitian yang mereplikasi struktur Kementerian Dalam Negeri dalam memenuhi tuntutan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Pengembangan Sumberdaya Peneliti

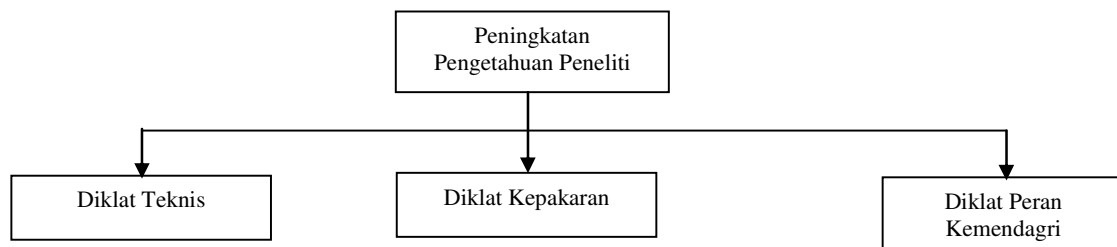
Sumber daya aparatur kelitbangan yang tersedia di BPP Kemendagri selain fungsional khusus yaitu peneliti dan perekayasa juga terdapat tenaga lainnya mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan ditambah dengan majelis pertimbangan kelitbangan dan tim pengendali mutu kelitbangan untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil kelitbangan. Peneliti, perekayasaan dan sumber daya manusia litbangan lainnya merupakan ujung tombak dalam setiap pelaksanaan aktivitas kelitbangan yang menjadi tugas sehari-hari.

BPP struktur organisasi berbasis fungsi, dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang lebih bersifat ilmiah dan akademi, dilihat dari pengertian kelitbangan pada pasal 1 ayat (7) Permendagri 20 tahun 2011 Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah. Pengertian kelitbangan menekankan pada kegiatan ilmiah untuk menemukan suatu cara baru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, dalam peningkatan kapasitas perlu betul dipahami secara

Tabel 3. Komposisi Peneliti Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Jabatan Peneliti	Jenis Kelamin		Jumlah Peneliti	Tingkat Pendidikan (org)		
		Laki-Laki	Perempuan		S1	S2	S3
1.	Peneliti Pertama (III/a)	5	1	6	6	0	0
2.	Peneliti Pertama (III/b)	2	1	3	0	2	1
3.	Peneliti Muda (III/c)	5	4	9	4	4	1
4.	Peneliti Muda (III/d)	2	0	2	1	1	0
5.	Peneliti Madya (IV/a)	5	2	7	3	3	1
6.	Peneliti Madya (IV/b)	0	1	1	0	1	0
7.	Peneliti Madya (IV/c)	5	0	5	3	1	1
8.	Peneliti Utama (IV/d)	1	0	1	0	1	0
9.	Peneliti Utama (IV/e)	0	0	0	0	0	0
	Total	25	9	34	17	13	4

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.28-355 Tahun 2012 Tentang Penempatan Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa Dilingkungan BPP Kemendagri



Gambar 1. Model Peningkatan SDM Kelitbangan dengan Diklat.

mendalam terkait dengan fokus pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Peningkatan kapasitas organisasi didukung dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat dasar latar belakang pengetahuan dan juga jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pejabat fungsional peneliti yang terdapat di BPP Kemendagri hingga tahun 2012. Pendidikan dan pelatihan mendorong terbentuknya profesionalitas dalam melakukan pekerjaan baik secara teknis maupun substansi terkait dengan penelitian.

Saat ini BPP Kemendagri memiliki kekuatan sumber daya peneliti dengan melihat jejang Jabatan peneliti untuk jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para peneliti dimana jenjang penelitian di bagi kedalam 4 jenjang penelitian, antara lain: 1) Peneliti Pertama; 2) peneliti muda; 3) peneliti madya dan 4) peneliti utama yang merupakan penggerak utama penyelenggaraan tugas kelitbangan.

Modal SDM yang dimiliki oleh BPP saat ini khususnya peneliti saat ini jumlah peneliti 34 orang dengan komposisi peneliti muda sebanyak 11 orang kelompok peneliti madya sebanyak 13 orang, peneliti pertama 9 orang dan peneliti utama sebanyak 1 orang. Dengan tingkat pendidikan untuk strata satu (S-1) 17 orang, 13 orang SDM peneliti berpendidikan strata dua (S2) dan 4 orang memiliki pendidikan strata 3. Dari 34 peneliti 17 peneliti BPP kemendagri berpendidikan 17

orang.dengan berada di komposisi peneliti madya dan peneliti muda.

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi khususnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Diklat dilakukan dalam meningkatkan wawasan para sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan aktivitas kegiatan serta pemenuhan tugas pokok dan fungsi setiap individu dan unit kerja yang membawahannya.

Tiga bentuk diklat yang harus dipenuhi dalam peningkatan kompetensi dalam jabatan fungsional peneliti yang dituangkan dalam gambar 1. Model peningkatan SDM dengan Diklat. Ke tiga diklat tersebut yang terdiri dari 1) diklat Teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan tahapan yang perlu dilalui serta pemilihan metodologi dan cara melakukan penelitian; 2) Diklat berdasarkan bidang kepakaran, dimaksudkan disini untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan bidang kepakaran yang dipilih oleh peneliti sejak awal diangkat sebagai peneliti untuk menjadi profesional dalam satu bidang dan juga runtutan wawasan dalam substansi penelitian. 3) Diklat peran Kemendagri, diklat ini ditujukan untuk peningkatan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang menjadi tugas pokok kementerian dalam negeri

Tabel 4. Kebutuhan Diklat Dalam Memenuhi Kompetensi Peneliti

No	Mata Diklat	Bidang Kepakaran	Jml Peneliti
1	Ilmu Politik & Pemerintahan (Pemerintahan Daerah & Pemerintahan Umum)	1) Politik dan Pemerintahan Indonesia; 2) Komunikasi Politik	9
2	Keuangan & Ekonomi Makro	1) Keuangan; 2) Makro Ekonomi	3
3	Kebijakan Publik & Administrasi Publik	1) Kebijakan Publik; 2) Kebijakan Sosial; 3) Administrasi Publik; 4) Kebijakan dan Administrasi; dan 5) Ilmu Kebijakan & Administrasi	18
4	Manajemen Bisnis	1) Ilmu Bisnis dan Manajemen; dan 2) Manajemen SDM	2
5	Perencanaan Wilayah	1) Ekonomi Kota dan Regional; 2) Perkotaan dan Regional	2
	Total Peneliti 2012	13 Bidang Kepakaran	34 org

Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2013

Pelatihan yang diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur kelitbangan khususnya peneliti dilihat dari bidang kepakaran yang dimiliki oleh para peneliti di BPP Kemendagri dapat dilihat pada tabel di atas.

Terdapat 5 (lima) mata diklat yang menjadi fokus dalam meningkatkan kemampuan peneliti di BPP Kemendagri khususnya pada peningkatan pengetahuan untuk memperkuat landasan teoritis dan landasan berfikir dalam mendukung kegiatan kelitbangan yang didapat oleh para peneliti. Diklat ini dikaitkan juga dengan bidang kepakaran yang dipilih oleh para peneliti. Terdapat 13 jenis kepakaran yang dimiliki oleh seluruh peneliti di BPP keparan tersebut menjadi patokan bagi para peneliti untuk memahami dan mendalami suatu bidang pengetahuan dan kelimuan yang menjadi dasar berfikir dan melakukan analisa untuk pemenuhan kompetensi kegiatan kelitbangan yang dilakukan.

Selain itu, peneliti juga perlu tingkatkan kemampuan teknisnya dalam melakukan kegiatan kelitbangan berdasarkan jenjang jabatan peneliti yang diduduki, perkembangan teknis penelitian yang menjadi dasar kegiatan kelitbangan mengalami laju yang juga cukup pesat, sehingga untuk menjaga agar tidak terlalu jauh tertinggal untuk itu tidak ada salahnya melakukan peningkatan pemahaman teknis kelitbangan sesuai dengan pengetahuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh peneliti di BPP, untuk itu disajikan dibawah ini tabel komposisi pengetahuan, kecakapan dan jumlah peneliti yang perlu dilakukan peningkatan teknis kemampuan dalam melakukan kegiatan kelitbangan.

Tabel 5 membagi peneliti BPP pada tingkat jabatan yang diduduki yang dibagi kedalam 4 (empat)

kedudukan jabatan peneliti yang memiliki tuntutan pemenuhan kemampuan teknis yang semakin lama semakin meningkat. Peningkatan pemahaman teknis tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah serta meningkatkan keterampilan para peneliti dalam melakukan kegiatan kelitbangan.

Setidaknya dalam mendukung peningkatan kompetensi dan teknis pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh individu peneliti mengarahkan pada pelaksanaan diklat teknis yang ditunjukkan pada kolom pengetahuan pada tabel di atas. Dengan demikian diharapkan para peneliti memiliki kemampuan yang mumpuni dan menguasai berbagai jenis cara dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola dan melaksanakan aktivitas kelitbangan yang menjadi tanggung jawab.

Usaha peningkatan kapasitas sumber daya kelitbangan juga diatur dalam permendagri 20 tahun 2011 yang tertera dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan pada dengan cara pembinaan profesi dan karir. Pembinaan profesi antara lain terdiri dari: 1) pendidikan jenjang akademis; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) studi komparasi; 4) magang; 5) seminar; dan 6) lokakarya. dan pembinaan karir yang dimaksud dalam pengembangan karir dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional dan struktural atau sebaliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan mutu peneliti di BPP Kemendagri dengan 6 (enam) kegiatan dalam pembinaan profesi tersebut hendaknya konsisten dapat dilakukan oleh organisasi dari sana setiap elemen kompetensi dalam peningkatan profesionalisme peneliti sebagai salah satu jabatan fungsional yang menjadi leading sektor dapat

Tabel 5. Komposisi pengetahuan, Kecakapan dan Jumlah Peneliti BPP

No	Jabatan Peneliti	Pengetahuan	Kecakapan	Jumlah Peneliti
1.	Peneliti Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 2. Menguasai teknik pengumpulan data; 3. Menguasai teknik pengolahan data; 4. Menguasai teknik penulisan ilmiah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 3. Mampu mengolah dan menganalisis data; 4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 	9
2.	Peneliti Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 2. Menguasai teknik pengumpulan data; 3. Menguasai teknik pengolahan data; 4. Menguasai teknik penulisan ilmiah; 5. Menguasai teknik presentasi; 6. Menguasai teknik memimpin kelompok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 3. Mampu mengolah dan menganalisis data; 4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar; 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga. 	11
3.	Peneliti Madya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 2. Menguasai teknik pengumpulan data; 3. Menguasai teknik pengolahan data; 4. Menguasai teknik penulisan ilmiah; 5. Menguasai teknik presentasi; 6. Menguasai teknik memimpin kelompok; 7. Menguasai teknik perencanaan penelitian; 8. Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 3. Mampu mengolah dan menganalisis data; 4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar; 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga; 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain. 	13
4.	Peneliti Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 2. Menguasai teknik pengumpulan data; 3. Menguasai teknik pengolahan data; 4. Menguasai teknik penulisan ilmiah; 5. Menguasai teknik presentasi; 6. Menguasai teknik memimpin kelompok; 7. Menguasai teknik perencanaan penelitian; 8. Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan; 9. Menguasai teknik penulisan buku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; 3. Mampu mengolah dan menganalisis data; 4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar; 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga; 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain; 8. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. 	1
Jumlah Peneliti				34

Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2013

terus terasah dan tersedia dalam memenuhi kebutuhan setiap kegiatan kelitbangan.

Pengembangan karir menjadi konsep dasar dalam pengembangan karir karyawan dimana menurut Mangkunegara (2005) Pengembangan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya Mangkunegara (2000) pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di organisasi agar organisasi dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Pengembangan karir harus secara kongkrit disusun dibuat dan dilaksanakan pada akhirnya mendukung peningkatan kemampuan BPP Kemendagri

dalam tuntutan pemenuhan tujuan dan peran organisasi. Selama ini, pengembangan karir peneliti belum nampak jelas hanya berfokus pada penyelenggaraan kegiatan kelitbangan dan pelaksanaan diklat serta bintek yang masih sangat minim intesitasnya. Pengembangan karir yang terjadi nampaknya masih dilingkupi dengan adanya politik kantor dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, sumberdaya aparatur kelitbangan yang terdapat di BPP Kemendagri hanya mencapai 21,94 % dari seluruh pegawai yang ada di BPP. Langkah strategi yang perlu dilakukan dalam memenuhi kekurangan SDM Kelitbangan dimulai dari rekrutmen. Rekrutmen sumber daya aparatur kelitbangan yang tersedia baik dari Kemendagri sebagai salah satu pasar langsung Sumber daya tersebut ataupun dari luar Kemendagri. Perekrutan peneliti tersebut hendaknya memenuhi tuntutan jabatan fungsional peneliti yang memiliki kompetensi yang berbeda dari jabatan fungsional lainnya. Rekrutmen tersebut sangat dibutuhkan saat ini melihat kebutuhan dalam menyiapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang menjadi tuntutan tugas kementerian atau pun unit kerja yang ada di dalam Kemendagri sangat besar dan dapat dilihat dari program legislasi nasional dan program legislasi Kementerian Dalam Negeri sendiri.

Tidak kalah pentingnya, mekanisme dalam penyelenggaraan perekrutan tenaga fungsional peneliti menjadi keberhasilan dalam menilai perekrutan tersebut, untuk itu perlu disiapkan secara matang sehingga dari perekrutan didapatkan tenaga-tenaga peneliti yang handal dan mampu memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan dalam menyiapkan kebijakan Kemendagri. Kegiatan kelitbangan menuntut kemampuan sumberdaya manusia yang ada di BPP untuk memiliki keahlian tertentu dengan pemahaman yang mendalam terhadap kegiatan ilmiah yang menjadi *core buisness* organisasi ini. Pemahaman terhadap kegiatan ilmiah tersebut perlu terus diasah dan dikembangkan untuk mendapatkan *skill* dan kecakapan yang baik dimiliki oleh SDM Kelitbangan. Untuk itu BPP menyiapkan perangkat peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur kelitbangan dengan berfokus pada kemampuan teknis dan substansi dalam melakukan kegiatan kelitbangan serta menambah rutinitas terhadap kuantitas kelitbangan yang dilakukan di BPP dan tidak juga perlunya para Sumberdaya aparatur kelitbangan yang ada juga mengusahakan serta kreatif untuk dapat mencari rutinitas kegiatan kelitbangan atau sejenisnya di tempat lain dengan tidak mengurangi tanggung jawab kegiatan yang ada di dalam BPP

Kreatifitas sumberdaya aparatur kelitbangan dengan turut serta dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh unit kerja lain dilingkungan

Kemendagri dengan sepengetahuan pimpinan terlebih dahulu dan memiliki kepakaran yang sama dengan bidang yang akan digarap di unit kerja lain tersebut. Dengan demikian dapat meningkatkan pengetahuan khususnya pada bidang kepakaran yang dimiliki, pengetahuan yang mendalam menopang kemampuan sumberdaya kelitbangan yang dimiliki oleh BPP Kemendagri sehingga akan mendorong kemampuan organisasi untuk meningkatkan kemampuan.

“BPP” Sebagai Ikon Baru

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang dulu dikenal sebagai “LITBANG” akronim tersebut sudah berubah menjadi “BPP” dimaksudkan untuk memupuk energi baru yang lebih positif lagi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan didukung pengutan fungsi-fungsi kelembagaan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Pengertian lembaga menurut Ruttan dan Hayamin dalam Setiyowati (2007) adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi di antara anggotanya untuk membuat membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Kekuatan organisasi datang dari dalam organisasi itu sendiri dengan menekankan pada pendayaan sumberdaya manusia dan penataan strategi dan langkah-langkah untuk dapat menapaki terwujudnya visi dan misi BPP Kemendagri. Berbagai macam program dan kegiatan disusun setelah lahirnya Permendagri nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Sehingga memperkuat posisi BPP Kemendagri dalam penyelenggaraan dan koordinasi Litbang di daerah dan juga disertai dengan penguatan organisasi pelaksana fungsi kelitbangan yang ada di daerah. Infrastruktur regulasi untuk mendukung pelaksanaan koordinasi tersebut menekankan pada dukungan terhadap sumberdaya kelitbangan yang sehingga terdapat transfer of knowledge kepada pelaksana di daerah yang berada di unit organisasi yang memiliki peran kelitbangan.

Mekanisme yang ada saat ini lebih memfungsikan struktural sebagai pejabat peneliti yang melakukan kegiatan penelitian bukan yang mengelola kegiatan penelitian. Fungsi struktural tersebut yang sebagian besar bukan fungsional peneliti yang rangkap jabatan menjadi kegiatan penelitian yang memiliki arahan kurang tepat khususnya pada substansi permasalahan yang diteliti. Setidaknya ada norma yang dibuat sehingga ketesingguna dalam pelaksanaan kegiatan antara peneliti dan perangkat struktural tetap terjaga keharmonisannya, sehingga pada akhirnya kegiatan

penelitian dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang diberikan

Mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas, sangat diperlukan perubahan pola kerja dan sistem prosedur dalam pengelolaan hal tersebut. Manajemen baru dalam pengelolaan dapat ditinjau dari struktur yang ada saat ini struktur yang ada dirasakan kurang efektif mengingat lebih banyak struktural dari pada jumlah peneliti sendiri. Minimnya jumlah peneliti yang merupakan sumber daya utama dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan menjadi sangat penting untuk mendorong pergeseran paradigma pelaksanaan tugas kelitbangan disetiap unit kerja pada BPP. Saat ini pada unit kerja eselon 2 (Dua) yang memiliki nomenkelatur Pusat Penelitian dan pengembangan yang lebih kental struktur lini dimana melaksanakan tugas berjenjang sesuai tingkatan dan kedudukannya. Setidaknya memperhatikan hal tersebut diperlukan aturan lebih operasional yang mengedepankan tenaga fungsional peneliti yang memiliki kompetensi melaksanakan kegiatan penelitian.

Peraturan tersebut setidaknya dapat menjembatani pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan pejabat struktural yang memiliki kewenangan penuh terhadap penggunaan anggaran. Dapat dipahami pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab merupakan pejabat struktural yang ditetapkan oleh peraturan, setidaknya komitmen pengelola anggaran yang melaksanakan kegiatan kiranya menguasai betul pelaksanaan kegiatan kelitbangan disetiap tahapannya dan juga memahami bentuk maksud serta urgensinya tahapan tersebut, sehingga pelaksanaan kelitbangan menjadi memenuhi kualitas yang baik. Untuk itu juga, dibutuhkan norma yang dapat mendukung interaksi antara pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan kelitbangan substansi. Setidaknya norma tersebut mengatur mekanisme interaksi dan komunikasi dalam setiap tahapan kegiatan kelitbangan, sehingga terjadi saling keterpaduan antara struktural yang mengelola lini staf yang melaksanakan pengadministrasian serta mendukung kelancaran kegiatan kelitbangan dengan fungsional peneliti yang memiliki tugas dalam substansi kelitbangan.

Manajemen lini staf masih sangat kental digunakan di BPP Kemendagri hingga saat ini, menjadi sangat mendesak sehingga harus ditinjau kembali dalam pelaksanaan setiap kegiatan kelitbangan yang berlangsung. Besarnya struktur lini yang diterapkan di BPP Kemendagri memperbesar beban organisasi terhadap pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang hanya menghasilkan pekerjaan administrasi, semestinya mengikuti tugas dan fungsi dari BPP Kemendagri yang merupakan organisasi fungsional. Untuk itu dibutuhkan dukungan agar dapat memenuhi penyetaraan kemampuan yang dimiliki oleh setiap

struktural dengan fungsional peneliti, sehingga menghadirkan kebersinggungan dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan dilakukan dengan minimnya kompetensi sipelakunya.

Memisahkan garis kewenangan dalam pengelolaan kegiatan kelitbangan menjadi penting sehingga dapat bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang baik. Memperhatikan struktur yang ada saat ini di BPP Kemendagri setidaknya memiliki ukuran yang sesuai (*right sizing*) sehingga mengubah struktur kepada lini fungsi, menjadi salah satu strategi yang ditempuh dalam membentuk dan mengembalikan lagi kelembagaan BPP Kemendagri kepada fungsi organisasi yang sesungguhnya, sehingga dapat mendukung penuh berjalannya organisasi untuk melaksanakan fungsi kelitbangan dan juga menyusun kembali kerangka kelembagaan BPP Kemendagri.

Selain penguatan sumberdaya aparatur kelitbangan dan struktur organisasi, memperhatikan juga pelaksanaan setiap kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan di BPP Kemendagri juga harus memenuhi tuntutan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Capaian terhadap visi dan misi tersebut sangat dibutuhkan sehingga menjaga konsistensi penyelenggaraan kelitbangan pada BPP Kemendagri. Dukungan sumberdaya aparatur serta kegiatan kelitbangan yang patut diperhatikan sehingga dapat mengarahkan kepada visi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan komitmen dari seluruh *stakeholder* kelitbangan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaannya tersebut. Selain hal tersebut, yang harus diperhatikan komitmen dari seluruh pelaksana yang ada di BPP Kemendagri baik itu dari pimpinan hingga pelaksana pada tingkat bawah. Komunikasi visi tersebut setidaknya dilembagakan sehingga seluruh pelaksanaan menjadi benar-benar paham, sehingga dapat membangun rasa kebersamaan setiap pegawai.

Profesionalisme BPP Kemendagri

BPP Kemendagri dalam menjalankan dan mencapai pemenuhan visi dan misinya dimulai dari komitmen pimpinan dan dibutuhkan kepemimpinan yang mumpuni untuk menjelaskan visi dan misi serta memaparkan strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaiannya. Kepemimpinan di BPP Kemendagri sama halnya kepemimpinan di tempat lain, yang mampu mengalokasikan kekuatan untuk mendukung dan melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Saat ini, dengan budaya organisasi yang ada diperlukan beberapa strategi mengingat budaya yang ada saat ini tidak terbentuk belum mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan dan dalam pelaksanaannya perlu dibangun budaya BPP yang kuat setelah mendapatkan kepemimpinan yang mau berkomitmen.

Budaya BPP saat ini, minimya kreativitas dalam pengembangan kegiatan yang ada, sehingga bentuk pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan berulang dari tahun-ketahun tanpa ada tambahan pengetahuan yang didapat dari kegiatan tersebut. Pengembangan aktivitas yang hanya berdasarkan pelaksanaan kegiatan hanya menarik perhatian untuk terus dilakukan tanpa pernah ada memikirkan dampak ikutan dari kegiatan tersebut. selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap aktivitas fungsional dan pemaknaanya terhadap kegiatan tersebut menjadi sangat penting bagi warga BPP Kemendagri khususnya. Semangat untuk berfikir keluar dari zona yang nyaman (*thing out off the box*) dalam menghadapi tantangan harus terus diupayakan dan digalang dari berbagai lini untuk menjaga kridibilitas organisasi dalam mewujudkan BPP yang memiliki daya saing kuat.

Kreatifitas tersebut didukung penuh dengan budaya organisasi yang diciptakan melalui norma-norma tertulis ataupun norma yang tidak tertulis. Budaya saat ini terbentuk lebih pada pengembangan oranisasi tradisional yang hanya mengandalkan pola-pola lama yang sudah usang yang sepatutnya sudah lama ditinggalkan. Dampak dari itu daya saing yang semakin rendah dalam menciptakan kinerja yang berkualitas terjadi, perbaikan harus segera dimulai, dari pembentukan karekater SDM Kelitbangan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh organisasi sampai dengan sistem dan komintem kebijakan yang diambil dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan.

Selain itu minimnya inovasi yang terbentuk dalam pengelolaan dan pelaksaan kegiatan kelitbangan sebagai kegiatan utama dan kegiatan fasilitasi sebagai kegiatan pendukung guna meningkatkan kapasitas organisasi ini menjadikan peningkatan kualitas dan daya saing organisasi semakin melemah. Inovasi diciptakan dari kreatifitas dalam pelaksanaan kegiatan serta perencanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output yang menjadi tugas BPP Kemendagri. Inovasi dibentuk dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan organisasi untuk membuat pelaksanaan dan kinerja organisasi menjadi lebih optimal dan lebih baik lagi.

Penginkatan profesionalisme juga didukung dari responsifitas, kemampuan para aparatur kelitbangan dalam membaca peluang dan tantangan yang dihadapi dimasa saatini dan yang akan datang dalam membangun BPP yang lebih baik lagi dalam mengantisipasi perkembangan perubahan yang datang dari luar dan untuk sesegera mungkin merespon dengan melakukan perubahan di dalam unit kerja sehingga dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap peembangan dan perubahan kondisi yang terjadi. Reponsifitas tersebut membutuhkna kemampuan dari aparatur dalam mengidentifikasi gejala dan trend pada

masa yang akan datang, sehingga kemampuan dalam melakukan analisisnya sangat diperluakan hal ini mendukung BPP Kemendagri menjadi unit kerja yang lebih profesional.

Penguatan di internal BPP Kemendagri menjadi langkah awal dalam membangun sebuah komitmen dalam mewujudkan profesionalisme. Langkah tersebut Kegiatan kelitbangan merupakan bentuk dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dalam rangka memsuksesan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri pada umumnya. Penguatan internal BPP Kemendagri dengan membangun serangkaian aktivitas strategijk yang sudah ada hingga saat ini khususnya dalam menjamin pelaksanaan aktivitas lembaga dalam menjaga kualitas hasil-hasil kelitbangan itu sendiri.

Melengkapai profesionalisme dalam membentuk lembaga yang kuat maka dibutuhkan budaya kerja yang lebih kondusif dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan. Kondis situasi kerja yang kodusi dibangun oleh pimpinan dan nantinya akan diikuti oleh jajaran bawahan dan menular keseluruh jajaran pada unit kerja ini situasi tesebut didukung dari perilaku kerja individu yang disiplin, toleransi yang tinggi antara staf dan pimpinan, dengan demikian secara perlahan terbentuk budaya kerja di BPP Kemendagri yang kondusif.

Kondisi saat ini, walapun tak kasat mata penyelenggaraan kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya pelaksanaan tugas berdasarkan fungsi lembaga yaitu fungsi kelitbangan masih mengarah pada pola pelaksanaan yang ketal strukturalnya sehingga pelasaan kegiatan berdasarkan garis komado dan hirarkir jabatan sturktural, intensitas ketelibatan fungsional peneliti dalam kegiatan kelitbangan hanya sebatas melaksanakan atau mengeksekusi aktifitas kelitbangan pelaksanaan tahapan-tahapan kelitbangan yang menjadi tugas di Pusat Litbang yang terdapat di BPP Kemendagri. Untuk itu sekiranya dapat juga membangun unit kerja yang menjalankan pola berbasis fungsional karena melihat peran dan tugas BPP Kemendagri yang syarat dengan kegiatan fungsional kelitbangan. Budaya yang dibangun pada BPP Kemendagri juga diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang berbasis fungsional, untuk itu dalam membangun juga membangun kepercayaan dalam organisasi kepada setiap individu

Menaksanakan dan menjaga budaya kerja dibutuhkan bentuk kepemimpinan yang partisipatif yang dapat memberikan dukungan kepada setiap individu dalam menyelesaikan dan menuntaskan pekerjaan yang dilakukan di BPP Kemendagri. Gaya kepemimpinan partisipatif mendorong setiap individu untuk mau terlibat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang ada di BPP Kemendagri. Digunakan gunakan gaya

kepemimpinan partisipatif melihat membutuhkan kemampuan pimpinan yang dukungan yang tinggi kepada setiap individu tetapi direktif yang rendah dalam pelaksanaan kegiatan dan gaya kepemimpinan ini digunakan pada lembaga yang sudah lama berdiri dengan melihat pada tingkat kematangan setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan tugas kelitbangan.

SIMPULAN

Peningkatan kapasitas BPP Kemendagri sebagai suatu organisasi menjadi tuntutan untuk setiap organisasi yang berkembang, peningkatan kapasitas tersebut memerlukan bentuk dukungan yang menjadi simpulan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan motivasi SDM Kelitbangan menjadi kebutuhan dalam mengerjakan organisasi dipandang sangat penting perencanaan karir Sumber Daya Aparatur Kelitbangan sehingga kejelasan berkarir menjadi SDM yang profesional menjadi nyata.
2. Peningkatan kapasitas BPP Kemendagri juga menjadikan Komitmen Pimpinan dalam menjaga dan memelihara kondisi yang sudah stabilis menuju tingkatan organisasi yang lebih baik lagi.
3. Diperlukan juga kreatifitas Sumber daya aparatur Kelitbangan sebagai motor sekaligus penggerak dalam setiap pelaksanaan kelitbangan yang diharapkan mendapatkan porsi yang sesuai dengan kedudukan dalam pengelolaan organisasi.
4. Dukungan dari pimpinan dengan gaya kepemimpinan partisipatif menjadi pengikat seluruh jajaran dalam mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan BPP Kemendagri

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. Sumber Daya Manusia perusahaan. Remaja PTRosdakarya: Bandung
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Manajemen Sumber daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
- A.F.Stoner James, DKK, 1996, Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Brown, L., A. Lafond dan K. Macintyre. 2001. Measuring Capacity Building. University of North Caroline: Caroline Population Center.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasim, Azhar, 1993. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi, Jakarta : LP FEUI dan PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.

- Levy and weitz. 2001, Retailing Management, Mc. Graw Hill, New York.
- North, D.C. (1990). Institutions: Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Moekijat. 2010. Manajemen Sumber Daya manusia. CV Maju: Bandung.
- Sastradipoera, Komaruddin. 2002. Menejemen Sumber daya Manusia: Suatu Pendekatan Fungsi Operatif Edisi I. Penerbit Kappa-Sigma: Bandung.
- Supranto, J. 2001, Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Rineke Cipta, Jakarta

EVALUASI PENYAJIAN PELAPORAN AKTIVA TETAP UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH

EVALUATE THE REPORTING OF FIXED ASSETS FOR IMPROVING GOVERNMENT INSTITUTIONS SUPERVISION

Meity Handayani

Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132 Jakpus, Telp: 021- 3101953
e-mail: meityhandayani@yahoo.co.uk

Diterima: 18 Agustus 2013; direvisi: 23 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di Pemerintah, kemudian mendeskripsikan factor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, serta membangun penyajian pelaporan alternatif yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung). Hasil analisis penelitian menunjukkan: laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari system yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, system tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanyamengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no. 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap.

Kata kunci: Evaluasi, laporan, akunting, asset tetap, akrual

Abstract

This study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building an ideal alternative to improve the supervision of government institutions. This study uses descriptive with qualitative approach. Data collection was performed by the study of documents method from print and electronic sources and Direct Observation. The analysis resulted: fixed asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does not include information on the cost of depreciation, depreciation calculations rely on the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very important, because the next Government is obliged ti follow the PP no.71 tahun 2010 about accrual accounting base and is the basis for asset in order to achieve the orderly recording and management of fixed assets.

Keywords: evaluation, report, accounting, fixed assets, accrual

PENDAHULUAN

Situasi masyarakat yang kian dinamis dan kritis akan isu keuangan tersebut, memerlukan kecepatan dan keakuratan suatu informasi atas laporan keuangan yang optimal, jujur, transparan dan dapat di pertanggungjawaban, agar tidak mencederai harapan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Dalam memberikan keyakinan atas suatu laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah maka idealnya diperlukan pemeriksaan dan opini dari pihak ketiga (auditor) dalam penilaiannya. Untuk itu laporan keuangan

yang disusun oleh Pemerintah diaudit oleh auditor yang terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal bahkan Akuntan Publik.

Pada mulanya laporan bagi suatu pemerintah hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar kepercayaan masyarakat, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar laporan keuangan yang tidak wajar tersebut

terdapat dalam pelaporan aktiva tetap. Seperti diketahui bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional/kegiatan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Laporan aktiva tetap merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi aktiva tetap dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Laporan aktiva tetap biasanya mengungkap penambahan aktiva, pengurangan aktiva dan posisi serta nilai aktiva saat ini (Standar Akuntansi Pemerintahan). Dalam hal ini analisa rasio dapat dipakai dalam memberikan gambaran keadaan aktiva tetap yang sebenarnya mengenai sehat tidaknya pemerintah melakukan program kerjanya.

Berdasarkan gambaran penyajian laporan aktiva tetap untuk meningkatkan performa laporan keuangan maka penelitian ini sangat penting untuk segera diteliti.

Dengan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, (2) Membangun *alternative* penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis: (1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan studi pendidikan yang berkaitan dengan pelaporan aktiva tetap dalam kelembagaan pemerintah, (2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka efisien dan efektif terkait dengan penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah.

Kewajiban menjaga kompetensi dan profesionalitas dalam menyusun laporan keuangan adalah bersifat mutlak dan melekat sepanjang terdapat kegiatan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: (1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, (2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, (3) SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk : (1) Akuntabilitas ; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan, (2) Manajemen ; memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, (3) Transparansi ; memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders, (4) Keseimbangan Antargenerasi ; memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Masa manfaat adalah: (1) periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau (2) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai sisa adalah jumlah *netto* yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu pos aktiva tetap dikonsumsi oleh perusahaan sepanjang masa manfaat aktiva. Tetapi, faktor lain seperti keusangan teknis dan aus serta rusak (*wear and tear*) saat suatu aktiva menganggur (*idle*), juga

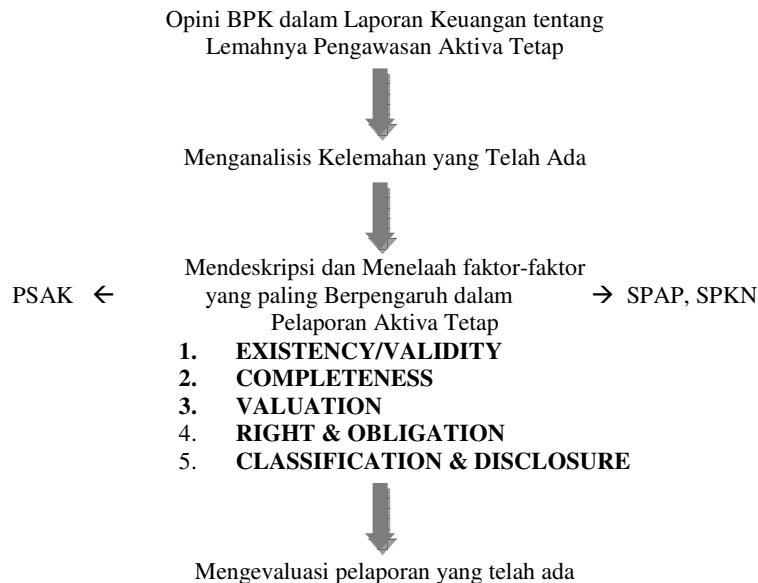
dapat mengurangi manfaat keekonomiannya yang mungkin telah diharapkan tersedia dari aktiva.

Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan.

Kebijakan perbaikan dan perawatan perusahaan juga dapat mempengaruhi masa manfaat suatu aktiva. Kebijakan dapat menghasilkan suatu perpanjangan masa manfaat aktiva atau suatu peningkatan dalam nilai sisanya. Tetapi, penggunaan kebijakan tersebut tidak meniadakan kebutuhan untuk membebaskan penyusutan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Kriteria dari aktiva tetap adalah:

1. Existency/Validity



Skema 1. Alur kerja evaluasi laporan keuangan tentang lemahnya pengawasan aktiva tetap.

Tabel 1. Identifikasi Kejadian Nyata Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

No.	Kriteria	Uraian
1.	Existency/Validity	Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah.
2.	Completeness	Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali.
3.	Valuation	Permasalahan yang dihadapi Pemerintah adalah masalah valuation. Saat ini Pemerintah sebagian besar masih berpedoman pada PP no.24 tahun 2005 sedangkan peraturan tersebut telah direvisi dengan PP no.71 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual adalah pencatatan berdasarkan terjadinya transaksi, bukan berdasarkan keluar atau masuknya kas. PP no 71 tahun 2010 seharusnya sudah mulai diberlakukan terhitung mulai tahun 2010 lalu, akan tetapi karena masih kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi berbasis akrual maka balitbang kemendagri masih menggunakan akuntansi berbasis kas. Dalam perlakuannya untuk aktiva tetap, dua perlakuan akuntansi tersebut sangat berbeda karena nilai aktiva tetap selalu berkaitan dengan biaya penyusutannya. contoh kasus, apabila seorang KPA setuju untuk membeli mobil dinas pada oktober 2011 seharga Rp300.000.000 sedangkan pembayarannya dilakukan pada November 2011, sesuai dengan PSAK estimasi masa manfaat kendaraan bermotor adalah 5 tahun apabila menggunakan metode garis lurus, maka perlakuan akutansinya adalah:

		<p><u>akuntansi berbasis kas</u> pencatatan perolehan aktiva tetap bulan November 2011 (saat kas keluar dari bendahara) biaya dihitung sejak bulan November 2011 $(Rp300.000.000 \times 20\%) / 12 = Rp5.000.000 \times 2$ (Nov-Des) = Rp10.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011</p> <p><u>akuntansi berbasis akrual</u> pencatatan perolehan aktiva tetap bulan Oktober 2011 (saat transaksi berlangsung) biaya dihitung sejak bulan Oktober 2011 $(Rp300.000.000 \times 20\%) / 12 = Rp5.000.000 \times 3$ (Okt-Des) = Rp15.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011</p> <p>Sehingga terjadi selisih sebesar $Rp15.000.000 - Rp10.000.000 = Rp5.000.000$</p> <p>Selisih tersebutlah yang biasanya menjadi temuan/koreksi dari pengawas.</p> <p>Selain masalah valuation diatas, sebagian Pemerintah saat ini belum menghitung sendiri depresiasi penyusutan (saat ini masih dihitung oleh DJKN Kemenkeu). Apabila seluruh instansi Pemerintah mampu menghitung depresiasi penyusutannya sendiri, maka akan terlihat nilai aktiva saat ini dan aktiva-aktiva mana saja yang masih ada masa manfaatnya. Masa manfaat aktiva digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan penghapusan aktiva tetap (untuk aktiva yang masa manfaatnya telah habis dapat dihapuskan-PSAK). Masa manfaat aktiva yang telah habis dapat dihapuskan atau dijual. Apabila dijual maka hasil penjualannya dapat menambah kas Negara.</p>
4.	Right & Obligation	<p>Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan asset (asset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan)</p>
5.	Classification & Disclosure	<p>Permasalahan dalam pelaporan aktiva tetap pada beberapa instansi Pemerintah adalah apabila waktu pelaporan aktiva mundur dari jadwal. Karena pencatatannya belum berupa system yang terintegrasi.</p> <p>Berdasarkan pengamatan/observasi, laporan aktiva tetap sebagian instansi Pemerintah telah memenuhi beberapa criteria aktiva tetap yaitu criteria existence/validity, completeness dan right/obligation. Sedangkan untuk criteria valuation dan disclosure masih terdapat beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut adalah adalah tidak lengkapnya disclosure (pengungkapan) aktiva tetap sebagaimana telah diatur didalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mengenai informasi penyusutan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Nilai penyusutan; 6. Metode penyusutan yang digunakan; 7. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 8. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

2. Completeness

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Valuation

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

4. Right & Obligation

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

5. Classification & Disclosure

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: (a) Penambahan, (b) Pelepasan, (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d) Mutasi aset tetap lainnya.; (3) Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data

Tabel 2. Contoh Prosedur Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

Tujuan dan Prosedur	NO. Tabel.	Ket.
Uji Detail Saldo		
1. Periksa kesesuaian saldo awal 1 Januari xxxx (awal tahun) sesuai dengan saldo audit 31 Desember tahun sebelumnya (yg telah audited), untuk memastikan semua koreksi audit tahun lalu telah dibukukan secara tepat dan akurat.	3.6	
Audit Objectives: EXISTENCY/VALIDITY <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk pemerintah.</i>		
2. Buatlah rincian aset tetap dan skedul depresiasi sesuai dengan klasifikasi jenis aset tetap.	3.6	
3. Buatlah skedul penambahan aset selama tahun berjalan. Bandingkan penambahan dengan rencana tahunan (RAPBN).	3.3	
4. Untuk penambahan aset periksa dokumen pendukung (kontrak pembelian, SP2D) untuk mengecek biaya tercatat. Evaluasi perkiraan umur ekonomis yang diterapkan.	3.3	
5. Untuk pelepasan/penjualan aset periksa dokumen pendukung untuk memastikan jumlah yang diterima, dan jumlah nilai perolehan dan penyusutan yang dihapus dari buku besar. Hitung ulang kerugian atau pendapatan.	3.4	
Audit Objectives: COMPLETENESS <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali.</i>		
6. Periksa fisik aset tetap dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan telusuri keberadaan pencatatannya.	BAP/ KIB	
Audit Objectives: VALUATION <i>Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan dicatat dengan nilai yang layak (telah mengakui akumulasi penyusutan, deplesi, atau amortisasi). Nilai yang belum terdepresiasi diharapkan akan diterima Pemerintah di masa mendatang dari penggunaannya.</i>		
7. Lakukan prosedur analitis atau penghitungan ulang untuk menguji beban depresiasi/amortisasi dan samakan beban total dari daftar aset ke pos beban pada buku besar. (cocokkan penghitungan yang dilakukan oleh pengelola aktiva tetap dan bagian akuntansi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	3.5	AD
Audit Objectives: RIGHT & OBLIGATION <i>Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi.</i>		
8. Buatlah konfirmasi Bank dan debitur, kemudian telaah notulen, perjanjian, dan dokumen lain untuk bukti jaminan, atau pembatasan aset tetap. Tentukan bahwa pengungkapan yang penting sudah dibuat.		
Audit Objectives: CLASSIFICATION & DISCLOSURE <i>Aset tetap dan akun terkait telah disajikan dengan layak, dijelaskan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.</i>		
9. Periksa kemungkinan penambahan aset tetap yang tidak layak, seperti biaya pemeliharaan, perbaikan yang dikapitalisasi.	3.3	AD

dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan *Observation* (Pengamatan Langsung). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan membandingkan Informasi dan dokumen yang didapat dengan keadaan yang ada di lapangan tentang objek yang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan (GAP) secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengkategorisasikan, membandingkan, menganalisis, mengevaluasi dan menginterpretasikannya untuk kemudian menarik kesimpulan yang logis. Dalam analisis tersebut digunakan bantuan tabel, gambar, chart dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kesenjangan antara Kenyataan dengan Keinginan

Dalam uraian diatas maka ditarik kesimpulan, kriteria yang harus dimiliki oleh aktiva tetap adalah:

1. *Existency/Validity*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah. Prosedur:

- Siapkan rincian aset tetap dan skedul depresiasi yang sesuai dengan klasifikasi jenis aset tetap. (Lihat Tabel 2)
- catat penambahan aset tetap selama tahun berjalan serta telah dicocokkan dengan rencana tahunan anggaran. (Lihat Tabel 2)
- Atas penambahan aset tetap selama tahun berjalan telah diperiksa ke dokumen pendukung seperti SP2D. (Lihat Tabel 2)
- Atas pelepasan dan penjualan aset tetap telah

Identifikasi Aspek untuk Mengatasi Kesenjangan

diperiksa kedokumen pendukung dan telah dilakukan penghitungan ulang untuk mengetahui laba atas penjualan aset tetap. (Lihat Tabel 2)

2. *Completeness*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali. Prosedur:

Lakukan pemeriksaan fisik aset tetap dan telah terdapat BA Pemeriksaan Aset Tetap. (Lihat Tabel 2)

3. *Valuation*

Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan dicatat dengan nilai yang layak (telah mengakui akumulasi penyusutan, deplesi, atau amortisasi). Nilai yang belum terdepresiasi diharapkan akan diterima Pemerintah di masa mendatang dari penggunaannya. Prosedur:

Lakukan penghitungan untuk menguji beban depresiasi dan telah dicocokkan dengan saldo beban penyusutan. (Lihat Tabel 2)

4. *Right & Obligation*

Perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan aset (aset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan).

5. *Classification & Disclosure*

Aset tetap dan akun terkait telah disajikan dengan layak, dijelaskan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur:

Seluruh aset tetap disajikan dan diungkapkan dengan cukup (Lihat Tabel 2)

Keterangan atribut tes tabel 4:

- Terdapat permintaan dari bagian terkait yang

Tabel 4. Contoh Laporan Penambahan Aset Tetap

No	Bukti Jurnal			Keterangan	Atribut tes						
	No.	Tanggal	Nilai (dln Rp)		a	b	c	d	e	f	g
1.	Xxx	1/1/12	180.000.000	Mobil Dinas APV	√	√	√	√	√	√	√
2.	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	√	√	√	√	√	√	√
3.	Dst										

Tabel 5. Contoh Pelaporan Pengurangan Aset Tetap (dln jutaan Rupiah)

No	Bukti Jurnal			Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Jual	Laba (Rugi) Pelepasan Asset Tetap	Atribut tes			
	No	Tanggal	Nilai							a	b	c	d
1.	xx	1/5/2012	345	Furniture kantor	345	345	-	-	-	√	√	√	√
2.	xx	1/5/2012	100	Komputer dan printer	100	80	20	27	7	√	√	√	√

Tabel 6. Contoh Pelaporan Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku

Jenis aset	Tahun Perolehan	Nilai Aktiva Tetap tahun lalu			Nilai Perolehan Tahun ini	Nilai perolehan yang akan disusutkan	% penyusutan	Beban Penyusutan tahun ini	Akumulasi penyusutan tahun berjalan
		Nilai perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku					
1 Mobil Dinas APV	2 1/1/2012	3 -	4 -	5=3-4 -	6 180	7=3+6 180	8 20%	9=7 x 8 36	10=4+9 36
Mesin Genset Dst	1/1/2010	10	5	5		10	25%	2,5	7,5

Tabel 7. Contoh Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap

Keterangan	Saldo 1 Januari xxxx	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember xxxx
Harga Perolehan				
-Kendaraan bermotor	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Peralatan & inventaris	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Bangunan dan Tanah	Xxx	xxx	xxx	xxx
Sub Jumlah Harga Perolehan	Xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan				
-Kendaraan bermotor	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Peralatan & inventaris	Xxx	xxx	xxx	xxx
-Bangunan dan Tanah	Xxx	xxx	xxx	xxx
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan	Xxx	xxx	xxx	xxx
Nilai Buku	<u>XXX</u>			<u>XXX</u>

- membutuhkan penambahan aset tetap
- Terdapat persetujuan dari PPK dan bendahara pengeluaran atas penambahan aset tetap
 - Akurasi telah benar
 - Seluruh dokumen eksternal (Kuitansi, Faktur, Invoice atau Tagihan dari Rekanan) telah lengkap
 - Telah diklasifikasikan dengan benar
 - Telah sesuai dengan RAPBD

Keterangan Atribut tes tabel 5:

- Terdapat persetujuan dari Sekjen dan DJKN atas pelepasan aset tetap
- Telah tercatat didalam system aplikasi pada bagian Rumah Tangga dan system aplikasi pada bagian keuangan
- Akurasi telah benar
- Telah diklasifikasikan dengan benar

Untuk Pelaporan dan Pengungkapan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka nilai atas akumulasi dan beban penyusutan atas aktiva tetap wajib untuk diungkapkan.

SIMPULAN

Laporan Aktiva Tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari sistem yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, sistem tersebut

bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini sistem tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. Sistem tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanya mengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepannya Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis accrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah kurang maksimalnya gudang penyimpanan aktiva sehingga terdapat kasus aktiva rusak maupun hilang. Untuk membuat model pelaporan aktiva tetap yang ideal sebaiknya sesuai dengan PSAK dan SAP. Saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam hal penyajian pelaporan aktiva tetap untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah adalah:

- meningkatkan kualitas dan kuantitas pembuat laporan aktiva tetap dengan cara mengikutsertakan dalam program pelatihan/diklat untuk pengelolaan dan pelaporan aktiva tetap.
- membuat gudang yang ideal sebagai upaya pengamanan dan untuk lebih memudahkan pengoptimalan aktiva tetap tersebut.
- mengusulkan untuk membuat laporan aktiva tetap berdasarkan PSAK dan SAP, seperti

contoh format pelaporan aktiva tetap diatas (Tabel 2 s.d. 7) mempermudah dalam pencatatan dan menambah kas negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hidayat, Alvin Reinanda (2009), *Masalah Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah*
- Siregar, Doli D. (2004), *Manajemen Aset*, Gramedia
- Scott, W. Richard (2001) *Institutions and Organizations, (Second Ed.)*, Sage Publication
- Robbins, Stephen and MaryCoulter (2007), *Management (Eight Ed.)*, NJ: Prentice Hall
- Oxford English Dictionary*
- Puslitbang Keuangan Daerah (2011), *Implementasi Manajemen Aset Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007*, Kementerian Dalam Negeri
- Komite Akuntan Indonesia (1994), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain*, Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia
- BPK-RI (2010), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*.
<http://itjenKemendagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=25> , diakses 8 Maret 2012
- http://www.damandiri.or.id/file/abdwahidchairulahunair_bab2.pdf , diakses 10 Maret 2012
- Kompas (2010), *Pengelolaan Aset Daerah Lemah*
- Tempo Interaktif (2007), *DPRD Banten Pertanyakan Hilangnya Aset Daerah*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005, Lampiran IX, Pernyataan no.07, Akuntansi Aset Tetap
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Lampiran I.01, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG

PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND SHOPPING DISTRICT BUDGET REVENUES PROVINCE LAMPUNG

Noverman Duadji

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro no. 1 Bandarlampung, 35145

e-mail: novermanduadji@yahoo.co.id

Diterima: 14 Juli 2013; direvisi: 21 Juli 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Rakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partisipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?. Tujuan penelitian ini diarahkan pada: (1) penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajat (kategorisasi) partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media transaksi dan bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajat ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4). Atas dasar simpulan diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melalui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakatan dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pengambilan Keputusan, APBD

Abstract

As we know that the People own the provincial budget (APBD). Although the public participation lies on more important placement in operating the public affairs and local governance, especially in the decision making of the provincial budget. The research problem is stated: what is the public participation in operating the provincial budget and what is it's category of the Aronstein's participation ladder? The research aimed to: (1) description of the public participation in operating the provincial budget, and (2) analysis to classify the public participation of the Aronstein's participation ladder. According to the reasons of the goal, the qualitative method is used. The research result indicated that the decision making of the provincial budget is the formal actor's arena and area. It's expressed as political process, transactional media and bargaining among the formal actors. The public participation is in signing of participation, such as give the information and consultative advices.

Keywords: Public Participation, Decision Making, Provincial Budget

PENDAHULUAN

Penjajahan dalam kurun waktu berabad-abad lamanya telah membuat bangsa Indonesia harus lebih banyak belajar dan memperbaiki sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan warisan pemerintah kolonial. Secara logik, pastilah pemerintah kolonial tersebut akan melindungi kepentingannya di wilayah

teritori kolonialnya dan karenanya dapat dipahami jika sistem, pola dan penataan serta penyelenggaraan institusi publik didominasi oleh 'hegemoni kekuasaan', anti demokrasi, reformasi, memarjinalisasikan hak-hak warga dan menutup rapat-rapat saluran aspirasi dan partisipasi publik. Terbukti bahwa pola dan sitem warisan kolonial ini, oleh rezim orde lama dan orde baru tetap

dipertahankan dimana tidak atau belum ada satu landasan legal formalpun yang mengatur pentingnya partisipasi publik. Alasan klise yang dijadikan kambing hitamnya adalah rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi sehingga 'stabilitas dan kondusivitas perpolitikan nasional perlu dipertahankan dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, adanya ayat pembenaran untuk melakukan tindakan sengaja membunuh demokrasi (mengorbankan hak dan partisipasi rakyat) untuk alasan pembangunan nasional.

Seiring waktu perjalanan sejarah bangsa, reformasi telah menjadi pintu masuk yang menempatkan rakyat sebagai pilar utama pemerintahan daerah, terjadi perubahan paradigma dan aturan legal formal dari sentralisasi menjadi desentralisasi; perubahan pendekatan dari agresif mobilisasi (kursif dengan otoritas) warga menjadi pendekatan partisipatif yang lebih bersifat memberdayakan, yang antara lain bisa dilihat dari adanya UU Nomor 22/1999 yang sudah direvisi dengan lahirnya UU Nomor 32/2004. Ini menunjukkan adanya tekad kuat (political will) pemerintah untuk mewujudkan tata-kelola institusi publik yang lebih demokratis (democratic governance) dengan menggeser '*strutural efficiency model*' ke arah '*local democracy model*'. Pergeseran model ini telah mempertegas fungsi desentralisasi untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal, adanya kesadaran tentang variasi kehendak politik (political variety) untuk menyalurkan suara dan pilihan (kepentingan) masyarakat lokal yang pastinya akan difasilitasi dengan mempertimbangkannya sebagai input perumusan kebijakan (APBD). Hal ini sesuai dengan substansi dan tuntutan dari kebijakan desentralisasi yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada partisipasi masyarakat sebagai konsep penting karena masyarakat mempunyai tempat sebagai subyek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam perspektif konsep atau telaah teoritik, partisipasi publik sangat memiliki arti penting dan menentukan arah dalam proses pengambilan keputusan APBD Provinsi atau barangkali paralel dengan pernyataan bahwa 'bukanlah kebijakan tanpa partisipasi masyarakat' seperti dapat ditelusuri dari tulisan Korten dalam Syahrir (1984) tentang '*people centered development*' (pembangunan yang terpusat pada manusia); Burn dkk (1994) yang menunjukkan pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (voice) dalam proses pemerintah daerah.

Sejalan dengan uraian diatas, Muluk (2007) melihat arti penting partisipasi publik dari sudut fungsi, yaitu:

1. Sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi tidak akan mengancam

stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan.

2. Sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Dengan mengacu pada pernyataan diatas, maka sesungguhnya partisipasi publik akan dapat meningkatkan kualitas isi keputusan yang dibuat dan ditetapkan pemerintah daerah yang berbasis kepentingan dan pengetahuan riil yang ada didalam lingkup masyarakat lokal. Partisipasi juga bermanfaat sebagai instrumen pendorong terbangunnya komitmen masyarakat untuk memberikan dukungan moral, turut membantu dan bahkan juga turut bertanggungjawab terhadap keputusan APBD. Atas dasar demikian, maka seperti pernyataan Antoft dan Novack (1998) bahwa partisipasi publik itu tidak dapat dipandang pemerintah sebagai hanya sebuah kesempatan tetapi merupakan hak-hak dasar warga. Partisipasi publik juga harus dipandang sebagai layanan dasar dan bagian integral dari local governance.

Kendatipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa semasa desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah segera mencapai tujuannya dan masih terkendala oleh kompleksitas persoalan yang dihadapi. Kompleksitas persoalan ini terajut oleh adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum kuatnya organisasi kemasyarakatan lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Dari uraian diatas dan mengingat bahwa rakyat adalah pemilik APBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka tentu menjadi penting untuk mengetahui tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung melalui riset. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?

Sementara dari sisi tujuan, penelitian ini diarahkan pada: (1) pernyataan yang menggambarkan tentang ada atau tidaknya partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajat (kategorisasi) partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung berdasarkan tangga partisipasi Arnstein.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami esensi tingkatan partisipasi yang dilakukan warga melalui kelompok

(group) dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung. Adapun yang menjadi informan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi masing-masing yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama meliputi: (1) aktor formal dari unsur eksekutif terdiri dari: (a) Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) Sekretaris Daerah, dan (c) SKPD-SKPD; dan dari unsur legislatif (DPRD) terdiri dari: (a) Ketua DPRD, (b) Wakil Ketua DPRD dan 9 orang anggota DPRD. Kelompok kedua adalah ditujukan untuk menggali partisipasi kolektif warga yang terdiri dari 7 organisasi kemasyarakatan (LSM dan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan akar rumput). Data dan informasi diperoleh melalui: 1) Observasi, 2) Wawancara dan 3) penelusuran dokumen. Sedangkan instrumen utama penelitian ini adalah peneliti. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas pengumpulan data. Analisis kualitatif ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data menjadi pola, kategori atau tema tertentu dengan narasi verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dalam Konteks Administrasi Publik

Sebagai nilai dasar demokrasi, tentunya partisipasi publik menjadi perhatian dan tempat utama dalam administrasi publik yang tertuang dalam ide yang mencakup 2 (dua) domain, yaitu: (1) manajemen partisipatif dan (2) partisipasi publik dalam administrasi publik (Muluk, 2004: 29). Jika ditelusuri lebih jauh lagi, domain manajemen partisipatif tertuang didalam karya Osborne dan Gaebler (1992) tentang 'reinventing governance' yang didalamnya paling tidak memuat 2 (dua) prinsip yang bersinggungan dengan partisipasi publik. Pertama, prinsip 'community owned government: empowering rather than serving' yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi publik didalam administrasi publik. Kedua, prinsip 'decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork' yang menunjukkan pentingnya manajemen partisipatif yaitu partisipasi

karyawan (aparatur publik) dalam penyelenggaraan administrasi publik. Namun dalam konteks penelitian ini, lebih difokuskan pada prinsip pertama, yaitu partisipasi publik (warga) dalam administrasi publik, bukan dimaknai sebagai partisipasi aparatur publiknya sebagai sesuatu konten dari manajemen partisipatif.

Dalam konteks pada umumnya, partisipasi publik dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan, baik yang bersifat manipulatif ataupun yang bersifat spontan. Partisipasi manipulatif mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Oleh karena itu, partisipasi bentuk ini disebut dengan 'teleguided participation' (Rahmena, 1992: 116). Sedangkan partisipasi spontan oleh Midgley (1986: 27) dimaknai sebagai "a voluntary and autonomous action on the part of the people to organize and deal with their problems unaided by government or other external agent". Kutipan ini memberikan pengertian tentang tindakan sukarela dan mandiri sebagian orang untuk mengorganisir dan memecahkan persoalan mereka tanpa diintervensi oleh pemerintah atau agen eksternal yang ada di sekeliling mereka. Pada konteks yang lebih khusus, Briant dan White memaknai partisipasi sebagai partisipasi masyarakat atau penerima manfaat dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Pernyataan Briant dan White ini memberikan sinyal bahwa partisipasi tentang perlunya keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan warga, perhatian yang lebih fokus pada perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan dan perimbas pada peningkatan kualitas kehidupan warga, serta kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan warga untuk menjamin jalannya penyelenggaraan tata-kelola institusi publik sesuai sasaran 'governance paradigm'.

Pada konteks empiris tentang partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung dapat dijelaskan dengan menjelajahi 3 (tiga) hal utama, yaitu: (1) ketersediaan landasan legal formal partisipasi publik; (2) jaringan dan saluran serta wujud keterlibatan (partisipasi) publik, dan (3) proporsi (persentase) alokasi pembiayaan antara keperluan publik (pembangunan) dengan

Tabel 1. Gambaran tentang ketersediaan perangkat landasan legal formal partisipasi publik dan perbandingan besaran anggaran belanja publik dengan belanja rutin dalam konten APBD Provinsi Lampung

No.	Tahun	APBD Provinsi Lampung		
		Ketersediaan Perangkat Landasan Legal Formal Partisipasi Publik (ada/tidak ada)	Belanja Publik (Pembangunan) (%)	Belanja Rutin (Pegawai/Organisasi) (%)
1	2009	Tidak ada	38	62
2	2010	Tidak ada	46	54
3	2011	Tidak ada	57	43

Sumber: Hasil olah dokumen APBD dan wawancara

kepentingan pembiayaan rutinitas keorganisasian (pemerintah provinsi) sebagai cermin isi (konten) APBD Provinsi Lampung yang berpihak atau tidak kepada kepentingan publik.

Gambaran yang menunjukkan tentang kuatnya komitmen (*political will*) Pemerintah Provinsi Lampung dalam memaknai urgensi dan pentingnya partisipasi publik akan terlihat dari ketersediaan perangkat aturan sebagai landasan formal yang disiapkan untuk melindungi partisipasi publik tersebut. Terlebih lagi apabila pemerintah ingin benar-benar menempatkan partisipasi publik bukan lagi sekedar kerelaan dan kebaikan hati pemerintah membuka akses partisipasi warga, tetapi sebagai layanan dasar yang melekat pada diri warga tersebut. Karena dengan adanya perangkat aturan partisipasi publik, bukan saja sekedar pemberian ruang bagi terciptanya akses partisipasi publik, tetapi juga dilengkapi dengan konsekuensi yang mengikat kedua belah pihak (pemerintah dan warga).

Namun sayang, berdasarkan pengkajian dokumen tiga tahun terakhir (2009, 2010 dan 2011) pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung bahkan berlanjut hingga tahun 2013 sekarang ini, belum ada payung legal formal baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang secara eksplisit mengatur partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD. Wawancara terhadap para elit pemerintah daerah dan legislatif (DPRD) juga menunjukkan anggapan tentang belum terlalu pentingnya ketersediaan landasan legal formal yang mengatur partisipasi publik. Lebih lanjut, pandangan mereka menyatakan bahwa partisipasi publik itu sudah melekat dengan adanya UU Nomor 32/2004. Disamping itu, partisipasi masih sebatas dimaknai sebagai kegiatan pemerintah untuk membuka peluang dan akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan APBD melalui mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat (*jaring asmara*). Oleh karenanya, pada sisi ini jelas mengindikasikan bahwa aktor formal (Pemerintah dan DPRD) Provinsi Lampung belum secara serius menghendaki keterlibatan aktif (partisipasi) publik, bahkan perilaku keseharian para elit formal ini alergi, menutup rapat-rapat pintu dan peluang atau terkesan memarjinalkan partisipasi publik.

APBD Provinsi Lampung lebih menunjukkan mobilisasi dan distribusi anggaran untuk mewujudkan tujuan ganda, yaitu: (1) lebih mengesankan pada aspek perealisasi kepentingan internal SKPD, dan (2) kepentingan mobilisasi kepentingan dan intrik politik dari top leader eksekutif dan legislatif daerah.

Wacana partisipasi para elit (aktor) formal baru sebatas jargon simbolis yang diwujudkan dengan *jaring asmara* melalui mekanisme *hearing* (dengar pendapat) dan diskusi dengan para akademisi atau dengan beberapa LSM sebagai pelengkap dan jastifikasi bahwa pembuatan keputusan APBD sudah melibatkan warga tanpa disertai oleh konsekuensi

yang mengikat kedua belah pihak dan perubahan konten APBD yang lebih mencerminkan kepentingan warga.

Hasil investigasi lapang menemukan bahwa kekuatan masyarakat sipil merupakan kelompok yang termasuk 'agenda setters', yaitu: LSM yang aktif menyuarakan hak-hak warga dan mengkritisi APBD, aktivis kampus (mahasiswa), pers, organisasi masa, kelompok kepentingan, tokoh adat dan organisasi akar rumput lainnya. Kelompok (*group*) masyarakat sipil ini setiap tahun pembahasan APBD selalu diundang untuk menghadiri musrenbang provinsi, tetapi kehadiran mereka hanya pada pembukaan musrenbang provinsi saja dan tidak terlibat dalam pembahasan masing-masing rencana (*program*) sebagai tahapan penting dalam mekanisme dan proses pembahasan APBD Provinsi Lampung. Hal lain yang berhasil dijumpai adalah aktivitas kekuatan masyarakat sipil diluar arena musrenbang provinsi dalam rangka mempengaruhi proses pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung juga belum dilakukan.

Uraian diatas mencerminkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung masih sangat rendah. Artinya jaringan dan akses partisipasi publik belum terbangun baik untuk mewujudkan *participatory budgeting* maupun dalam makna *participatory governance*. Identifikasi faktor penyebabnya adalah: (1) belum ada payung legal formal yang mengatur partisipasi publik pada level pemerintah daerah sebagai landasan tata-kelola dan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*); (2) pemaknaan partisipasi publik masih sebatas formalitas-simbolis yang hanya dijadikan jastifikasi dukungan publik; (3) lemahnya posisi tawar organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang hanyut terbawah arus permainan politik transaksional para elit (aktor) formal dengan alasan karena keterbatasan finansial untuk jalannya organisasi dan sudah tentu perlu mendapatkan dukungan pembiayaan pemerintah melalui mekanisme APBD; dan (4) terjadinya konflik kepentingan baik diantara para elit formal maupun sesama organisasi kemasyarakatan.

Jika uraian diatas ditautkan dengan kilas balik sejarah perkembangan partisipasi jelas menampakan sesuatu hal keparalelan. Selama ini partisipasi hanya dimaknai dalam arti politik sempit, yaitu praktek-praktek pemberian suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam kumpulan sukarela, gerakan protes dan kegiatan lain sejenis. Padahal dalam makna politis, partisipasi jauh memiliki arti dan makna strategis dari kegiatan praktek-praktek yang berskala kecil dengan lingkup yang sangat terbatas. Partisipasi politis dalam makna sesungguhnya dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) ranah strategis. Pertama, partisipasi horizontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Kedua, partisipasi pada arena vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat

mengembangkan hubungan dan interaksi tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Selain partisipasi dalam perencanaan, implementasi dan penerima manfaat seperti yang dijelaskan Briant dan White, maka Griesgraber dan Gunter (1996) memberikan penambahan aspek partisipasi dalam evaluasi keputusan kebijakan dengan mengartikulasikan partisipasi sebagai mekanisme yang membutuhkan keikut-sertaan masyarakat dalam suatu program, mulai dari tahap identifikasi sampai pada tahap implementasi dan evaluasi.

Dengan demikian, pengertian partisipasi oleh Midgley (1986: 23-24) dapat diklasifikasikan menjadi 2 pokok utama. Pertama, partisipasi populer yang berkenaan dengan isu yang lebih luas tentang pembangunan sosial dan penciptaan peluang keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial dari suatu bangsa. Kedua, partisipasi masyarakat yang berkonotasi 'the direct involvement of ordinary people in local affairs' berupa keterlibatan langsung tingkatan masyarakat tertentu dalam urusan-urusan pada level daerah/lokal. Lebih lanjut Midgley (1986: 24) memperjelas pengertian partisipasi masyarakat sebagai: "the creation of opportunities to enable all members of a community and the larger to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development". Kutipan ini memberikan penekanan tentang perlunya upaya penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata.

Dengan mempertimbangkan beberapa uraian tersebut berarti partisipasi masyarakat merupakan peran serta secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat dari keputusan kebijakan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Partisipasi berhimpit dengan makna 'involvement' dan 'empowerment'. Partisipasi itu terentang dari pembuatan kebijakan, implementasi dan hingga pada kendali warga terhadap keputusan kebijakan. Dan oleh karenanya, demokrasi administrasi publik merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi publik tersebut. Kini partisipasi tidak lagi dipandang sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa partisipasi merupakan layanan dasar dan bagian integral dari pemerintah daerah (local government) seperti yang tertuang dalam 'citizen-centred government' yang menyatakan bahwa partisipasi

publik merupakan instrumen bagi 'good governance'.

Berkaitan dengan partisipasi publik, Graham dan Philips (1998:225) mempublikasikan hasil studi tentang karakteristik partisipasi publik pada tataran 'local government', yang meliputi: (1) keterlibatan warga dalam keseluruhan proses pemilihan kota; (2) pada tingkat minimum, partisipasi publik melibatkan interaksi dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan outcome-nya; partisipasi melibatkan individu dan kelompok, baik yang bersifat ad hoc maupun yang bersifat stakeholders permanen. Jadi partisipasi publik dalam pemerintah daerah dapat dipahami sebagai keterlibatan langsung masyarakat secara sukarela dan mandiri dalam pembuatan keputusan, implementasi, evaluasi dan dampak keputusan berupa manfaat bagi kehidupan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Arnstein (1971:70) memperkenalkan ladder of participation (tangga partisipasi) dengan mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut konsep ini terdapat 3 (tiga) derajat partisipasi yang kemudian dirinci lagi kedalam 8 (delapan) anak tangga partisipasi.

Derajat pertama merupakan derajat yang terendah dan disebut dengan nonpartisipan. Aktivitas partisipasi yang terjadi di daerah ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan yang sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan dan implementasi keputusan, tetapi lebih sekedar tujuan penguasa untuk mendidik dan menyenangkan partisipan. Derajat ini melingkupi anak tangga manipulasi dan terapi.

Derajat kedua adalah derajat yang menunjukkan adanya tanda partisipasi (tokenism) dimana keterlibatan warga sudah lebih tinggi dari derajat pertama. Derajat kedua ini melingkupi anak tangga pemberian informasi, konsultasi dan penentruman (placation). Sudah terjadi aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi menandakan adanya komunikasi satu arah dari pihak pengendali otoritas (penguasa) kepada publik melalui penyebaran pamflet, pengumuman dan laporan tahunan. Konsultasi menunjukkan dialog dua arah melalui survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Sementara penentruman melibatkan aktivitas yang lebih dalam dengan mengajak masyarakat terlibat dalam komite pembuatan kebijakan meskipun penguasa tetap sebagai pemegang kendali utama pembuat dan penentu kebijakan.

8	Kendali Warga	Derajat kuasa warga
7	Kuasa yang didelegasi	
6	Kemitraan	
5	Penentruman	Derajat tanda partisipasi
4	Konsultasi	
3	Pemberian Informasi	
2	Terapi	Nonpartisipasi
1	Manipulasi	

Sumber: Arnstein (1971)

Gambar 1. Derajat dan Tangga Partisipasi Aronstein.

Derajat ketiga adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini mencerminkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) anak tangga dalam derajat ini, yaitu: kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga.

Dengan merujuk pada penjelasan Arnstein tentang derajat dan anak tangga partisipasi diatas, maka dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya tentang partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung lebih banyak diwarnai oleh karakteristik yang melekat pada derajat kedua, yaitu derajat tanda partisipasi, yaitu anak tangga pemberian informasi dan konsultasi seperti yang tergambar dalam uraian hasil penelitian sebelumnya.

SIMPULAN

Pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih lebih dimaknai sebagai proses politik dan sebagai media transaksi maupun bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajat ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4).

Sehubungan dengan hal diatas, maka dari sisi isi kebijakan lebih mencerminkan produk kepentingan aktor yang terlibat didalamnya, ketimbang mencerminkan kepentingan dan

kebutuhan publik yang sesungguhnya. Aktor kebijakan sangat mendominasi dalam semua tahapan, baik pada saat permusn hingga sampai pada tahapan penetapan APBD Provinsi Lampung. Terjadi pengabaian aspirasi, kritik dan isu-isu prioritas yang dimunculkan oleh kekuatan masyarakat serta terjadinya marjinalisasi akses kekuatan masyarakat dalam proses dan tahapan penggodogan APBD Provinsi Lampung. Akibatnya tindakan dan perilaku aktor kebijakan tidak dapat dikontrol (diawasi) dan tidak banyak mempertimbangkan aspirasi publik sehingga substansi APBD menjadi bias. Dan pola-pola seperti inilah yang sering dipersonifikasikan sebagai fable atau animal politic (politik dagang sapi), belum mengakar pada konteks dan tujuan demokrasi politik yang lebih mengedepankan terjadinya demokratisasi manajemen institusi publik sehingga terjadi kesetaraan antara 'state' dan 'public' dalam melakukan interaksi.

Atas dasar simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melalui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakatan dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoft, K dan Novack, J. 1998. *Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes*. Nova Scotia: Henson College and Dalhousie University.
- Arnstein, S.R. 1971. Eight rungs on the ladder of citizen participation in Edgard S. Cahn and Barry A. Passet. *Citizen Participation: Effecting Community Change*. New York: Praeger Publisher.
- Bryant, C and White, L.G. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Cresswell, J.W. 2002. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.
- Dwijowijoto, R.N. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Faisal, S. 1986. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: Y3A IKIP Malang.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Graham, K.A and Philips, S.D. 1998. *Making Public Participation More Effective*. Toronto: Institute of Public Administration of Canada.
- Griesgraber, J.M and Gunter, B.G. 1996. *Development: New paradigms and principles for the twenty-first century*. East Haven: Pluto Press.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Korten, D.C. 1988. *Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat: Menuju Suatu Kerangka Kerja dalam David C. Korten dan Sjahrir Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Terjemahan A. Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Solo: Fakultas Pertanian UNS.
- _____. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Solo: Fakultas Pertanian UNS.
- Midgley, J. 1986. *Introduction: Social Development, the State and Participation*. New York: Methuen.
- Miles, M. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Muluk, M.R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah: Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA Unibraw dan Bayu Media Publishing.
- Osborne, D and Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit in Transforming the Public Sector*. New York: A William Patrick Book.
- Rahmena, M. 1992. *The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power*. New Jersey: Zed Books.

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA SEBAGAI OBJEK WISATA ANDALAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALTIM

OPTIMIZATION OF DEVELOPMENT ECOTOURISM POTENCY OBJECTS KUTAI REGENCY PROVINCE KALTIM

M. Soleh Pulungan

Peneliti Balitbangda Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim

Jl.WR. Mongonsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-Balitbangda Lt.4

e-mail: solehpulungan66@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2013; direvisi: 26 Juli 2013; disetujui: 18 September 2013

Abstrak

Tujuan kajian untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekowisata dari mulai potensi alam, potensi budaya, potensi SDM hingga ketersediaan energi di kecamatan. Menentukan alternatif strategi bagi pengembangan ekowisata di wilayah Kecamatan. Sample penelitian meliputi 7 kecamatan yang ada di wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Metodologi yang digunakan yakni metode deskriptif, namun bersifat aplikatif, sehingga secara aktual dapat digunakan oleh para perencana dan pengambil keputusan pembangunan di daerah ini. Hasil penelitian; (1) bahwa responden memiliki persepsi negatif terhadap pengembangan ekowisata karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti, maksud dan tujuan/manfaat ekowisata. (2) Masyarakat selama ini belum berperan aktif dalam mengembangkan potensi produk wisata didaerahnya. (3). Alternatif strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang ekowisata ke semua stakeholders.

Kata kunci: ekowisata, potensi alam, budaya, masyarakat, kecamatan strategi

Abstract

Purposes of the study are to determine the potential that can be developed for ecotourism activities ranging from natural resources, cultural potential, the potential energy to the availability of human resources in the district of Kutai regency. In order to determine strategic alternatives for development ecotourism in the District. Research sample includes 7 districts of Kutai Regency. The methodology used the descriptive method, however, is applicable, so it can actually be used by planners and decision makers in the development of this area. The results: (1) that the respondent has a negative perception towards tourism development because of the lack of public knowledge about the meaning, purpose and objectives / benefits of ecotourism. (2) The public has not played an active role in developing the potential of tourism products in their respective regions. (3). Alternative strategies to enhance community participation is done in a way to disseminate to all stakeholders of ecotourism

Keywords: *eco-tourism, natural resources, culture, the people, district, the strategies.*

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kepariwisataan bertujuan untuk menggalakan perekonomian nasional dan daerah (Sayed, dkk., 2004) serta menjadi penopang sektor penerimaan negara selain sektor migas. Kajian Perspektif *developmentalist* oleh Pye dan Lin 1983 dalam Nugroho (1997) yang menegaskan bahwa pasar pariwisata internasional justru banyak menyumbangkan kecepatan, percepatan dan arah perkembangan pariwisata di negara-negara berkembang, pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan bagi perumusan strategi pembangunan di negara-negara berkembang sehingga dianggap sebagai "pintu masuk" bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain sebagai sumber penerimaan devisa, pariwisata dirasakan pula memiliki banyak elemen yang dapat mendorong transformasi ekonomi, dari karakter negara pertanian yang tradisional menuju masyarakat modern industrial, dari kondisi masyarakat yang subsistem menuju masyarakat yang berorientasi pasar (Hendarto, 2003).

Seperti diketahui Indonesia memiliki 10% jenis tumbuhan berbunga yang ada didunia, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amphibia, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga, walaupun luas daratan Indonesia hanya 1,32% seluruh daratan yang ada didunia (Bappenas, 1993 dalam www.ekowisata/pedoman_ekowisata), di dunia hewan Indonesia juga memiliki kedudukan istimewa di dunia, dari 500-600 jenis mamalia besar (36%

endemic), 35 jenis primata (25% endemik) kemudian sekitar 59% dari luas daratan Indonesia merupakan hutan hujan tropis atau sekitar 10% dari luas hutan yang ada di dunia (Stone, 1994), sekitar 100 juta hektar di antaranya diklasifikasikan sebagai hutan lindung yang 18,7 juta hektarnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Kutai Kartanegara yang memiliki luas wilayah 27.263,10 km² atau 2.726.310 ha (12,89%) dari luas wilayah propinsi Kalimantan Timur memiliki potensi pariwisata yang layak jual kepada para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara hal ini didukung dengan tinjauan kesejarahan bahwa Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia disamping secara kuantitas memiliki jenis wisata yang mampu ditawarkan kepada para wisatawan.

Jumlah wisatawan tahun 2008 (28.953 orang) meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 5.554 orang. Dari jumlah tersebut wisatawan asing sebesar 962 orang pada tahun 2008 dan 938 orang pada tahun 2007 yang berasal dari berbagai negara (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam DDA, 2010). Kedatangan wisatawan asing dari berbagai negara diharapkan dapat terus meningkat sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan.

Sektor pariwisata khususnya ekowisata dapat dijadikan sebagai ujung tombak bahkan menjadi *leading sector* guna meningkatkan potensi PAD dan PDRB Kutai Kartanegara, masalah yang muncul dalam sistem ekowisata di Kutai Kartanegara belum diidentifikasi seberapa besar potensi ekowisata yang tersedapat di kecamatan, untuk itu diperlukan survey potensi ekowisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar potensi ekowisata yang terdapat di Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara? (2). Bagaimana strategi pengembangan potensi ekowisata tersebut?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekowisata dari mulai potensi alam, potensi budaya, potensi SDM sampai kepada ketersediaan energi sosial di Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2) Untuk menentukan alternatif strategi bagi pengembangan ekowisata di Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara?

Berdasarkan tinjauan pustaka Spillane (1985) dalam Hamid (2003) yang dimaksud dengan pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bersifat sementara, dilakukan secara individu maupun kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keselarasan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Pandangan yang lebih luas di kemukakan dalam konferensi PBB

tahun 1963 tentang perjalanan dan pariwisata internasional di Roma yang merekomendasikan bahwa yang dimaksud dengan turis adalah mereka yang melakukan perjalanan lebih dari 24 jam dengan tujuan: (1). *Leisure* yang meliputi rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan olah raga. (2). *Business Family Meeting*

Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah dua buah kata yang terdiri dari dua kata yaitu: kata *pari* dan kata *wisata* kata *pari* berarti penuh, seluruh atau semua. Kata *wisata* berarti perjalanan, pariwisata berarti dapat diartikan suatu perjalanan penuh, mulai berangkat dari suatu tempat, kesatu atau beberapa tempat lain dan singgah kemudian kembali ketempat semula.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik secara perseorangan atau kelompok selama lebih 24 jam dengan maksud untuk melakukan perjalanan dari satu tempat yang lain dengan tujuan untuk rekreasi, liburan atau sejenisnya.

Konsep ekowisata di dunia pertama kali diperkenalkan oleh pakar ekowisata yang telah lama menggeluti perjalanan alam yakni Hector Ceballos dan Lascurain (1987) dalam www.situs.hijau.co.id. Definisi eko wisata pertama kali di perkenalkan oleh organisasi wisata (*The Ecotourism Society*) pada tahun 1990 Fandeli (2000) dalam Hendarto (2003) yang menyatakan bahwa perjalanan yang bertanggung jawab ke areal yang masih alami untuk menjaga lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat.

Wood (2001) dalam Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa *ecotourism* adalah meliputi jangkauan yang luas dari wisata alam namun juga meliputi kehidupan liar, pengalaman aneh atau pengalaman yang berbahaya (*Adventure*), wisata alam dalam definisi ini adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya baik dalam bentuk asli maupun setelah dipadukan dengan daya cipta manusia (Fandeli, 1995).

"Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini."

Belantara tropika basah di seluruh kepulauan Indonesia merupakan suatu destinasi. Destinasi untuk wisata ekologis dapat dimungkinkan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya aspek ekologis, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, pengelola dan pemerintah. *Destination areas elect to become involved in tourism primarily for economic reasons: to provide employment opportunities, to increase standard of living and, in*

the case of international tourism to generate foreign exchange. Tourism is viewed as a development tool and as a means of diversifying economics. (Wall, 1995: 57 dalam Gufran Darma Dirawan, 2003: 8).

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan *ecotour* adalah daerah alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa taman nasional, taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman buru. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Area alami suatu ekosistem sungai, danau, rawa, gambut, di daerah hulu atau muara sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata. (Gufran Darma Dirawan, 2003: 8)

Dengan demikian yang dimaksud dengan ekowisata (*Ecotourism*) adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, tercantum prinsip ekowisata sebagai berikut:

Unsur-Unsur Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata dipengaruhi oleh keberadaan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan itu sendiri (Dirjen PPKH-BPDL, 2001), yaitu:

1. Sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya.
Kekayaan keanekaragaman hayati merupakan daya tarik utama bagi pangsa pasar ekowisata sehingga kualitas, keberlanjutan dan pelestarian SDA, peninggalan sejarah dan budaya menjadi sangat penting untuk pengembangan ekowisata. Ekowisata juga memberikan peluang yang sangat besar untuk mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat internasional, nasional maupun lokal.
2. Masyarakat.
Pada dasarnya pengetahuan tentang alam dan budaya serta daya tarik wisata kawasan dimiliki oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi mutlak, mulai dari tingkat perencanaan hingga pada tingkat pengelolaan.
3. Pendidikan.
Ekowisata meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. Ekowisata memberikan nilai tambah kepada pengunjung dan masyarakat dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman. Nilai tambah ini mempengaruhi perubahan perilaku dari pengunjung, masyarakat dan pengembang pariwisata agar

sadar dan lebih menghargai alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya.

4. Pasar.
Kenyataan memperlihatkan kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap produk ekowisata di tingkat internasional dan nasional. Hal ini disebabkan meningkatnya promosi yang mendorong orang untuk berperilaku positif terhadap alam dan minat untuk mengunjungi kawasan yang masih alami agar dapat meningkatkan kesadaran, penghargaan dan kepeduliannya terhadap alam, nilai-nilai sejarah dan budaya setempat.
5. Ekonomi.
Ekowisata memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat, melalui kegiatan-kegiatan yang non-ekstraktif, sehingga meningkatkan perekonomian daerah setempat. Penyelenggaraan yang memperhatikan kaidah-kaidah ekowisata mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
6. Kelembagaan.
Pengembangan ekowisata pada mulanya lebih banyak dimotori oleh LSM, pengabdian masyarakat dan lingkungan. Hal ini lebih banyak didasarkan pada komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Namun kadang kala komitmen tersebut tidak disertai dengan pengelolaan yang profesional, sehingga tidak sedikit kawasan ekowisata yang hanya bertahan sesaat. Sementara pengusaha swasta belum banyak yang tertarik menggarap bidang ini, karena usaha seperti ini dapat dikatakan masih relatif baru dan kurang diminati karena harus memperhitungkan *social cost* dan *ecological-cost* dalam pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian adalah kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 7 kecamatan yang menjadi objek penelitian dalam studi ini antara lain: Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong, Sanga-Sanga, Anggana, dan Marang Kayu.

Responden terdiri dari *stakeholder* yang berada di dekat kawasan obyek wisata Ekowisata, yang terdiri dari: (1) Aparatur Kecamatan: Camat, Sekcam, 3 Orang Kasi. (2) Stakeholder desa: Kepala Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat

Sedangkan prosedur pengumpulan data Kajian yang akan dilaksanakan dirancang menggunakan metode deskriptif, namun bersifat aplikatif, sehingga secara aktual dapat digunakan oleh para perencana dan pengambil keputusan pembangunan di daerah ini. Dengan dasar tersebut

pengumpulan data dilakukan melakukan kunjungan ke wilayah kecamatan terpilih untuk menggali informasi terkait dengan ekowisata.

Analisis data dari hasil data yang diperoleh dari kuisioner, selanjutnya ditabulasi untuk interprestasi lebih lanjut. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka data tersebut akan disajikan secara diskriptif dan penjelasan kemudian dibuat suatu kesimpulan.

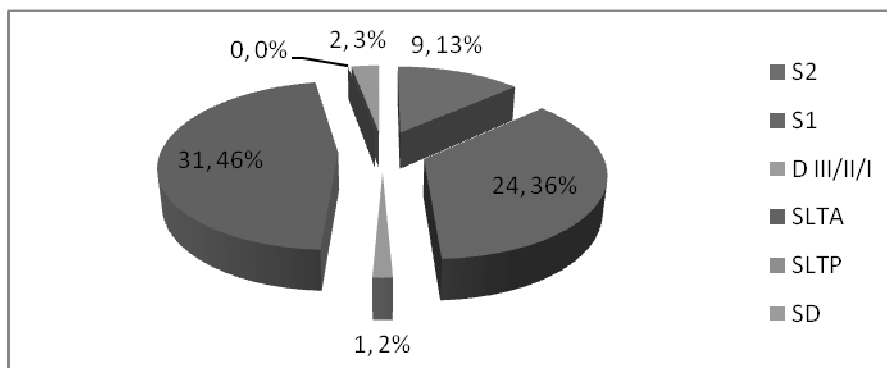
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat 7 wilayah kecamatan yang disurvei, masing-masing kecamatan memiliki potensi tersendiri dalam bidang kepariwisataan khususnya ekowisata. Potensi yang dimiliki tersebut selama ini merupakan wisata alam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata.

Profil Singkat Kecamatan Dan Responden

1. Kecamatan Anggana.
Kecamatan Anggana terletak di 117° 13' – 117° 36' Bujur Timur dan 0°24' LS – 0°54'LS (lintang Selatan) memiliki luas wilayah 1.798,80 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota Kecamatan 4 meter dari permukaan air laut. Kecamatan Anggana sebagian besar terdiri dari delta-delta yang disebut delta Mahakam. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 28.756 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 14.900 jiwa dan perempuan sebesar 13.856 jiwa.
2. Kecamatan Sanga-Sanga.
Kecamatan Sanga-Sanga terletak di 117° 01' – 117° 17' Bujur Timur dan 0°35' LS – 0°45'LS (Lintang Selatan), memiliki luas wilayah 233,40 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota Kecamatan 21 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 15.016 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 7.780 jiwa dan perempuan sebesar 7.236 jiwa.

3. Kecamatan Marang Kayu
Kecamatan Marang kayu terletak di 117° 06' – 117° 30' Bujur Timur 0°13'LS 0°07'LS (lintang Selatan) memiliki luas wilayah 1.165,71 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota Kecamatan 15 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 25.637 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 13.413 jiwa dan perempuan sebesar 12.224 jiwa.
4. Kecamatan Kembang Janggut
Kecamatan Kembang Janggut terletak di 115° 46' – 116° 28' Bujur Timur 0°27' LU – 0°02'LU (Lintang Utara) memiliki luas wilayah 1.923,90 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota kecamatan 11 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 21.728 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 11.782 jiwa dan perempuan sebesar 9.946 jiwa.
5. Kecamatan Kota Bangun
Kecamatan Kota bangun terletak di 116°27' – 116° 46' Bujur Timur 0°07' LS – 0°36'LS (Lintang Selatan) memiliki luas wilayah 1.143,74 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota Kecamatan 9 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 29.240 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 15.331 jiwa dan perempuan sebesar 13.909 jiwa.
6. Kecamatan Muara Kaman
Kecamatan Muara kaman terletak di 116° 28' – 117° 09' Bujur Timur 0°39' LU – 0°18'LS (lintang Selatan) memiliki luas wilayah 3.410,10 km², merupakan dataran rendah dengan ketinggian ibu kota kecamatan 4 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 34.282 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 18.138 jiwa dan perempuan sebesar 16.144 jiwa.
7. Kecamatan Tenggarong
Kecamatan Tenggarong 116° 47' – 117° 04' Bujur Timur 0°21' LS – 0°34'LS 398,10, merupakan dataran rendah dengan ketinggian



Sumber: Sumber: diolah dari data Primer 2010

Gambar 1. Profil responden berdasarkan pendidikan

ibu kota kecamatan 10 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk tahun 2008 mencapai 78.371 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 41.137 jiwa dan perempuan sebesar 37.234 jiwa.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dari 67 orang responden paling besar adalah tamatan SLTA disusul kemudian oleh lulusan S2 selanjutnya lulusan S2, untuk lulusan diploma hanya 1 responden dan lulusan SD 2 responden dan lulusan SLTP tidak ada.

Potensi Ekowisata Berdasarkan Kecamatan

Dari informasi yang dikumpulkan baik dari responden tingkat kecamatan maupun tingkat desa diperoleh data obyek wisata pada Tabel 2.

Keberadaan potensi ekowisata tersebut

sebagaimana sudah dikelola secara sederhana dan sebagian besar lagi belum dikelola sama sekali. Pemanfaatan potensi obyek ekowisata tersebut lebih banyak baru masyarakat sekitar namun bukan dalam rangka berwisata. Pemanfaatan area tersebut untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti dibidang pertanian yang terjadi di obyek air terjun di Sanga-Sanga, air terjun di Lebaho Ulak Muara kaman, Air terjun Tumenggung dan air terjun Bukit Biru Tenggarong. Pemanfaatan potensi untuk aktifitas nelayan terjadi di Marang Kayu pada obyek Pantai Kersik dan Pantai Indah Sebuntal, di Kota bangun dengan obyek Danau Semayang. Sedangkan pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata belum kurang dikelola dengan baik, dalam arti tidak signifikan sebagai daerah tujuan wisata.

Tabel 2. Potensi Obyek Wisata.

No	Kecamatan	Potensi Wisata	Potensi Ekowisata	Ket. kolom 4
1	Anggana	Makam Raja Kutai Lama	-	Wisata Rohani
2	Sanga-Sanga	1. Monumen Juang 2. Dam/Bendungan Belanda 3. Air Terjun 4. Goa Jepang 5. Pemandian Air Panas	1. Air Terjun 2. Pemandian Air Panas	1. Belum Dikelola, 2. Milik Warga, Kurang potensi
3	Marang Kayu	1. Pantai Kersik 2. Pantai Indah Sebuntal	1. Pantai Kersik 2. Pantai Indah Sebuntal	Saran prasarana tidak memadai
4	Kembang Janggut	Danau Pulau	Danau Pulau	Sudah dikelola namun blm baik
5	Kota Bangun	1. Gunung Tinjauan 2. Jeram Kedang Ipil 3. Danau Semayang	1. Gunung Tinjauan 2. Jeram Kedang Ipil (air terjun) 3. Danau Semayang	1. Bumi Perkemahan 2. Sumber Air minum 3. Mencari Ikan/ Padi
6	Muara Kaman	1. Situs Kerajaan Kutai 2. Air Terjun Lebaho Ulak	Air Terjun Lebaho Ulak	Belum Dikelola
7	Tenggarong	1. Museum Mulawarman 2. Waduk Panji Sukarame 3. Planetarium 4. Pulau Kumala 5. Air Terjun Temenggung, Bukit Biru 6. Air Terjun Bukit Biru	1. Air Terjun Tumenggung, Bukit Biru 2. Air Terjun Bukit Biru	1. Sumber Air pertanian & Tidak ada pemelihan-raan; 2. Belum Dikelola

Sumber: Diolah Dari Data Primer 2010

Tabel 3. Kondisi Lingkungan Hidup.

No.	Aspek Penilaian	Anggana	Sanga-Sanga	M kayu	Kb. Janggut	Muara kaman	Kota bangun	Tenggarong
1.	Kondisi lingkungan hidup obyek ekowisata	cukup terpelihara	tidak terpelihara	terpelihara	kurang terpelihara	kurang terpelihara	kurang terpelihara	tidak terpelihara
2.	Kondisi lingkungan hidup disekitar obyek ekowisata	kurang terpelihara	tidak terpelihara	terpelihara	kurang terpelihara	kurang terpelihara	kurang terpelihara	terpelihara

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

No.	Sarana dan Prasarana pendukung	Keberadaan Sarana Dan Prasarana berdasarkan Kecamatan						
		Anggana	Sanga-Sanga	Marang Kayu	Kembang Janggut	Kota bangun	Muara Kaman	Tenggarong
1	Terdapat sarana pariwisata yang memadai ?	Sudah	Ada, kurang memadai	Ada, kurang memadai	Sudah	Ada, kurang memadai	Belum	Ada, kurang memadai
2	Sebutkan sarana pariwisata tersebut beserta kondisinya!	Warung, jalan, tempat berteduh Dsb	Jalan masuk dg kondisi kurang baik	Warung dengan kondisi pas-pasan, tempat berteduh	Dermaga, dll.	Jalan masuk dengan kondisi kurang baik	Jalan sulit	Jalan masuk dengan kondisi kurang baik
3	Alat transportasi menuju potensi/obyek Ekowisata :	Roda 4	Tidak ada kendaraan, jalan kaki	Mobil dapat masuk	Ada, cuma jalan belum baik	Mobil dapat masuk	Roda 2	Mobil dapat masuk
4	Jarak obyek ekowisata dari jalan umum	50 m	5 km	50 m	2,5 Km	Relatif jauh	500 m	2 km
5	Jarak hotel/ penginapan terdekat	2 km	5 km	6 km	Jauh	Jauh, di ibu kota kecamatan	Tidak Ada	2 km
6	Nama hotel/penginapan terdekat	Penginapan	Banyak di Samarinda	Penginapan warga setempat	Penginapan warga	Mukzizat Dll		Grand Elty
7	Kategori hotel/ penginapan	Rumah warga	Melati s.d berbintang	Sederhana	Sederhana, terapung	Sederhana		bintang 3
8	Kondisi hotel/ penginapan terdekat	Baik/ sederhana		Sederhana	Bagus	Baik		baik
9	Jarak restoran/ rumah makan/ kedai yang terdekat	50 M	5 km	1 km	2,5 Km	Jauh, di ibu kota kecamatan	Ada 500 m	2 km
10	Kondisi restoran/ rumah makan/ kedai	Bagus	Mendukung	Mendukung	Baik	Baik	Ala kadarnya	baik

Sumber : Hasil Penelitian 2010

Pengetahuan, Pernyataan harapan ekowisata (Knowledge & Ecotourism Expectation)

Tabel 5. Ringkasan Pengetahuan dan pernyataan harapan Ekowisata

No	Pernyataan	Score	Penilaian
1	Sektor pariwisata di Kutai Kartanegara memiliki potensi yang tinggi bagi perekonomian	3	sangat setuju
2	Mengetahui tentang ekowisata	2	kurang memahami
3	Bahwa menjaga kelestarian alam merupakan hal yang penting untuk saat ini	3	sangat setuju
4	Bahwa menjaga kelestarian alam bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat	3	sangat setuju
5	Kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya adalah penting	3	sangat setuju
6	Bahwa partisipasi masyarakat, dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bidang pariwisata menjadi penting	3	sangat setuju
7	Nilai-nilai masyarakat lokal perlu dilestarikan	3	sangat setuju
8	Jika seluruh elemen masyarakat menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan	3	sangat setuju

Sumber: Ringkasan rata-rata Kuisisioner VII

Sarana pendukung Obyek Wisata

Daya dukung sarana dan prasarana pariwisata pada umumnya belum memadai, secara alamiah ada untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi lainnya, namun sebenarnya bukan ditujukan untuk kegiatan pariwisata. Tabel 4 menggambarkan secara umum kondisi potensi obyek potensi ekowisata yang berkaitan dengan sarana.

Keberadaan sarana dan prasarana ekowisata juga mendukung terhadap minat wisatawan. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana kurang mendukung terhadap ekowisata, hal ini karena belum ada program kebijakan yang mengarah pada era ekowisata.

Dalam Tabel 5. tersebut nampak bahwa pemahaman responden mengenai ekowisata masih

Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Tabel 6. Rangkuman Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

	Anggana	Sanga-Sanga	M Kayu	Kb. Janggut	Muara kaman	Kota bangun	Tenggarong
Dukungan masyarakat	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	mendukung	kurang mendukung	sangat mendukung
Keterbukaan Masyarakat	terbuka	terbuka	terbuka	terbuka	terbuka	terbuka	sangat terbuka
Kerukunan Masyarakat	rukun	rukun	rukun	rukun	rukun	rukun	sangat rukun
Perselisihan warga	jarang	jarang	jarang	jarang	jarang	jarang	tidak pernah
Kepercayaan tentu (ada/ Tidak)	ada	ada	tidak ada	ada	tidak ada	ada	ada
Bentuk kepercayaan poin 4.5	adat	mistik	-	adat		adat	tahayul
Sebutkan Kondisi ekonomi masyarakat sekitar	sejahtera	sejahtera	cukup sejahtera	kurang sejahtera	cukup sejahtera	cukup sejahtera	cukup
Mata Pencaharian dominan penduduk	perusahaan	perusahaan	nelayan	nelayan, petani	petani/ kerja perusahaan kelapa sawit	petani	petani

Kinerja Daya Dukung Ekowisata

Tabel 7. Ringkasan kinerja daya dukung ekowisata

No	Kinerja Daya Dukung Ekowisata	SCORE	Penilaian
1	Masyarakat telah menjaga kelestarian alam dengan baik	2	kurang setuju
2	Pemerintah telah membuat progtram guna menjaga kelestarian alam dengan baik	2	kurang setuju
3	Masyarakat telah memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	2	kurang setuju
4	Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pelestarian lingkungan dan budaya.	1	tidak setuju
5	Masyarakat telah berpartisipasi, dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bidang pariwisata	1	tidak setuju
6	Pemerintah telah memberikan akses bagi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bidang pariwisata	1	tidak setuju
7	Masyarakat telah mampu melertarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat	2	kurang setuju
8	Pemerintah telah membuat program untuk melertarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat	3	sangat setuju
9	Seluruh elemen masyarakat telah menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan.	3	sangat setuju
10	Pemerintah telah mampu untuk menjaga nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan	3	sangat setuju

Sumber: Ringkasan rata-rata kuisioner VIII

kurang, hal ini karena sosialisasi mengenai hal tersebut belum banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Disisi lain tingkat kesadaran mengenai kelastarian alam dan nilai-nilai lokal adalah tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan, bahwa kesadaran mengenai kelestarian alam belum diwujudkan dalam tindakan yang nyata.

Berkaitan dengan kelestarian alam (Pernyataan No 1, 2, 3, dan 4) sebagaimana Tabel 7. diatas menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah belum menunjukkan kepedulian yang baik terhadap kelestarian lingkungan, padahal ekowisata erat kaitannya dengan kelestarian alam tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut pengembangan kearah kebijakan ekowisata menjadi terkendala.

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengendalian pariwisata belum ada, responden juga merasa pemerintah tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini terlihat bahwa niat baik (good will) dari pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terkait khususnya ekowisata.

Yang menggembirakan dari hasil penelitian adalah bahwa telah terjadi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini merupakan aspek yang bisa digunakan dalam mewujudkan ekowisata.

Pembahasan

Hampir diseluruh wilayah kecamatan yang diteliti memiliki wilayah wisata alam yang berpotensi dikembangkan menjadi ekowisata. Dimana wisata alam mencakup banyak kegiatan, dari kegiatan menikmati pemandangan dan kehidupan liar yang relatif pasif, sampai kegiatan fisik seperti wisata petualangan yang sering mengandung resiko. Sedangkan ekowisata menuntut persyaratan tambahan bagi pelestarian alam. Dengan demikian ekowisata adalah "Wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, agar mereka dapat menaruh nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan (Goodwin, 1997:124)".

Salah satu tujuan Pengembangan Ekowisata di wilayah Kecamatan adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat desa yang bermukim di sekitar kawasan obyek wisata untuk bisa menjadi pelaku wisata di desanya masing-masing agar pada gilirannya nanti dapat ikut menikmati hasil dari kegiatan bisnis pariwisata yang gemerlap itu, tidak hanya menjadi penonton semata seperti yang terjadi selama ini, sebagaimana terjadi dalam pembangunan arena wisata buatan di kabupaten ini.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata sangatlah penting karena dapat

membantu meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat, jangan sampai nanti mereka bersifat apatis terhadap fasilitas yang disediakan. Banyak contoh/kasus di mana pemerintah membangun fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat, akhirnya terbengkalai begitu saja, tidak terawat bahkan kadang tidak bermanfaat sama sekali. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengadaan fasilitas tersebut. Contoh adalah pengembangan air terjun Tumenggung di Bukit biru Kec. Tenggarong.

Secara konsep pada umumnya responden belum memahami tentang ekowisata, namun secara sadar bahwa responden menyatakan bahwa menjaga kelestarian alam sangat diperlukan untuk membawa manfaat ekonomi secara berkesinambungan. Namun kenyataan kesadaran tersebut seringkali belum diaktualisasikan dalam praktek kehidupan yang peduli pada sumber daya alam. Disisi lain peranan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bidang Pariwisata belum ada. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah sangat tinggi, sehingga inisiatif masyarakat dalam pengembangan ekowisata menjadi rendah.

SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, responden memiliki persepsi negatif terhadap pengembangan ekowisata karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti, maksud dan tujuan/manfaat ekowisata. Akibatnya masyarakat selalu menunggu bantuan dari pemerintah untuk dapat membuat obyek wisata buatan supaya dapat cepat menarik wisatawan. Mereka tidak mengetahui atau menyadari bahwa kekayaan alam, lingkungan dan budaya tradisional di daerahnya merupakan suatu daya tarik ekowisata. Persepsi masyarakat yang negatif terhadap pengembangan ekowisata tersebut, berpengaruh pada peran serta mereka terhadap pengembangan ekowisata di Kutai Kartanegara.

Kedua, masyarakat selama ini belum berperan serta dalam mengembangkan potensi produk wisata di daerahnya. Mereka belum memiliki kesadaran dan inisiatif sendiri untuk mengembangkan wisata di daerahnya. Hal ini disebabkan karena selama ini masyarakat belum dilibatkan dalam proses pembangunan ekowisata mulai dari tahap perencanaan, sehingga masyarakat kurang mempunyai rasa memiliki (sense of belonging). Sebagai akibatnya masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada serta memanfaatkannya untuk pengembangan ekowisata.

Ketiga, alternatif strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang ekowisata ke semua

stakeholders, membuat kesepakatan kerjasama pengelolaan ekowisata dengan instansi terkait, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekowisata, mengikutsertakan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekowisata, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan pembinaan tentang konservasi dan mengefektifkan kegiatan kelembagaan lokal.

Rekomendasi

Rekomendasi ini merupakan upaya tindak lanjut dari hasil penelitian guna pengembangan ekowisata di kabupaten Kutai kartanegara.

1. Skenario dan Rancangan Pengembangan

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh gambaran mengenai wilayah kecamatan yang diteliti dengan memiliki potensi ekowisata, oleh karena itu perlu upaya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan pengembangan kawasan ekowisata di Kabupaten Kutai kartanegara.

Skenario pembangunan kawasan ekowisata tersebut diambil dengan melihat berbagai potensi yang mungkin untuk mengubah kawasan tersebut dimasa depan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya :

- a. Skenario I (Preservasi Kawasan) menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi Flora/ Fauna dimana pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mengambil dan mengelola kawasan tersebut dengan melarang masyarakat untuk mempergunakannya .
- b. Skenario ke II mengadakan transfer rights pengelolaan ke masyarakat dan menjadikannya kawasan yang memiliki potensi ekowisata kembali ke kondisi alam semula.
- c. Skenario III. Mengkombinasikan berbagai kegiatan mulai dari sektor perikanan dan pertanian rakyat , ekowisata dan konservasi kawasan kering maupun basah dimana flora dan fauna terpelihara secara alami.

2. Data dan Informasi Rencana pengembangan penelitian lebih lanjutan

Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memetakan potensi dan kelayakan pengembangan ekowisata di kabupaten Kutai kartanegara, oleh katena itu

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung pada waktu survey penelitian yang terdiri atas:

- a. Data biota yang ada dalam kawasan perencanaan (inventory flora dan fauna)

- b. Lokasi lokasi dimana adanya kehidupan hewan endemis.
- c. Inventori kondisi biofisik kawasan sebelum dan setelah pembangunan.
- d. Identitas masyarakat lokal termasuk didalamnya pola religi dan budaya masyarakat yang masih bertahan.
- e. Komponen sosial ekonomi masyarakat lokal.
- f. Identifikasi kebutuhan masyarakat lokal dan hubungan pola sosial masyarakat, berbentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat , keakraban antar warga,kegiatan berkelompok dan sebagainya.
- g. Kelembagaan atau institusi yang ada di masyarakat termasuk didalamnya Adat dan struktur tatanan masyarakat yang ada.
- h. Identifikasi bisnis wisata yang mampu mendukung.
- i. Identifikasi produk dan jasa yang dapat dijual.
- j. Identifikasi potensi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.
- k. Identifikasi profil wisatawan dalam hal ini psikologi, sosial, ekonomi dari wisatawan.
- l. Identifikasi keinginan wisatawan untuk ekowisata.
- m. *Willingness to pay* (WTP) dari para wisatawan.
- n. *Willingness to Accept* (WTA) dari para stakeholders.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Drumm and Alan Moore, 2005, Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and Managers Volume 1: An Introduction to Ecotourism Planning, Second Edition by The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.
- Anonim, Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekowisata Indonesia, Direktorat Jenderal Departemen pariwisata Seni dan Budaya, www.ekowisata.info/pedoman_wisata.html, diakses tanggal 19 April 2010.
- Hamid Sopyan Akhmad, 2003, Pengaruh perkembangan Industri pariwisata Terhadap Kunjungan Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tesis, PPS Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hendarto Agus Kresno, 2003, Ekowisata, Sebuah Diferensiasi Produk Pariwisata di Indonesia Pasca Tragedi Bali” 12 Oktober 2002”, Usahwan No 01TH XXXII Januari.
- Irfan, Hasnudi, Umar Sayed, Sembiring Iskandar, 2004, Survey Potensi Ekowisata di Kabupaten Dairi, USU digital Library, Medan.
- Lascurian, 1987, Konsep Ekowisata, www.situshijau.co.id. Diakses tanggal 19 April 2010.

- Nugroho, 1997, Industrialisasi Sektor Pariwisata : Pintu Masuk Pembangunan Atau Pelembagaan Keterbelakangan, <http://lib.atmajaya.ac.id> diakses pada tanggal 5 Juni 2010.
- Permen 33 Th 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
- Wood, M.E, 2002, Ecotourism: Principles, Practice and Policies For Sustainability, United Nation Publication, New York.



Biodata Penulis

Rosmawaty Sidauruk

Lahir di Pematang Siantar Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1955. Meraih gelar sarjana Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana Tahun 1986. Lulus Magister (S2) Administrasi Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2005. Tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan Daerah Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri dan sekarang menjadi Pejabat Fungsional Peneliti (Peneliti madya).

Moh. Ilham A. Hamudy

Lahir di Makassar, 21 November 1980. Saat ini bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pejabat Fungsional Peneliti. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Nasional Malaysia jurusan Ilmu Politik.

Kristian Widya Wicaksono

Lahir di Bandung, pada 22 Maret 1980. Bekerja sebagai dosen PNS pangkat Penata Muda Golongan III/a, dengan Jabatan Akademik Lektor. Menyelesaikan studi program sarjana Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Khatolik Parahyangan pada tahun 2004. Kemudian menyelesaikan program Magister Ilmu Sosial, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2009.

Leydi Silvana

Lahir di Jakarta pada tanggal 9 November 1980. Pada Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi Bidang Akuntansi Universitas Trisakti pada tahun 2003 dan Program Pascasarjana (S2) Bidang studi Keuangan pada tahun 2006 dari Universitas Trisakti Jakarta.

Imam Radianto Anwar Setia Putra

Lahir di Sei Geringging, 11 Februari 1983. Pendidikan terakhir Magister Manajemen pada Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2007. Sejak tahun 2008 mengikuti kegiatan penelitian pada BPP kemendagri dan pada tahun 2011 menjadi peneliti bidang kebijakan publik pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesatuan Bangsa Politik Dan Otonomi Daerah.

Dida Suhada Iskandar

Lahir di Ciamis tanggal 17 Oktober 1982. Saat ini bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pejabat Fungsional Peneliti.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jurusan Ilmu Politik.

Meity Handayani

Lahir di Jakarta pada 3 Mei 1984. Menyelesaikan program Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di STIE PERBANAS tahun angkatan 2002. Selesai kuliah pernah menjadi auditor untuk berbagai perusahaan swasta dan BUMN. Sejak tahun 2009 menjadi staf di Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

Noverman Duadji

Lahir di Pagalaram, 3 November 1969 menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang Tahun 1992, kemudian melanjutkan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Brawijaya tahun 2001, dan melanjutkan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Lulus Tahun 2012. Saat ini menjabat sebagai Lektor Universitas Lampung dengan jabatan peneliti Penata III/c.

M. Soleh Pulungan

Lahir pada 7 Oktober 1966. Saat ini bekerja pada Balitbangda Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Peneliti Muda Bidang Kebijakan Pendidikan. Selain itu juga menjabat sebagai Koordinator Fungsional Peneliti Balitbangda Kukar-Kaltim. Menyelesaikan pendidikan program sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada 1994, kemudian menyelesaikan program Magister Hukum di Universitas Putra Bangsa Surabaya pada 2004.



Pedoman Penulisan

1. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian pemerintahan dalam negeri/pemerintahan daerah.
 2. Substansi artikel diharapkan sejalan dengan Panduan Akreditasi Berkala Ilmiah, yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
<http://www.bpp.depdagri.go.id/...>
 3. Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar.
 4. Sistematika Penulisan
Sistematika penjenjangan atau peringkat judul artikel dan bagian-bagiannya dilakukan dengan cara berikut:
 - (1) Judul ditulis dengan huruf besar semua, di bagian tengah atas pada halaman pertama;
 - (2) Sub Bab Peringkat 1 ditulis dengan huruf pertama besar semua rata tepi kiri;
 - (3) Sub Bab Peringkat 2 ditulis dengan huruf besar-kecil rata tepi kiri.
- Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi, alamat e-mail penulis, abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 250 kata dalam bahasa Indonesia) yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan (tanpa ada subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil penelitian dan pembahasan; simpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).

JUDUL (*ringkas dan lugas; maksimal 14 kata, hindari kata “analisis”, “studi”, “pengaruh”*)

Penulis 1¹ dan Penulis 2²

¹Nama instansi/lembaga Penulis 1

Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis

²Nama instansi/lembaga Penulis 2

Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis

(jika nama instansi penulis 1 dan 2 sama, cukup ditulis satu saja)

E-mail penulis 1 dan 2:

Abstract: *Abstract in english (max. 150 words)*

Keywords: *4 – 5 words/ phrase (separated with ;)*

Abstrak: *Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata)*

Kata kunci: *4 – 5 kata/ frasa (dipisahkan dengan ;)*

PENDAHULUAN

(berisi latar belakang, sekilas tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian, yang dimasukkan dalam paragraf-paragraf bukan dalam bentuk subbab)

METODE PENELITIAN

Subbab

...

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Hasil adalah gambaran lokus. Pembahasan adalah analisa dan interpretasi penulis)

Subbab

...

SIMPULAN

(*Simpulan adalah hasil dari pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian*)

DAFTAR PUSTAKA

- Sistematis artikel hasil pemikiran/reviu/telaahan adalah: *judul; nama penulis* (tanpa gelar akademik); *nama dan alamat institusi, alamat e-mail penulis, abstrak* (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); *kata-kata kunci* (4-5 kata kunci); *pendahuluan* (tanpa ada subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub-judul); *simpulan*; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).

JUDUL

Penulis

Nama instansi/lembaga Penulis

Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis

E-mail penulis

Abstract: *Abstract in English (max. 150 words)*

Keywords: *4 – 5 words/ phrase*

Abstrak: *Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata)*

Kata kunci: *4 – 5 kata/ frasa*

PENDAHULUAN

PEMBAHASAN

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

5. Artikel diketik pada kertas ukuran A4 berkualitas baik. Dibuat sesingkat mungkin sesuai dengan subyek dan metode penelitian (bila naskah tersebut ringkasan penelitian), biasanya 20-25 halaman dengan spasi satu, untuk kutipan paragraf langsung diindent (tidak termasuk daftar pustaka).
6. **Abstrak**, ditulis satu paragraf sebelum isi naskah. Abstrak dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian.
7. a. Penulisan *numbering* kalimat pendek diintegrasikan dalam paragraf, contohnya:
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, (2) Untuk mengetahui apakah persentase kepemilikan manajemen berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan, dan (3) Untuk mengetahui apakah tipe industri berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan?
b. Penulisan *bullet* juga diintegrasikan dalam paragraf dengan menggunakan tanda koma pada antarkata/kalimat tanpa *bullet*.
8. **Tabel** dan **gambar**, untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel atau gambar baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis-garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
 - d. Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
 - e. Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.

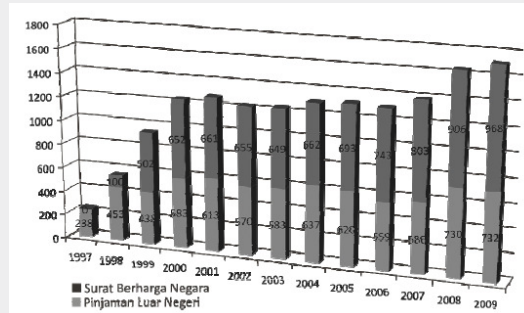
Contoh Penyajian Tabel:

Tabel 1. Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk

No.	Bentuk Mobilitas	Batas Wilayah	Batas Waktu
1.	Ulang-alik (<i>commuting</i>)	Dukuh	6 jam atau lebih, kembali pada hari yang sama
2.	Mondok di daerah tujuan	Dukuh	Lebih dari satu hari tetapi kurang dari 6 bulan
3.	Menetap di daerah tujuan	Dukuh	6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan

Sumber: Ida Bagoes, 2000

Contoh Penyajian Gambar:



Sumber: Bank Indonesia, 2009

Gambar 1. Utang Indonesia (dalam triliun Rupiah).

9. Cara penulisan rumus, Persamaan-persamaan yang digunakan disusun pada baris terpisah dan diberi nomor secara berurutan dalam parentheses (*justify*) dan diletakkan pada margin kanan sejajar dengan baris tersebut. Contoh:

$$wt = f(yt, kt, wt-1)$$
10. Keterangan Rumus ditulis dalam satu paragraf tanpa menggunakan simbol sama dengan (=), masing-masing keterangan notasi rumus dipisahkan dengan koma. Contoh:
 dimana **w** adalah upah nominal, **yt** adalah produktivitas pekerja, **kt** adalah intensitas modal, **wt-1** adalah tingkat upah periode sebelumnya
11. Perujuk sumber acuan di dalam teks (*body text*) dengan menggunakan nama akhir dan tahun. Kemudian bila merujuk pada halaman tertentu, penyebutan halaman setelah penyebutan tahun dengan dipisah titik dua. Untuk karya terjemahan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya.
 Contoh:
 - Buitter (2007:459) berpendapat bahwa...
 - Fatimah dan Daryono (1997) menunjukkan adanya...
 - Didit *dkk* (2007) berkesimpulan bahwa...
 - Untuk meningkatkan perekonomian daerah... (Yuni, Triyono, dan Agung Riyardi, 2009)
 - Maya (2009) berpendapat bahwa...
12. **Setiap kutipan harus diikuti sumbernya (lihat poin no.11) dan dicantumkan juga dalam daftar pustaka. Contoh:**
Di dalam paragraf isi (*Body Text*) ada kutipan:
 Buitter (2007:459) berpendapat bahwa...
Maka sumber kutipan tersebut wajib dicantumkan/disebutkan di dalam daftar pustaka:
 Buitter, W.H. 2007. The Fiscal Theory of the Price Level: A Critique, *Economic Journal*. 112(127):459
13. **Sedapat mungkin pustaka-pustaka yang dijadikan rujukan adalah pustaka yang diterbitkan 10 tahun terakhir dan diutamakan lebih banyak dari Jurnal Ilmiah (50 persen).** Penulis disarankan untuk merujuk artikel-artikel pada Jurnal Bina Praja dari edisi sebelumnya.

14. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi: (1) nama akhir pengarang, nama awal, nama tengah, *tanpa gelar akademik*. (2) tahun penerbitan. (3) judul termasuk subjudul. (4) tempat penerbitan. (5) nama penerbit.
Contoh cara penulisan:
- a. Format rujukan dari buku: Nama pengarang. (tahun). Judul Buku. Edisi. Kota penerbit: Nama penerbit.
Jika penulis sebagai editor tunggal, ditulis (Ed.) di belakang namanya. Ditulis (Eds.) jika editornya lebih dari satu orang. Kemudian bila pengarang lebih dari tiga orang, dituliskan nama pengarang pertama dan yang lain disingkat 'dkk' (pengarang domestik) atau 'et.al' (pengarang asing)
Enders, W. 2004. *Applied Econometric Time Series*. Second edition. New York: John Wiley & Son.
Purnomo, Didit (Ed.). 2005. *The Role of Macroeconomic Factors in Growth*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press
 - b. Format rujukan dari artikel dalam buku ditulis: Nama editor (Ed.). (tahun). Judul tulisan/karangan. Judul buku. hlm atau pp. kota penerbit: nama penerbit.
Daryono (Ed.). 2005. *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview* (hlm. 12-25). Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press.
 - c. Format rujukan dari artikel dalam jurnal/majalah/koran: Nama pengarang (tahun). judul tulisan/karangan. Nama jurnal/majalah/koran. volume (nomor): halaman. Jika rujukan koran tanpa penulis, nama koran ditulis di awal
Rodden, J. 2002. The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World. *American Economic Journal*. 46 (3): 670. Nashville: American Economic Association.
Triyono. 2008. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Efek. *Warta Ekonomi*. Vol. 4. Agustus: 46-48
Haryanto, S. 2007, 13 November. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Ekonomi. *Harian Jakarta*. hlm.4.
Harian Jogjakarta. 2007, 1 April. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia*. hlm.4.
 - d. Format rujukan dari internet, tanggal akses dicantumkan.
Setyowati, E. *Keuangan Publik dan Sistem Harga*. <http://www.ekonomipublik.com/akt/pdf/akt452.pdf>. Diakses tanggal 27 Mei 2009.
15. Referensi Online yang dianjurkan dalam penggunaan bahasa Indonesia:
- a. Glosarium kata baku dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/glosarium/>
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia: <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/>
 - c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD): <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/lamanv4/sites/default/files/EJD-KKP-PBN-BID.PENGEMBANGAN.pdf>

Pengiriman Artikel

1. Artikel dikirimkan sebanyak 2 eksemplar *hardcopy*, dan *softcopy* berupa file. File bisa dikirim melalui e-mail jurnalbinapraja@yahoo.com atau dalam media cd.
2. Artikel yang dikirim **wajib** dilampiri biodata ringkas pendidikan termasuk catatan riwayat karya-karya ilmiah sebelumnya yang pernah dipublikasikan, insitusi dan alamatnya, nomor telpon kontak atau e-mail penulis.
3. Penulis yang menyerahkan artikelnya harus menjamin bahwa naskah yang diajukan tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
4. Kepastian naskah dimuat atau tidak, akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

Alamat Jurnal Bina Praja:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta 10420
Telepon/Fax: +62 21 310 1953 / +62 21 392 4451
e-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com

ISSN : 2085-4323



Percetakan:
PT. Rudo Maiestas Tata
Anggota IKAPI No.: 214/JBA/2012